



# JAKARTA BANGKIT

2022

Rumah Sehat  
untuk Jakarta

RSUP Dr. Cipto  
Asih



## **ANNUAL REPORT TGUPP 2021**

**Tim Gubernur**

**Untuk Percepatan Pembangunan**

copyright ©2021

### **Penyunting:**

Totok Amin Soefijanto, Ed.D

(Email: totok.amin@jakarta.go.id)

Muhammad Fajar Anandi

(Email: fajaranandi@gmail.com)

### **Penulis:**

Alam Medina

Artricia Marina Rasyid

Atina Saraswati

Dinanti Arghia

Fadhila Trifani

Wiliam Reynold

### **Desain:**

Dayu Roosanti

Diterbitkan oleh

xxx

<https://jakarta.go.id/tgupp>

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa

izin tertulis dari Penerbit.



**Dr. Amin Subekti**

Ketua Tim Gubernur  
untuk Percepatan  
Pembangunan  
Pemerintah Provinsi  
Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Kami selaku keluarga besar Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ingin mengucapkan puji dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan laporan tahunan edisi keempat TGUPP tahun 2021 ini. Tahun keempat mengingatkan kami betapa berharganya waktu, dimana organisasi kami menjadi semakin matang dan siap menuntaskan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban yang telah dimandatkan.

Kami harapkan temayang dipilih untuk laporan tahunan ini yaitu **"Jakarta Bangkit"** dapat merepresentasikan semangat kami dalam menghadapi pandemi, melaksanakan aktivasi dan juga penyelesaian program prioritas di tahun 2021 dalam laporan ini. Tema tersebut kami ambil karena Kota Jakarta pada tahun 2021 masih terus berusaha menanggulangi dampak Pandemi Covid-19, Jakarta dilanda puncak penularan Covid-19 pada pertengahan tahun 2021.

Perekonomian Jakarta mulai pulih dari waktu ke waktu, sehingga kegiatan-kegiatan aktivasi sudah mulai aktif dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat. Dengan momentum pemulihan Ekonomi dan Pembangunan, TGUPP menjadi organisasi yang sangat strategis dalam penyusunan kebijakan program prioritas, sehingga di tahun keempat dan selanjutnya akan menjadi penentuan kesuksesan kota Jakarta.

Dengan laporan ini kami akan memaparkan hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dan yang menjadi fokus utama kami untuk dituntaskan selama tahun 2021, selain laporan ini merupakan mandat pada Peraturan Gubernur nomor 16 Tahun 2019, laporan ini kami harapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi kami dan juga pembelajaran bagi khalayak umum lainnya.

Laporan tahunan sejatinya merefleksikan lebih dari suatu mandat dan sebuah kewajiban. Bagi kami yang menulis dan menjalani hari, laporan tahunan adalah wadah bagi kami untuk dapat merenungkan pembelajaran - pembelajaran yang telah kami lalui selama satu tahun kemarin, dan mengevaluasi bagaimana kami dan mitra TGUPP dapat merampungkan tahun terakhir program maupun proyek prioritas dengan lebih baik agar menorehkan arti dan manfaat yang mendalam bagi warga DKI Jakarta.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada tim penyusun dan pihak pihak yang telah membantu menuntaskan laporan tahunan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi kita semua untuk mengemban tugas mulia ini dengan amanah dan semangat, demi Jakarta Bangkit.

**Jakarta, 2022**

**6 BAB 1:  
Menenal Lebih Para Pemantik**

**11 BAB 2: Paceklik Ibukota**

- 12 Covid-19: 3T dan Vaksinasi
- 14 Bansos dan KSBB
- 18 Banjir Ibu Kota

**22 BAB 3:  
Kerjakan, Kolaborasikan, Tuntaskan**

- 23 Mewujudkan Kemudahan Akses Transportasi Umum melalui Jak Lingko
- 28 Mewujudkan Pengalaman Bermobilitas Aktif yang Lebih Baik di Jakarta
- 31 RPJMD
- 33 Inovasi Jakarta dalam Mendukung Capaian PAD
- 41 Mempertahankan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 Tahun Berturut-turut
- 43 Peningkatan Kinerja BUMD
- 47 RTRW, RDTR
- 51 Kawasan Berorientasi Transit
- 54 Taman Ismail Marzuki
- 56 Fasilitas Pejalan Kaki & *Ducting IT*
- 67 Mendorong Partisipasi Warga dalam Perencanaan dan Pembangunan Taman Maju Bersama
- 71 Geliat Pengelolaan Air Limbah: Upaya Jaga Lingkungan Kota
- 73 Upaya Peningkatan Cakupan Air Bersih sebagai Hak Dasar Warga
- 77 Persampahan
- 80 Aksi Perubahan Iklim & Pengendalian Kualitas Udara
- 85 Bus Listrik & Zona Rendah Emisi
- 87 Transformasi Digital
- 92 Manajemen Kerja, Meritokrasi Kualitas Kinerja Pemerintah
- 94 Walikota
- 96 Jakarta Public Policy Center
- 98 Jakarta Investment Center

**100 BAB 4: Hadirkan Dampak Bagi Kota**

- 101 Stadion Sepakbola Berstandar Internasional
- 104 Pengembangan Kawasan Wisata & Ekonomi Kreatif
- 109 Penataan Kampung Jakarta
- 113 KJP Plus
- 116 Naramuda Jakarta
- 119 Jakarta Sekolah Kolaborasi
- 122 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 128 Integrasi Bansos dan Carik, Aksesibilitas Bagi Disabilitas, KLJ & KAJ
- 132 JakPreneur
- 135 Formula E
- 138 Kolaborasi

**147 BAB 5: Kontemplasi**

*Bagi kami yang menulis dan menjalani hari, laporan tahunan adalah wadah untuk dapat merenungkan pembelajaran - pembelajaran dan mengevaluasi bagaimana kami dan mitra TGUPP dapat merampungkan tahun terakhir program dengan lebih baik agar **menorehkan arti dan manfaat yang mendalam bagi warga DKI Jakarta.***







## **BAB 1:**

# Mengenal Lebih Para Pemantik





Foto 1: TGUPP DKI Jakarta | Sumber: Dokumentasi pribadi

*Pembentukan TGUPP didasari oleh pemikiran tentang sebuah tim khusus berdedikasi tinggi yang dibutuhkan guna mengawal dan memastikan satuan-satuan kegiatan dapat tereksekusi dengan baik serta tepat sasaran secara holistik dari hulu hingga ke hilir.*

TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) adalah sebuah tim dan bukan merupakan Perangkat Daerah, berisikan tokoh-tokoh, para ahli, serta tenaga profesional non-ASN DKI Jakarta, tim ini dibentuk untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada dan mempercepat pembangunan yang menjadi target dan amanat yang diemban. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1), TGUPP merupakan “tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur”. TGUPP memiliki peran yang penting dalam memastikan ketercapaian 23 janji kampanye dan visi-misi yang diangkat selama masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. Secara operasional, TGUPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Sejak awal, pembentukan TGUPP didasari oleh pemikiran tentang sebuah tim khusus berdedikasi tinggi yang dibutuhkan guna mengawal dan memastikan satuan-satuan kegiatan dapat tereksekusi dengan baik serta tepat sasaran secara holistik dari hulu hingga ke hilir. TGUPP bukan hanya mengemban fungsi penasihat tetapi juga membantu Gubernur dalam memastikan fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif dan efisien.







Foto 2: Weekly Meeting TGUPP DKI Jakarta | Sumber: Dokumentasi pribadi



Tugas TGUPP adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur;
2. Memberikan pertimbangan, saran, serta masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur;
4. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
5. Melaksanakan pendampingan program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Gubernur;
8. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TGUPP memiliki wewenang untuk:

1. Mengundang rapat Perangkat Daerah;
2. Meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
3. Mendengarkan pendapat, penjelasan, serta keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

*TGUPP bukan hanya mengemban fungsi penasihat tetapi juga membantu Gubernur dalam memastikan fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif dan efisien.*

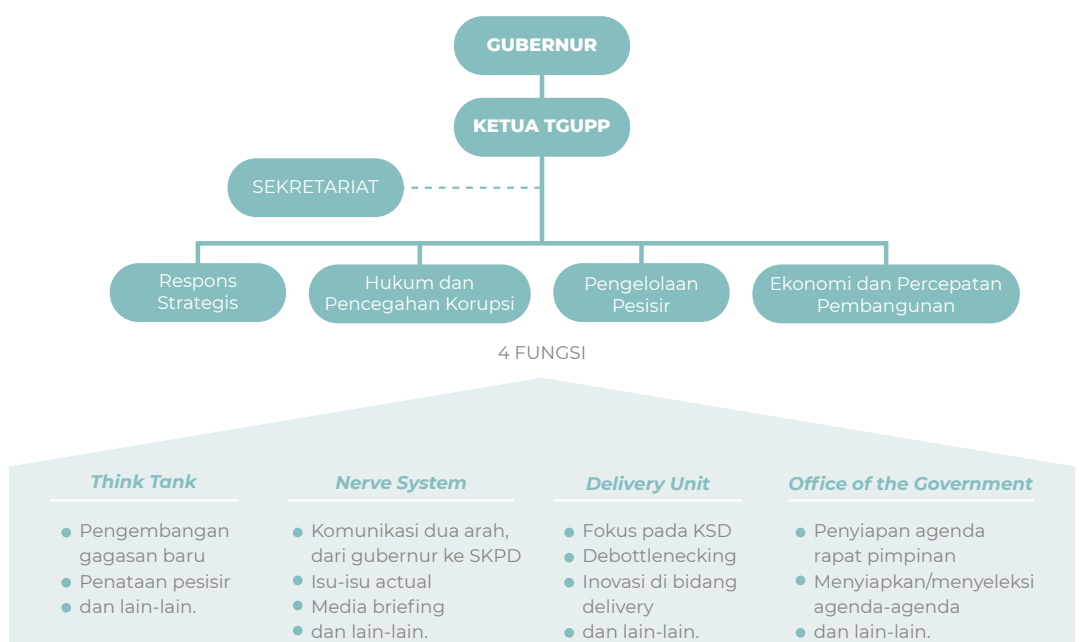




Fungsi TGUPP sekurang-kurangnya ada empat, yakni sebagai:

1. “Tangki pemikir”: pengembangan gagasan baru, menata pesisir, mengelola aset, menegakkan *good governance*, menerjemahkan ide-ide strategis Gubernur ke dalam aksi yang konkret dan *doable*, mitra diskusi pimpinan, dan lain-lain;
2. “Sistem syaraf”: penjemputan pesan dan komunikasi dwiarah (dari Gubernur ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Perangkat Daerah dan sebaliknya), menanam-sebarkan transformasi kultur serta *mindset*, ketepatan akan isu-isu aktual (menghimpun informasi hingga menyajikan secara layak ke Gubernur), menerjemahkan serta mendiseminasikan pesan ke publik (misalnya melalui *media briefing*), dan lain-lain;
3. “Tukang pemberes” (*delivery unit*): fokus pada beresnya ketersampaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD), menjadi tukang “pengurai sumbatan”, mendorong inovasi-inovasi pada bidang penyampaian kebijakan, *role model* bagi tim/organisasi yang efektif, dan lain-lain;
4. “Kantor Gubernur”: menyiapkan agenda rapat pimpinan, mengerjakan fungsi-fungsi konsultansi dalam hal prioritas dan seleksi agenda-agenda Gubernur, menyampaikan pandangan terhadap hal *do and don't* (dalam konteks birokrasi serta administrasi) kepada gubernur sejauh diminta, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019, struktur organisasi TGUPP terdiri dari 1 ketua, 4 bidang, dan 1 sekretariat.



Gambar 1: Struktur Organisasi TGUPP | Sumber: Pemprov DKI Jakarta



### Ketua TGUPP

Bapak Dr Amin Subekti menjabat sebagai Ketua TGUPP periode 2018-2022 dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TGUPP;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP; dan
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TGUPP.

### Sekretariat TGUPP

Berdasarkan Pergub yang sama, Sekretariat TGUPP juga diamanatkan untuk dibentuk dan berkoordinasi langsung dengan Bappeda yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang bersifat administratif, seperti: manajemen personalia, keuangan, sarana dan prasarana kerja, surat-menyurat, hingga kerumahtanggaan.

Melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, kesekretariatan dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten di bidangnya dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana. Formasi jabatan pada Sekretariat TGUPP ditetapkan sesuai kebutuhan. Adapun tugas dari Sekretariat TGUPP adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana kerja TGUPP;
2. Melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
3. Menyusun program kerja dan anggaran TGUPP berdasarkan usulan ketua TGUPP;
4. Memfasilitasi kebutuhan rapat TGUPP; dan
5. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP.

*Melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, kesekretariatan dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten di bidangnya dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana.*





## Covid-19: 3T dan Vaksinasi

*Pelajari, lakukan aksi, rancang mitigasi*

### 2021: Penanganan dan mitigasi.

Komitmen Jakarta akan keselamatan warga tetap jadi prioritas, utamanya di masa pandemi. Pada tahun 2021, fokus kota tetap diberikan pada penanganan Covid-19: 3T (*testing, tracing, dan treatment*) serta vaksinasi. Tercatat, di Jakarta tersedia 139 lab kolaborator yang terwujud untuk mendukung adanya *testing*. Selain itu, kota juga berupaya merekrut lebih dari 1500 tenaga kesehatan tambahan, terlebih saat jumlah puncak penambahan kasus aktif pada Februari (26.000 kasus aktif) dan Juli (mencapai 113.000 kasus aktif) 2021 lalu. Bersama dengan itu, fasilitas dan penyediaan tempat tidur, lokasi isolasi terkendali, dan hotel juga secara intensif disediakan lewat kolaborasi bersama ragam kolaborator.

### Bahu-membahu antarpihak.

Keterlibatan lintas sektor dalam hal ini menjadi hal dasar yang disadari kota. Bersama dengan arahan Gubernur, TGUPP melakukan ragam upaya koordinasi dan komunikasi intens terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan percepatan aksi. Hal tersebut, hadir melalui ragam kegiatan kolaboratif antarsektor. Sebut saja, bersama dengan peran warga atau wilayah setempat (isolasi mandiri), TNI-Polri (peningkatan tingkat *tracing* 1 kasus positif: 15-16 kontak erat), serta pelbagai aksi lainnya bersama kolaborator (pemantauan rutin kasus aktif, penyediaan volume oksigen, penambahan *bed* isolasi terkendali, dan lain-lain).

Lebih lanjut, penguatan jaringan dinas juga terus digalakkan. Penugasan kepada tim hingga level wilayah mikro (RT/RW) juga dilakukan: identifikasi secara konsisten tiap-tiap wilayah, memastikan kebutuhan obat dan pokok terpenuhi, dan pelayanan terhadap warga yang wafat akibat Covid-19 sekaligus penyediaan tempat penitipan jenazah sementara apabila SDM pemulasaraan tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan di hari yang sama.



**Foto 3: Vaksinasi Lansia** | Sumber: Diskominfotik DKI Jakarta





Foto 4: Serbuan Vaksinasi di GBK | Sumber: Diskominfotik DKI Jakarta

*Keterlibatan lintas sektor menjadi hal dasar yang disadari kota. Hal tersebut, hadir melalui ragam kegiatan kolaboratif antarsektor.*

### Hasil.

Lewat aneka upaya dan usaha di atas, penanganan pandemi secara perlahan semakin terkendali. Terlihat, pada penanganan di masyarakat, tingkat kesembuhan warga terus mengalami peningkatan. Hal ini, juga diiringi dengan prosedur vaksinasi yang kian mudah dan cepat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), mal, hingga kelurahan, bahkan lembaga masyarakat. Pandemi ini juga semakin mendorong adanya redistribusi melalui bantuan COVID baik dari sisi kota (KJP, kartu disabilitas, bansos khusus COVID), hingga masyarakat (program KSBB). Lebih lanjut, aktivasi dengan mitigasi juga diciptakan lewat produksi kota Jakarta akan buku panduan kesehatan urban bertajuk “Nasihat-sehat.” Produk ini, untuk semakin mendorong gaya hidup sehat di wilayah kota.

### Rancang pencegahan, komunikasikan, dorong penyempurnaan.

Melalui pengalaman serta perjalanan tersebut, TGUPP hadir dalam setiap momentum guna memetakan konsep pencegahan di masa pandemi ini. Misalnya, prosedur dan langkah 3T hingga evaluasi dan pengembangan prosedur pemulasaran jenazah terpapar Covid-19. Lebih lanjut, TGUPP juga memegang peran percepatan dengan memastikan komunikasi koordinasi lintas sektor berjalan optimal. Bersama dengan tim Bidang Respon Strategis TGUPP, tim juga berupaya melihat kondisi di lapangan guna memahami kendala dan keluhan warga.

Melalui Bidang Respon Strategis, TGUPP juga berperan dalam menerima dan menindaklanjuti aduan warga terutama ketika puncak kasus Covid-19 terjadi di Jakarta pada tahun 2021. Mengkoordinasikan berbagai pihak, Bidang Respon Strategis berupaya semaksimal mungkin untuk tanggap membantu warga Jakarta, mulai dari menghadirkan tenda-tenda untuk perluasan perawatan Puskesmas dan RS Rujukan hingga mengurai pelayanan pemulasaraan yang sempat terhambat.

Selain itu, Bidang Respon Strategis juga aktif melakukan *monitoring* penegakan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, baik melalui penegakan implementasi Pos PPKM Mikro Kewilayahan, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RT-RW, serta penegakan di sektor-sektor usaha.

## Bansos dan KSBB

Pemulihan sosial ekonomi di Jakarta terus diupayakan untuk dapat menangani dampak langsung terhadap masyarakat rentan di masa pandemi. Untuk melindungi masyarakat rentan, pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk BST (Bantuan Sosial Tunai) dan KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar).

*BST memberikan dampak langsung terhadap masyarakat rentan yang menerima maupun dampak tidak langsung dari hasil pembelian/pembayaran kebutuhan.*

### BST (Bantuan Sosial Tunai)

BST adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk uang tunai, berbeda dengan tahun sebelumnya yang berbentuk pangan. Penyaluran BST dilakukan selama bulan Januari hingga Mei dan bantuan pangan diberikan pada bulan Juni. Jakarta memberikan bantuan kepada satu juta penerima dengan tiap orang menerima sebesar Rp300.000. BST memberikan dampak langsung terhadap masyarakat rentan yang menerima maupun dampak tidak langsung dari hasil pembelian/pembayaran kebutuhan. Sebagai contoh, pedagang yang dibeli sembakonya oleh penerima bantuan.

Tantangan dalam program BST adalah persiapan untuk penyalurannya perlu melewati diskusi panjang di internal Pemprov DKI dan pihak yang terlibat. Penyaluran BST dilakukan bertahap dan akan diberikan notifikasi untuk informasi terkait waktu pencairan. Publikasi terkait BST rutin dipublikasikan baik melalui *press release* ataupun FAQ terkait proses pencairan. Persyaratan administrasi bank menjadi kendala mengingat uang tunai perlu di-*transfer* ke rekening penerima. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama dengan Disdik dan bank untuk para penerima dapat mendaftarkan rekening secara kolektif di sekolah-sekolah.



Foto 5: Warga Penerima BST | Sumber: Berita Jakarta

### Agenda ke Depan & Strategi Pencapaiannya

- Persiapan dan pemutakhiran data setiap bulan untuk menetapkan masyarakat yang masih tergolong rentan dan menjadi penerima BST. Data menjadi hal yang penting untuk dapat mengetahui ketepatan sasaran penerima BST.
- Menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Sosial mengingat BST merupakan keberjalanan BST disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat.

### Lessons Learned/Hikmah Pembelajaran 2021

- Perlunya dipersiapkan bagaimana strategi komunikasi kepada publik serta kemutakhiran, sekaligus integrasi data mengingat terdapat dua jenis BST, dari Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Kemungkinan adanya perbedaan waktu pencairan akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
- Selalu *update* dengan informasi terkait BST yang sifatnya dinamis sehingga tahu perkembangan berita di internal dan eksternal.

### KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar)

KSBB adalah suatu inisiatif yang berupa *platform* sebagai wadah untuk *co-creator* berkolaborasi dengan kota melalui berbagi sumber daya, tidak selalu dalam bentuk donasi barang. Sumber daya di masyarakat dapat dikelola, siapa yang tertarik untuk memberikan dan mengeluarkan sesuai dengan visi kota. Walaupun memiliki kesamaan dalam bentuk pemberian bantuan, KSBB tidak menggantikan BST mengingat adanya perbedaan dalam target masyarakat yang menerima bantuan. Berbagai macam bentuk KSBB yang sudah berjalan sampai saat ini antara lain KSBB UMKM, KSBB Pangan, KSBB Pendidikan, dan KSBB Ketenagakerjaan. Pada tahun 2021, inisiatif utama dari program KSBB berfokus pada KSBB Permukiman dan Persampahan.

KSBB Permukiman dilakukan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan rumah yang layak huni. KSBB permukiman berhasil meluncurkan program Kampung Asuh dengan ~25.000 warga yang terbantu. Bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan menyediakan 1 unit IPAL, 10 unit tempat sampah, 20m<sup>2</sup> penghijauan vertikal, 30 unit alat di TPS, 1 gapura, dan 1 MCK komunal.

Untuk dapat mengatasi persoalan pengelolaan sampah, KSBB persampahan dilaksanakan dengan bantuan berupa sarana persampahan, pendampingan, dan pengolahan sampah. Sebanyak 99 RW dan bank sampah telah terbantu dengan hadirnya program KSBB ini.

Program KSBB dikelola oleh JDCN mulai dari perumusan konsep, perjanjian kerja sama dengan *co-creator*, dan inisiasi penggunaan *IT system*. Sedangkan, Biro KSD terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis, seperti administrasi, publikasi, dan juga mengikutsertakan *co-creator*. Kepemilikan OPD akan KSBB menjadi penting untuk dapat mencapai keberhasilan program. Mengingat inisiatif program berasal dari TGUPP, kepemilikan program KSBB oleh OPD perlu diperkuat agar kolaborasi yang telah berlangsung saat ini tidak hanya sekedar jargon, tetapi dapat diimplementasikan untuk dapat memberikan dampak kepada masyarakat.





Banyaknya pihak yang terlibat dalam KSBB sehingga komunikasi kepada para kolaborator dan penerima manfaat dilakukan setiap adanya KSBB baru yang diluncurkan. Setelah program selesai dilakukan, laporan pertanggungjawaban disusun untuk menyampaikan hasil kolaborasi dan berapa banyak penerima manfaat dari KSBB.

TGUPP berperan dalam merumuskan regulasi, merencanakan dan mempersiapkan program, menerima aspirasi dari warga, serta menjembatani inisiasi-inisiasi yang bersifat birokratis dan non birokratis. Edukasi juga diberikan untuk meningkatkan *ownership* OPD terhadap program-program yang dilakukan, seperti membantu dalam penyusunan *guide* dan *brainstorm* konsep.

### Agenda ke Depan & Strategi Pencapaiannya

- Menempatkan kepemilikan dan kapabilitas OPD untuk berkolaborasi melalui edukasi dan diklat rutin dan merevisi Pergub JDCN untuk penetapan individu yang diandalkan.
- Platform kolaborasi dibentuk sebagai wadah untuk mempertemukan *stakeholder* dan masyarakat yang memiliki visi yang sama dan berinovasi.
- KSBB seni yang sedang digarap di tahun 2021 akan dikembangkan agar dapat menyediakan ruang bagi para seniman dan pelaku kreatif untuk bisa mengekspresikan seni.

*Sumber daya di masyarakat dapat dikelola, siapa yang tertarik untuk memberikan dan mengeluarkan sesuai dengan visi kota.*

## Banjir Ibu Kota

*Sigap, tanggap, dan galang!*

Secara geografis, DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang berada di antara hulu sungai dan pesisir. Kota ini menjadi satu-satunya kota di dunia yang dialiri dan menjadi hilir dari 13 sungai<sup>1</sup>. Kondisi ini membuat Jakarta mendapatkan 3 potensi bencana banjir yaitu, Banjir Kiriman dari Hulu, Banjir Lokal, dan Banjir dari Pasang Air Laut. Potensi banjir kiriman dari Hulu yaitu wilayah Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi semakin meningkat disebabkan dua faktor yaitu intensitas curah hujan yang semakin ekstrim dan perubahan guna lahan di area hulu. Sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk pengendalian banjir, dengan pendekatan Pencegahan - Kesiapsiagaan - Respon - Pemulihan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir pada musim hujan.

*Di tahun 2021, Jakarta menyelesaikan pembangunan Waduk Cimanggis dan Waduk KP. Rambutan yang sangat bermanfaat pada pengendalian debit banjir di Kali Cipinang.*

## Ragam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir bisa dilakukan dengan memadukan prinsip naturalisasi dan normalisasi. Naturalisasi di hulu Jakarta dengan menahan air sedangkan prinsip normalisasi, mengalirkan air secepatnya ke laut diterapkan di hilir Jakarta dengan pemompaan, kanalisasi, dan tanggul pantai. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam aksi ragam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.

Di tahun 2021, Jakarta menyelesaikan pembangunan Waduk Cimanggis dan Waduk KP. Rambutan yang sangat bermanfaat pada pengendalian debit banjir di Kali Cipinang. Selain pembangunan waduk, di tahun 2021, Jakarta membangun Sumur Resapan atau Drainase Vertikal untuk mengendalikan debit air hujan. Tercatat, 24.900 titik sumur resapan yang terdiri dari beberapa tipe, buis beton, modular, dan kolam resapan terbangun di Jakarta. Drainase vertikal yang sudah dibangun diharapkan mampu mengendalikan debit air hujan hingga 70.000 m<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> <https://www.tataruang.id/2016/05/01/anugerah-13-aliran-kali-dan-konsistensi-penataan-yang-terus-ditagih/>



**Foto 6: Waduk Kampung Rambutan** | Sumber: Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta

Pembangunan Drainase Vertikal merupakan bagian dari Program '942-DV Projects' yang menjadi kegiatan super prioritas Jakarta melalui pembangunan 9 Polder, 4 Waduk, Penataan 2 Sungai dan Drainase Vertikal (DV). Tahun 2021 Jakarta sudah menuntaskan pembangunan Sumur Resapan dan penandatanganan kontrak pekerjaan 9 Polder, 4 Waduk, dan 2 Penataan Sungai yang akan dilanjutkan pekerjaannya hingga tahun 2022 dengan kontrak tahun jamak. Di antaranya Polder Kelapa Gading, Polder Pulomas, Polder Muara Angke, Polder Teluk Gong, Polder Mangga Dua, Polder Green Garden, Polder Marunda JGC, Pompa Tipala-Adhyaksa, dan Polder Kamal. Sistem Polder merupakan upaya penanganan banjir atau rob dengan kelengkapan sarana fisik meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air yang tak terpisahkan.

Menyambung pembangunan polder, proyek naturalisasi sungai melalui pembangunan 4 waduk juga dilakukan di 4 lokasi, yaitu Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, Waduk Pondok Rangun dan Waduk Wirajasa. Sedangkan angka 2 pada '942-DV Projects' ditujukan untuk pembangunan Prasarana dan sarana air di 2 lokasi kali, yaitu sodetan Muara Bahari-Kali Besar dan Kali Ciliwung Pasar Baru. Sementara itu, untuk pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, Jakarta melakukan upaya Grebek Lumpur di tahun 2021 yaitu pengerukan pada infrastruktur pengendali banjir seperti Saluran, Sungai, dan Waduk di Jakarta. Tercatat sudah 33 Waduk dikeruk, 56 Sungai dikeruk, dan 291 saluran dikeruk dengan total volume sedimentasi yang dikeruk mencapai 1 juta m<sup>3</sup>.

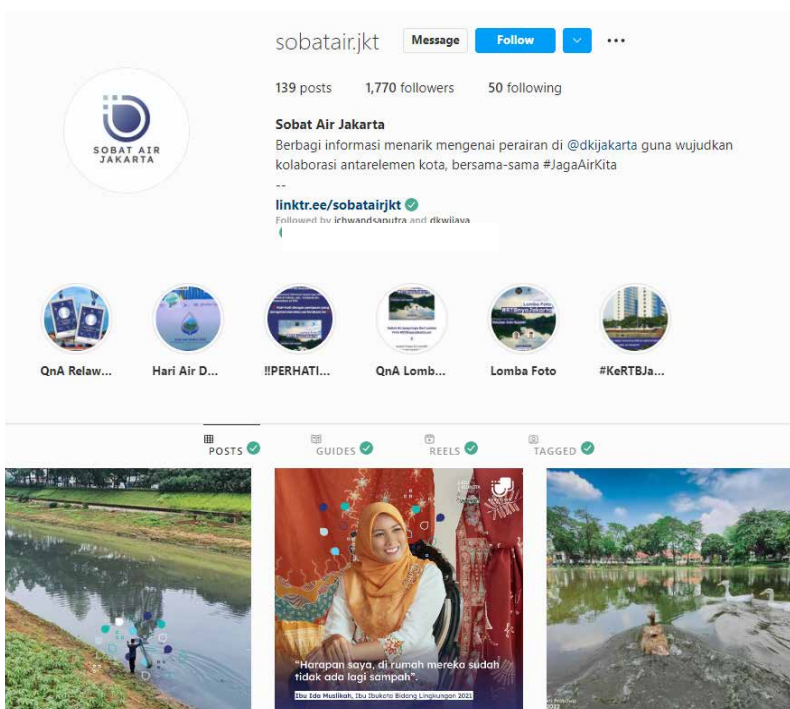


*Dalam penanganan bencana banjir, 'Prinsip Siaga, Tanggap, dan Galang' menjadi implementasi dari konsep mitigasi kebencanaan yaitu Pencegahan, Kesiapsiagaan, Respon, dan Pemulihan.*

### Penguatan Komunikasi Publik

Selain upaya pencegahan banjir melalui peningkatan infrastruktur pengendali banjir, Jakarta juga menyiapkan penanganan bencana banjir melalui penguatan komunikasi ke masyarakat. Dalam penanganan bencana banjir, 'Prinsip Siaga, Tanggap, dan Galang' menjadi implementasi dari konsep mitigasi kebencanaan yaitu Pencegahan, Kesiapsiagaan, Respon, dan Pemulihan. Prinsip ini diimplementasikan salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, tercatat lebih dari 20 lembaga ikut membantu penanganan banjir di tahun 2021 seperti Palang Merah Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Pertamina, dan lain-lain.

Kini juga hadir komunitas Sobat Air Jakarta sebagai wujud wadah komunikasi masyarakat untuk membahas isu air di *Instagram*. Dengan pendekatan komunitas dan partisipasi dari masyarakat, serta penyajian yang ringan dan informatif, harapannya Sobat Air Jakarta dapat menghadirkan sensitivitas masyarakat pada isu air di Jakarta, termasuk banjir. Sehingga, isu banjir bisa menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat di Jakarta.



Gambar 2: Sobat Air Jakarta | Sumber: Instagram @sobatairjkt





**Tanggap  
dan galang  
ketika musim  
penghujan tiba,  
Bidang Respon  
Strategis ikut  
memonitor  
ketat rumah  
pompa air  
dan pompa  
air berfungsi  
dan dijalankan  
sesuai  
kewaspadaan.**

### Potret Keberhasilan

Menelisik perbandingan banjir di 2020 dan 2021, Secara keseluruhan, BPBD DKI Jakarta menyebutkan penurunan dari banjir pada 2020 dengan banjir pada 2021<sup>2</sup>. Kedua tahun memiliki curah hujan yang sama-sama termasuk dalam klasifikasi curah hujan ekstrem (lebih dari 150 mm/hari). Perbedaan dapat mulai kita lihat dengan adanya penurunan pada jumlah RW yang tergenang. Pada 2020 sebanyak 390 RW yang tergenang banjir, sedangkan pada 2021 sebanyak 113 RW. Berikutnya, jumlah pengungsi juga berkurang. Pada 2020 sebanyak 36.445 jiwa yang mengungsi, sedangkan pada 2021 ada 3.311 jiwa yang mengungsi akibat banjir. Lalu, jumlah lokasi pengungsian menurun pula. Pada 2020 terdapat 269 lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah, sedangkan pada 2021 terdapat 44 lokasi pengungsian. Terakhir, waktu surut genangan air pun terjadi penurunan. Pada 2020 genangan air surut paling lama empat hari, sedangkan pada 2021 genangan air surut hanya dalam waktu sehari.

TGUPP melalui Bidang Respon Strategis aktif dalam upaya pengendalian hingga penanganan banjir di Jakarta. Menjadi penjembaran, Bidang Respon Strategis turut serta dalam proses mediasi ketika terjadi permasalahan dalam pembebasan lahan untuk ragam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Tanggap dan galang ketika musim penghujan tiba, Bidang Respon Strategis ikut memonitor ketat rumah pompa air dan pompa air berfungsi dan dijalankan sesuai kewaspadaan. Selain itu, juga hadir langsung di titik-titik banjir untuk memastikan penanganan segera dilakukan demi keselamatan warga Jakarta.

<sup>2</sup> <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/651/beberapa-perbedaan-antara-banjir-2020-dan-2021>



## **BAB 3:** Kerjakan, Kolaborasikan, Tuntaskan





### Mewujudkan Kemudahan Akses Transportasi Umum melalui Jak Lingko

Kemudahan dalam mengakses transportasi umum dan mewujudkan perjalanan penumpang yang tanpa hambatan didukung dengan terbentuknya Jak Lingko. Jak Lingko sebagai sistem transportasi terintegrasi baik secara rute/ layanan, manajemen, maupun pembayarannya, tidak hanya melibatkan bus besar, sedang, dan kecil TransJakarta, tetapi juga transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. Tipologi perkotaan Jakarta yang jalannya sempit dan padat menyebabkan kehadiran mikrotrans menjadi salah satu kunci dalam peningkatan jangkauan angkutan umum warga DKI 500 meter dari tempat tinggal warga melalui Jak Lingko. Pada tahun 2021, angkutan umum di Jakarta sudah menjangkau 82% warga, bertambah dua kali lipat sejak tahun 2017 (*PT Transportasi Jakarta*, 2021). Keuntungan menggunakan transportasi umum pun dapat terlihat jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Dengan adanya Jak Lingko, harapannya masyarakat dapat mengakses angkutan umum dengan mudah, memiliki banyak pilihan dalam bermobilitas serta melakukan perencanaan ulang terhadap perjalanannya sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan jarak perjalanan. Walaupun demikian, saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa Jak Lingko hanyalah dalam bentuk angkot atau kartu untuk pembayaran. Untuk mempertegas posisi Jak Lingko, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2021 yang menjelaskan definisi dan mekanisme Jak Lingko, termasuk keterlibatan BUMD dan pihak swasta dalam proses integrasi angkutan umum di Jakarta. Pada tahun 2021, salah satu bentuk integrasi adalah mengintegrasikan layanan bus Koantas Bima ke dalam layanan TransJakarta.



Foto 7: Integrasi layanan Koantas Bima ke dalam layanan TransJakarta

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

*Tipologi perkotaan Jakarta yang jalannya sempit dan padat menyebabkan kehadiran mikrotrans menjadi salah satu kunci dalam peningkatan jangkauan angkutan umum warga DKI 500 meter dari tempat tinggal warga melalui Jak Lingko.*



Foto 8: Halte Cakra Selaras Wahana | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Pembangunan infrastruktur dilakukan guna memfasilitasi masyarakat untuk dapat berpindah secara mudah sekaligus meningkatkan nilai estetika pada kota. Salah satu contohnya adalah pembangunan, renovasi serta penataan stasiun.

Penataan stasiun dilakukan pada Stasiun Tebet, Palmerah, Gondangdia, Manggarai, dan Jakarta Kota sepanjang tahun 2021. Penyediaan tempat yang layak bagi UMKM juga dilakukan sehingga tujuan untuk penataan dapat terealisasi tanpa perlu mengusir pelaku UMKM yang telah ada sebelumnya. Tidak hanya fokus pada konektivitas dan integrasi, penataan stasiun juga didorong untuk dapat menjadi ruang ketiga sebagai ruang interaksi bagi semua. Penataan ini juga didukung dengan pengembangan sistem uji coba aplikasi yang mengintegrasikan sistem informasi yang bernama Jak Lingko Indonesia dan pembayaran dengan menggunakan QR Code yang diluncurkan pada saat penataan stasiun Tebet dan Palmerah.

Peluncuran aplikasi Jak Lingko yang akan menjadi aplikasi utama bagi para penumpang pengguna transportasi umum akan dilaksanakan pada 2022. Kedepannya aplikasi Jak Lingko ini dapat melayani seluruh mobilitas atau *mobility as a service*. Namun, aplikasi Jak Lingko ini belum berjalan optimal karena perlunya kesepakatan dari masing-masing penyedia jasa moda transportasi. Mengorkestrasikan BUMD dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dari segi integrasi manajemen menjadi salah satu hal yang menantang mengingat dalam pelaksanaan tidak lepas dari ego masing-masing institusi.

Selain penataan stasiun, pembangunan Cakra Selaras Wahana juga menjadi perhatian utama dalam integrasi antara MRT dengan BRT di tahun 2021. Desain yang disusun dengan nilai kolaboratif menjadikan CSW sebagai ruang ketiga bagi warga. Selain digunakan untuk berpindah antar moda, CSW juga digunakan sebagai lokasi untuk pelaksanaan acara dan tempat bertemunya antar warga.



CSW juga dilengkapi dengan penunjuk arah yang mendukung integrasi informasi di dalam lingkup Jak Lingko. Pada tahun 2021, sistem penunjuk arah di Jakarta telah memiliki panduan umum agar dapat menjadi standar dan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat di ruang publik, mulai dari stasiun/ halte hingga trotoar. Panduan sistem penunjuk arah ini disusun secara kolaboratif bersama *Institute for Transportation and Development Policy Indonesia* dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta.

Ke depannya, akan difokuskan pada peningkatan layanan Mikrotrans untuk memperluas cakupan layanan transportasi publik di Jakarta termasuk memulai layanan Mikrotrans yang dilengkapi dengan AC untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Selain itu, tarif antar moda Jak Lingko akan mulai diintegrasikan pada tahun 2022.

Selain layanan mikrotrans, juga terdapat transportasi publik lainnya seperti MRT. MRT Jakarta telah beroperasi sepanjang 16 km dengan total 13 stasiun. Terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan penyesuaian kebijakan dengan aturan PPKM sehingga keterisian penumpang pun menjadi terdampak dan kendala dalam pengoperasian MRT dan LRT di tahun 2021.

Walaupun demikian, pembangunan MRT fase selanjutnya tetap dilakukan, mulai dari fase 2A, 2B, 3, dan 4. Beberapa isu pun ditemukan dari pembangunan fisik seperti perlunya memindahkan secara sementara halte TransJakarta yang dilalui jalur pembangunan MRT. Isu terkait pintu masuk stasiun MRT di Monas juga menjadi kendala mengingat posisinya yang berlokasi di Medan Merdeka Utara sehingga akses menuju Istana Negara pun menjadi lebih mudah. Diskusi pun dilakukan antara Pemprov Jakarta dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk mencari solusi bagi persoalan ini.

*Pada tahun 2021, sistem penunjuk arah di Jakarta telah memiliki panduan umum agar dapat menjadi standar dan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat di ruang publik.*



Foto 9: MRT Jakarta | Sumber: Pemprov DKI Jakarta



Terlepas dari isu-isu tersebut di atas, hal menarik juga ditemukan selama keberjalanan pembangunan fisik MRT pada tahun 2021 ini. Hal menarik tersebut adalah penemuan arkeologis berupa rel ex-tram Belanda di kawasan Kota. Terkait penemuan ini, Gubernur memberikan gagasan agar artefak rel tram tersebut tidak dipindahkan dan dapat dijadikan atraksi cagar budaya.


Serupa seperti MRT, keterisian penumpang LRT pun juga terpengaruh dengan merebaknya pandemi Covid-19 dengan subsidi yang terbilang tinggi. Oleh karena itu, perlu dicari sumber pembiayaan alternatif yang lebih kreatif, sehingga dapat menjadi solusi dalam permasalahan terkait pembiayaan yang tidak hanya berlaku untuk sistem LRT yang telah beroperasi saat ini, tetapi juga untuk pengembangan dan pembangunan jaringan LRT ke depannya.

Terlepas dari permasalahan di atas, pembangunan jaringan LRT Rajawali Kemayoran yang melalui rute Kemayoran - JIS (*Jakarta International Stadium*) - Kelapa Gading - Velodrome - Klender - Halim mulai direncanakan. Pembangunan ini diharapkan dapat menghidupkan sumber-sumber ekonomi baru di timur Jakarta dengan angkutan massal berbasis rel. Pemilihan lokasi stasiun pun mempertimbangkan kehadiran layanan yang terintegrasi dengan moda lainnya, seperti penentuan lokasi di Halim yang ditujukan untuk dapat berintegrasi dengan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kedepannya.

Jak Lingko melibatkan banyak pihak mulai dari internal pemerintah provinsi, BUMD, pemerintah pusat, hingga swasta. Peran TGUPP dalam menjembatani hal-hal terkait Jak Lingko dapat terlihat dari pembentukan *joint venture* dengan PT KAI serta menyatukan Kementerian Perhubungan dan BUMN dalam kegiatan penataan stasiun sehingga bisa mencari kesamaan visi dari berbagai pihak. Dengan begitu, ego sektoral pun bisa dipatahkan. TGUPP juga memiliki peran hingga level teknis seperti gagasan terkait Jak Lingko dan pengawalan terhadap desain MRT. Untuk dapat memastikan ketercapaian target, TGUPP berperan dalam proses *monitoring* dengan menggagas sistem dokumen "Format 8 Kolom (F8K)" yang menjadi instrumen utama dalam mengawal pemenuhan target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, TGUPP juga mengunci target *Key Performance Indicator* (KPI) BUMD sebagai acuan dalam guna memastikan ketercapaian target bisnis yang ada. Lebih dari itu, TGUPP juga mengakomodasi dan menerima aspirasi masyarakat yang kemudian diterjemahkan dalam memunculkan gagasan dan upaya *debottlenecking* pada tiap proyek.



Di tahun 2021, terdapat kolaborasi menarik antara Jakarta dengan *C40 Cities*, sebuah jaringan walikota dunia dalam acara *the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26)* dimana Gubernur sebagai *vice-chair C40* untuk *sustainable transport* menjadi perwakilan C40 dalam event peluncuran *statement* terkait *"Governments also need to increase public transit use."* Gubernur juga menjadi pembicara di dalam *TED talk* tentang *public transport* sebagai perwakilan C40. Kegiatan ini juga dibantu dijembatani oleh TGUPP.



Terdapat dua pembelajaran yang dapat diambil dari proses yang terjadi di 2021. Pertama, tantangan terhadap penetapan tarif yang masih dianggap sebagai konsekuensi politik bagi kepala daerah yang menjabat. Sebagai contoh, bus TransJakarta yang telah beroperasi sejak tahun 2004 belum pernah menaikkan tarif. Padahal sebenarnya, penetapan harga ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman di masa sekarang. Oleh karena itu, belajar dari skema tarif listrik yang ditetapkan oleh PLN. Perlu disusun *price automatic adjustment* bagi moda transportasi yang kemudian bisa dikunci dalam bentuk peraturan daerah sehingga tarif yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Kedua, mundurnya keberjalanan pembangunan CSW menjadi salah satu pembelajaran yang dapat diambil. Peran direksi sangat penting untuk bisa merespon secara cepat dan tepat terkait proses bisnis BUMD. Persoalan teknis dan pengetahuan dasar terkait konstruksi dibutuhkan sehingga SDM yang ada harus segera melakukan penyesuaian dengan kebutuhan penugasan oleh kepala daerah.

Kedua hal di atas dapat menjadi pelajaran dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kedepannya.

*Untuk dapat memastikan ketercapaian target, TGUPP berperan dalam proses monitoring dengan menggagas sistem dokumen "Format 8 Kolom (F8K)" yang menjadi instrumen utama dalam mengawal pemenuhan target yang telah ditentukan sebelumnya.*

## Mewujudkan Pengalaman Bermobilitas Aktif yang Lebih Baik di Jakarta

Sepeda kembali menjadi moda yang digemari oleh masyarakat setelah munculnya pandemi pada tahun 2020. Sebagai moda yang aman dan mendukung bermobilitas dengan tetap menjaga jarak aman, pesepeda di Jakarta pun meningkat. Perubahan jalur sepeda yang bersifat *pop-up* menjadi permanen sepanjang 13 km di ruas jalan Sudirman - Thamrin pun menjadi salah satu program utama di tahun 2021 agar pesepeda, yang merupakan salah satu pengguna ruang jalan yang paling rawan di antara kendaraan bermotor, dapat bersepeda secara aman. Adanya jalur sepeda terproteksi juga membuat waktu tempuh pesepeda menjadi lebih singkat.

Selain jalur sepeda, beberapa infrastruktur penunjang lain pun dibangun untuk dapat memfasilitasi pesepeda, seperti perencanaan *bike lounge*, uji coba *bike sharing*, serta pembangunan jembatan penyeberangan sepeda. Dalam keberjalanannya, konstruksi jalur sepeda dan infrastruktur pendukungnya memakan waktu yang cukup lama. Tantangan pun juga dirasakan dengan melihat penerimaan keberadaan jalur sepeda oleh masyarakat yang sangat beragam. Beberapa pihak memberikan kritik, namun tidak sedikit juga yang berterima kasih dengan adanya fasilitas tersebut. Selain itu, adanya pemotongan anggaran untuk kebutuhan yang fokus kepada penanganan Covid-19 menyebabkan tidak tercapainya rencana penyelesaian pembangunan jalur sepeda sepanjang 100 km. Beberapa hal yang belum terjadi di tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada tahun setelahnya, seperti perluasan 195 km jalur sepeda terproteksi dan pembangunan *Bike Lounge* yang telah direncanakan sejak tahun 2021.



Foto 10: Jalur sepeda terproteksi | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

*Beberapa infrastruktur penunjang lain dibangun untuk dapat memfasilitasi pesepeda, seperti perencanaan bike lounge, uji coba bike sharing, serta pembangunan jembatan penyeberangan sepeda.*





Foto 11: Fasilitas bike sharing | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Uji coba bike sharing dengan total 63 sepeda diberlakukan di Jakarta untuk dapat memfasilitasi warga untuk berpindah jarak dekat, dari dan menuju stasiun/halte.


Uji coba *bike sharing* dengan total 63 sepeda diberlakukan di Jakarta untuk dapat memfasilitasi warga untuk berpindah jarak dekat, dari dan menuju stasiun/halte. Bagi yang membawa sepeda dari rumah pun juga dapat menitipkan sepedanya di ~60 halte TJ yang telah menyediakan *bike rack*. Namun kenyataannya, *bike sharing* hanya digunakan pada momen-momen tertentu, contohnya sebagai salah satu opsi rekreasi di hari Sabtu dan Minggu. Penggunaan *bike sharing* yang masih belum sesuai dengan peruntukan awal, yaitu sebagai *first mile last mile*, memberikan dampak terhadap kondisi bisnis perusahaan yang menjadi operator. Kedepannya, akan dilakukan kerjasama dengan operator lainnya dalam penyediaan fasilitas *bike sharing* agar dapat memperluas cakupan layanan dan penambahan pengguna.

Mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi kendaraan bermotor juga dilakukan dengan menggunakan dua kebijakan, yaitu *Park and Ride* dan *Electronic Road Pricing* (ERP). *Park and Ride* merupakan suatu lokasi yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan milik pribadi di lokasi yang dekat dengan stasiun/halte serta menghambat masyarakat untuk parkir kendaraan pribadi di pusat kota. Salah satu lokasi *park and ride* yang telah dibangun di tahun 2021 adalah Lebak Bulus. Adanya pandemi memberikan dampak terhadap pendapatan Unit Pengelola Parkir Dishub sehingga tidak ada dana untuk membangun lokasi *park and ride* yang direncanakan di Kalideres dan Pulogadung. Selain berbentuk lokasi *park and ride*, kebijakan terhadap parkir juga dilakukan melalui sebuah aplikasi pemesanan parkir ruas jalan di Jakarta yang disebut JakParkir dan telah dilakukan uji coba pada tahun 2021 di enam ruas jalan. Kedepannya, kenaikan tarif parkir juga akan diberlakukan sebagai bagian dari kebijakan *push policy* untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi pindah ke kendaraan umum dan JakParkir meluas tidak hanya di 6 lokasi.





Untuk ERP, telah dilakukan finalisasi konsep dan skema agar dapat segera diimplementasikan mengingat selama dua tahun terakhir fokus untuk menyelesaikan permasalahan dengan pembatalan lelang. Kegiatan *Focus Group Discussion* dilakukan ke eksternal untuk melihat persepsi dan kemampuan publik untuk membayar ERP serta ke internal bersama para pakar kebijakan publik, properti, dan tata ruang.



Melihat banyaknya tantangan yang terjadi dalam mendorong mobilitas aktif dan memindahkan penumpang dari mobil pribadi ke transportasi umum, tentunya terdapat peran TGUPP untuk berupaya menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Mulai dari merumuskan regulasi, *debottlenecking* hingga *quality control* untuk memastikan program-program yang dijalankan dapat dihasilkan dan disampaikan dengan baik. TGUPP juga berperan dalam menerjemahkan gagasan besar gubernur ke dalam program teknis, seperti pembangunan jalur sepeda permanen, pembangunan *bike rack* di halte TJ, dan pelaksanaan uji coba *bike sharing* di Jakarta.

Di tahun 2021, terdapat kolaborasi menarik antara Jakarta dengan Mexico City dan COP26 dalam kampanye bersepeda dan mobilitas aktif yang dijembatani oleh TGUPP. Kolaborasi tersebut memuat konten bagaimana bersepeda di Jakarta dan Mexico serta perbandingannya.

Tahun 2021 memberikan banyak pembelajaran, seperti dalam proses *delivery* program. Masih dibutuhkan peran lembaga atau institusi yang melakukan *debottlenecking* dan mampu menjembatani berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) sehingga dapat menyenangkan sebanyak mungkin orang.

Selain itu, nyatanya pandemi tidak menjadi halangan dalam mengakselerasi pembangunan. Pelibatan komunitas dilakukan serta mencari alternatif pendanaan lain sebagai kunci dalam melanjutkan hal-hal yang telah berjalan, walaupun alokasi anggaran banyak yang direlokasi untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Pengurangan emisi terus digencarkan dengan upaya *push and pull policy* pada sistem parkir, yang khususnya dilewati oleh angkutan umum massal.

Selain berbentuk lokasi park and ride, kebijakan terhadap parkir juga dilakukan melalui aplikasi JakParkir dan telah dilakukan uji coba pada tahun 2021 di enam ruas jalan.



## RPJMD

*Menerjemahkan, memastikan pemenuhan pertanggung jawaban kita akan kota.*

### Menilik RPJMD

Sebagai penggambaran sederhana, menjadi penting bagi sebuah kota untuk memiliki visi besar akan strategi kemajuan kota maupun warganya. Pada konteks Jakarta, hal tersebut, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali, dengan turunan Rencana Kerja Per Daerah (RKPD) per tahun. Perumusannya, hasil tabulasi arah besar maupun janji politik kepemimpinan Gubernur.

Keberadaan RPJMD sendiri menjadi suatu dasar rencana kerja bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) guna mempersiapkan rencana kerja ke depan. Lebih dari itu, ini juga menjadi suatu arah bagi keperluan anggaran kota. Agar dapat selaras dengan visi Gubernur, TGUPP hadir untuk menerjemahkan, merumuskan, sekaligus memastikan percepatan akan pelaksanaannya dalam birokrasi pemerintahan. Bentuknya, tercermin dalam *monitoring* program. Sehingga, pada akhir masa jabatan, melalui keterlibatan TGUPP, dapat tercapai ragam program yang sudah disusun dan mampu disampaikan pihak eksekutif kepada legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kota.



*Bentuknya, tercermin dalam monitoring program. Sehingga, pada akhir masa jabatan, melalui keterlibatan TGUPP, dapat tercapai ragam program yang sudah disusun dan mampu disampaikan pihak eksekutif kepada legislatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kota.*

**Revisi 2021: Kepentingan Masyarakat**

Berkaca pada tahun 2020 (3 tahun masa pemerintahan), arah besar RPJMD yang semula disusun sejak 2017 pun dinilai perlu mendapat penyesuaian. Sebab, kondisi pandemi mendorong adanya perubahan besar akan fokus pemerintah pada kesehatan. Lebih dari itu, perubahan besar ini dibutuhkan guna melakukan penyesuaian akan arah ke depan Jakarta yang lebih baik. Berbagai perubahan tersebut, misalnya, tercermin dalam rencana pembangunan *Jakarta International Stadium* (JIS), simpul transportasi Cakra Selaras Wahana (CSW), dan lain-lain, yang tertunda dengan dasar perlunya penyesuaian tujuan pemenuhan jaring pengaman sosial (bantuan sosial) kepada masyarakat. Tidak hanya itu, anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) saat ini mencapai Rp5T, yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angka pada masa sebelum pandemi yang hanya dipersiapkan Rp187M.

Per Februari 2021, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan *draft* akhir RPJMD perubahan sebagai dasar baru ke depan dan sedang menunggu pembahasan dengan DPRD.

**Potret keberhasilan**

Sampai pada tahun 2022, ragam potret yang dapat diambil dari RPJMD pun beragam. Misalnya, pencapaian jumlah UMKM hingga lebih dari 250.000, keberhasilan pembangunan JIS, CSW, dan juga ragam infrastruktur lainnya. Hal ini, memberi suatu kesimpulan akan pencapaian usaha kota dengan berbagai pihak di dalamnya.



*Lebih dari itu, perubahan besar ini dibutuhkan guna melakukan penyesuaian akan arah ke depan Jakarta yang lebih baik. Hingga ragam potret yang dapat diambil dari RPJMD pun beragam.*



## Inovasi Jakarta dalam Mendukung Capaian PAD

PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 18 UU No. 33 Tahun 2004). Pada bagian ini, hal-hal yang menjadi bagian dalam pembahasan antara lain capaian pendapatan pajak di tahun 2021, inovasi transformasi digital pajak, aset DKI, dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

*Salah satu insentif perpajakan sebagai dasar diambil oleh pemerintah untuk mendorong keadilan bagi seluruh warga diberikan melalui keringanan PBB.*

### Capaian Pajak Tahun 2021.

Untuk capaian pajak di tahun 2021, target awal pencapaian pajak diambil berdasarkan realisasi pajak di tahun 2020 yang mencapai Rp31,9T. Melihat pencapaian tersebut, target pendapatan pajak di tahun 2021 pun ditetapkan dalam APBD sebesar Rp43,37T (setara dengan peningkatan Rp11T atau peningkatan 36%), dengan asumsi adanya peningkatan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan kesepakatan dalam APBD-P, disepakati target pajak DKI Jakarta menjadi Rp37T mengingat tiga tahun sebelumnya, rata-rata peningkatan capaian pajak hanya 7-8% saja. Upaya yang dilakukan mengejar target tersebut adalah memberikan insentif fiskal bagi Wajib Pajak (WP) melalui Pergub 60 tahun 2021 (Agustus dan September) sebagai dampak dari berlakunya PPKM dan melalui Pergub 104 tahun 2021 (Desember).

Insentif PBB yang menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong keadilan bagi seluruh warga melalui Peraturan Gubernur no 104 tahun 2021 sebagai dampak dari adanya pandemi.

Salah satu Insentif perpajakan sebagai dasar kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong keadilan bagi seluruh warga diberikan melalui keringanan PBB. Berdasarkan Pergub no 104 tahun 2021, dalam rangka memberikan keringanan sebagai dampak dari pandemi, WP dapat melakukan angsuran PBB dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh WP khususnya warga terdampak pandemi, Pemerintah DKI Jakarta tetap melanjutkan pemberian insentif berupa tidak adanya kenaikan PBB dari tahun sebelumnya. Kebijakan insentif lain yang tetap berlaku juga berupa pembebasan PBB bagi veteran dan pensiunan serta kepemilikan rumah dengan NJOP < 1 Miliar.

Stimulus yang diberikan ini tentunya mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang *fair* bagi seluruh warga di tengah krisis dan pandemi yang melanda ibukota.



### Transformasi Digital Pajak.

Beberapa inovasi dalam hal transformasi pajak dilakukan selama kurun waktu setahun ini. Tiga hal yang menjadi inisiatif utama, yaitu elektronifikasi pajak, peta sensus pajak, dan integrasi pelayanan pada JAKI.

Elektronifikasi pajak merupakan upaya pemerintah provinsi dalam rangka melakukan pengecekan dan pemutakhiran pendataan terkini dari WP hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan setidaknya 80% WP atau setara dengan 12 ribu WP yang terelektronifikasi. Angka realisasi menunjukkan masih 60% WP yang berhasil dilakukan pemasangan elektronifikasi. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian WP yang usahanya tutup secara sementara maupun permanen.

Untuk perbaikan di tahun 2021, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki pola pemasangan alat elektronifikasi agar lebih efektif dan efisien dalam *monitoring* transaksi perpajakan.

Namun, elektronifikasi pajak baru terealisasi 60% saja. Pergerakan elektronifikasi mengalami penyesuaian akibat banyaknya WP yang tutup sementara maupun permanen sehingga masih dilakukan pemutakhiran data. Proses pemasangan alat sedang berjalan, namun tantangannya masih ada WP yang tidak patuh dengan mematikan sistem secara sengaja. Penjajakan model kerja elektronifikasi pajak telah dimulai tahun 2021, perubahan di tahun kedepannya adalah sistem sewa alat dengan pihak ketiga oleh BDKI tidak bisa lagi dimatikan secara sepihak.

Selain itu, juga dibentuk peta Fiskal Kadaster yang digunakan untuk sensus pajak agar dapat dipastikan potensi riil pajak yang bisa diperoleh Jakarta tahun 2021 dan 2022. Pemutakhiran data menggunakan Fiskal Kadaster, peta digital untuk analisis data di lapangan sesuai dengan data pajak. Peta Fiskal Kadaster sudah selesai 100% untuk pemetaan PBB, sedangkan *modelling* untuk pajak lain masih belum terealisasi. Peta Fiskal Kadaster untuk *modelling* pajak lain ditargetkan selesai 100% pada bulan Juni 2022.

Integrasi pelayanan pajak ke dalam JAKI juga mulai didorong untuk memberikan kemudahan akses ke masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan pajak. Integrasi pelayanan pajak ke dalam JAKI akan dimasukkan ke dalam matriks *monitoring* kinerja program.

*Tiga hal yang menjadi inisiatif utama, yaitu elektronifikasi pajak, peta sensus pajak, dan integrasi pelayanan pada JAKI.*







Foto 12: Pemberian penghargaan Jakarta Reward (2021) | Sumber: [bapenda.jakarta.go.id](http://bapenda.jakarta.go.id)



*Lelang aset dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus **perbaikan data terhadap potensi aset-aset Jakarta yang bisa dikerjasamakan.***

### Pengelolaan Aset Jakarta

Beberapa inisiatif terkait aset dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, seperti melakukan lelang aset komersial, pembentukan UPMA (Unit Pelaksana Manajemen Aset) sebagai perbaikan dalam pengelolaan aset, sertifikasi aset, dan penyelesaian aset inbreng. Lelang aset dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus perbaikan data terhadap potensi aset-aset Jakarta yang bisa dikerjasamakan. Akan diterbitkan regulasi turunan dalam bentuk pergub ataupun kepgub untuk UPMA.

### Pemulihan Ekonomi Nasional

Sebagai upaya dalam pencarian sumber pembiayaan baru, pelaksanaan realisasi pencairan PEN di tahun 2021 dilakukan, melanjutkan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya.





### Jakarta Rewards

Pemberian *Jakarta Rewards* ini pertama kali dilakukan bersama dengan Kepala Daerah. Kriteria pemberian penghargaan bagi WP didasari atas perannya dalam membayar tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan serta berperan besar dalam mendukung pendapatan pajak. Melalui *JakRewards* ini diharapkan dapat terus menumbuhkan kontribusi WP lebih lagi kedepannya dalam mendukung pajak dan pembangunan Jakarta.

Melihat banyaknya upaya yang dilakukan Jakarta dalam pendapatan aset daerah, tentunya tidak lepas dari peran TGUPP yang selama ini ikut mengawal dalam keberjalanan prosesnya. TGUPP berperan mulai dari memberi masukan dan rekomendasi terhadap seluruh pendapatan serta menganalisis capaian pendapatan untuk mencapai target capaian yang telah disepakati. Inovasi juga banyak dikembangkan berdasarkan strategi dan langkah yang diusulkan oleh TGUPP untuk dapat meningkatkan pendapatan. Beberapa inovasi yang dilakukan tentunya dalam rangka mendukung pencapaian PAD, termasuk dalam transformasi digital dan pengelolaan aset Jakarta. TGUPP juga ikut berperan dalam *review* kebijakan dan regulasi, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk pencapaian target kedepannya.

Melihat perkembangan penerimaan PAD Jakarta tahun 2021, beberapa hal yang bisa diambil dalam prosesnya adalah perencanaan keuangan harus berbasis data agar tidak *overestimated* dan dapat langsung diprediksikan potensi pencapaian pajaknya. Basis data perlu diambil dari sumber yang valid, seperti dari BI. Selain itu, TGUPP perlu lebih konsisten, aktif, dan inisiatif bersama SKPD untuk mengejar pajak dan membuat banyak inovasi dengan *human resource* yang mencukupi sehingga banyak inisiatif yang dapat dikerjakan. Peran SKPD sangat penting untuk mengambil keputusan yang bijak dalam memfasilitasi WP yang terdampak melalui surat bagi yang membutuhkan keringanan pajak.

*Perencanaan  
keuangan  
harus berbasis  
data agar tidak  
overestimated  
dan dapat  
langsung  
diprediksikan  
potensi  
pencapaian  
pajaknya.*



## **Pendampingan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan Aset Daerah Melalui Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset (PPK BLUD UPMA) pada BPAD Provinsi DKI Jakarta**

*Skor MCP 2021  
90,01% telah  
menempatkan  
Pemprov DKI  
Jakarta pada  
urutan ke 12  
dari 34 Provinsi  
dan 79 dari  
525 Pemda di  
Indonesia*

Pandemi Covid-19 berdampak pada keterbatasan fiskal atau pendapatan daerah. Menyikapi hal ini, Jakarta perlu menemukan jalan untuk peningkatan pendapatan daerah, salah satunya lewat optimalisasi aset di Jakarta. KPK Ibukota dan Bidang Hukum mendorong terwujudnya pembentukan BLUD UPMA untuk optimalisasi pendapatan seperti aset penyewaan tanah, penyewaan titik reklame, dan aset lain yang bisa dimanfaatkan. BLUD UPMA adalah suatu PPK BLUD Pemanfaatan Aset Daerah yang baru pertama kali ada pada Pemda di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta menjadi satu-satunya Pemda dari 525 Pemda yang berinovasi dalam maksimalisasi pendapatan daerah dari pemanfaatan aset daerah melalui penerapan PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) pada Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) BPAD Provinsi DKI Jakarta.

Dari realisasi pendapatan pemanfaatan aset tahun 2021 sebesar Rp 35,4 milyar direncanakan melalui PPK BLUD UPMA pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp 674,5 milyar. Dari target tahun 2022 tersebut, dalam jangka waktu Januari s.d. Februari 2022, potensi pendapatan yang dapat direalisasikan ± Rp 206 milyar.

KPK Ibukota dan Bidang Hukum melakukan pendampingan secara berkelanjutan sejak awal pembahasan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dikelola UPMA hingga penilaian terhadap persyaratan penerapan PPK BLUD UPMA oleh Tim Penilai Pemprov DKI Jakarta melalui 8 (delapan) OPD dan dinyatakan: “Lulus dengan Skor Nilai: 80,31”. Artinya, UPMA dalam pola pengelolaan keuangannya dapat lebih fleksibel sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD beserta perubahannya dan Pergub No. 165 Tahun 2012 Tentang PPK BLUD.

## **Pendampingan dan Monitoring Penilaian KPK RI Atas Capaian Skor MCP (Monitoring Center For Prevention) 2021 Pemprov DKI Jakarta**

Capaian Skor MCP 2021 Pemprov DKI Jakarta sebesar 90,01%. Artinya terdapat peningkatan Skor MCP sebesar 13,78% (90,01 – 76,23) dibandingkan dengan capaian Skor MCP 2020 sebesar 76,23%. Peningkatan juga terjadi pada peringkat (ranking), yaitu dengan Skor MCP 2021 90,01% telah menempatkan Pemprov DKI Jakarta pada urutan ke

12 dari 34 provinsi dan 79 dari 525 Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia sedangkan pada tahun 2020 dengan capaian 76,23% berada pada urutan ke 22 dari 34 Provinsi dan 172 dari 525 Pemda. Provinsi DKI Jakarta juga melakukan lompatan peringkat yang sangat signifikan dari peringkat 172 menjadi 79 atau terdapat peningkatan peringkat sebanyak 93.

**Tabel 1: Perbandingan Capaian MCP Tahun 2020 - 2021**

Area Intervensi Tahun 2021	Indeks Capaian (%)		Perubahan
	2020	2021	
Perencanaan dan Penganggaran APBD	86,8	87,8	+1
Pengadaan Barang dan Jasa	64,7	88,4	+23,7
Perizinan	88,9	100	+11,1
Pengawasan APIP	81,1	99,8	+18,7
Manajemen ASN	63,2	92,5	+29,3
Optimalisasi Pajak Daerah	81,3	78,7	-2,6
Manajemen Aset Daerah	63,6	82,4	+18,8
<b>Capaian Skor</b>	<b>76</b>	<b>90,01</b>	<b>+14,01</b>
<b>Peringkat Provinsi</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>+10</b>

Peningkatan skor dan ranking yang dicapai tersebut juga menempatkan Pemprov DKI Jakarta sebagai 5 besar pemerintah provinsi yang mengalami lompatan peningkatan skor dan ranking yang tinggi antara capaian MCP Tahun 2020 dibanding tahun 2021.

**Tabel 2:****Peningkatan Skor dan Ranking MCP 2020 Banding MCP 2021 Lima Besar Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi	Peningkatan
Kalimantan Timur	28,74
Jawa Timur	17,41
Sulawesi Tengah	16,58
Sulawesi Selatan	14,29
DKI Jakarta	13,78

**Tabel 3:****Peningkatan Ranking MCP 2020 Banding MCP 2021 Lima Besar Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi	Peningkatan
Jawa Timur	18
Sulawesi Selatan	13
Kalimantan Timur	13
Riau	11
DKI Jakarta	10



KPK Ibukota melakukan pendampingan dengan mendorong atensi SKPD terhadap isu ini secara teratur untuk pemenuhan indikator yang diinginkan dalam pencegahan korupsi. Peringatan ini dimaksud juga disertai saran tindakan karena adanya suatu fakta bahwa: Skor MCP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari bulan ke bulan mengalami peningkatan Skor MCP tetapi skornya makin menurun bila dibanding Skor MCP Pemda lain, sehingga peringkatnya baik di tingkat Provinsi maupun seluruh Pemda makin melorot.

Untuk meningkatkan penilaian MCP BPAD, KPK Ibukota mendorong rancangan solusi atas kendala peningkatan nilai MCP, salah satunya pada Indikator Pengelolaan Aset melalui pembentukan *task force* yang mempunyai tugas membantu penyelesaian regulasi pengelolaan BMD. Ke depannya, pengawasan indikator korupsi seperti ini diperlukan keseriusan monitor tata kelola pemerintahan yang lebih teratur untuk pemenuhan indikator agar bisa mencapai hasil yang diinginkan dan mencegah terjadinya korupsi.

### **Pencegahan Potensi Kerugian Keuangan Daerah Terkait Lahan/ Tanah Pemprov DKI Jakarta**

KPK Ibukota telah melakukan pendampingan hukum terhadap pencegahan potensi kerugian keuangan Daerah terkait aset Pemprov DKI Jakarta, di antaranya:

#### **1. Perkara Lahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta**

Perkara TUN atas Lahan DKPKP Provinsi DKI Jakarta di Cengkareng Barat terkait dengan permohonan penerbitan SPPT-P2 NOP dicabut oleh UPRD Cengkareng, karena aset tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. Ahli waris melalui kuasa hukumnya menggugat TUN atas lahan seluas  $\pm 23.000 \text{ m}^2$  atau 2,3 ha. PK MA memenangkan Pemprov DKI Jakarta yang semula di PN TUN Jakarta dimenangkan oleh Ahli waris Haji Muhammad Tinggul (Alm).

Pengawasan KPK Ibukota dan Bidang Hukum dengan menghadiri dan memberikan penjelasan/klarifikasi kepada Majelis Hakim pada saat PN TUN Jakarta memerintahkan Ka. BAPENDA DKI Jakarta melakukan eksekusi untuk menerbitkan NOP dimaksud. Nilai NJOP sekitar lokasi lahan tersebut pada tahun 2021 sebesar  $\pm \text{Rp } 108,629 \text{ milyar}$  (NJOP  $\text{Rp } 4,723 \text{ juta /m}^2$ )

*Indikator  
Pengelolaan  
Aset melalui  
pembentukan  
task force yang  
mempunyai  
tugas  
membantu  
penyelesaian  
regulasi  
pengelolaan  
BMD.*







**2. Kasus Pengadaan Lahan Munjul oleh PSJ**

KPK Ibukota dan Bidang Hukum telah melakukan pengumpulan informasi awal kasus pembelian lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) ± 4,2 Ha di Jalan TPU RT 003 RW 03 Munjul, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan simpulan bahwa terdapat pelanggaran prosedur dan indikasi kerugian keuangan daerah ± Rp 152 milyar (vide: ND No. 038/KPK Ibukota/2021 tg 25 Maret 2021).

**4. Kasus Pengamanan Lahan Pemprov DKI Jakarta Seluas 4.685 m<sup>2</sup> di Jl. Mutiara, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat**

Rekomendasi Pengamanan Tanah Aset Pemprov DKI Jakarta Seluas 4.685 m<sup>2</sup> yang Terletak di Jalan Mutiara, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Lahan dimaksud memiliki nilai berdasarkan NJOP tanah sekitar lokasi sebesar ± Rp 210,8 miliar (Rp 45 juta/m<sup>2</sup>).

**3. Kasus Pengadaan Lahan Pengganti oleh Jakpro**

Kesimpulan hasil rapat dan usulan rekomendasi atas permohonan pencabutan SIPPT No. 1374/-1.711.534 tgl. 5 Juni 2007 an. Prof. Ir. Chaidir A.M. yang dapat merugikan keuangan daerah sebesar ± Rp 24 milyar, apabila Perseroda Jakarta Propertindo (Jakpro) meneruskan pembelian lahan dengan SIPPT No. 1374/-1.711.534 tersebut.

*KPK Ibukota telah melakukan pendampingan hukum terhadap pencegahan potensi kerugian keuangan Daerah terkait aset Pemprov DKI Jakarta.*



## Mempertahankan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 Tahun Berturut-turut

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Inisiatif utama dalam mencapai penghargaan WTP adalah tercapainya target opini WTP selama 4 tahun berturut-turut dan penyelesaian tindak lanjut dari temuan BPK sebesar 100%. Periode BPK dalam mengaudit berjalan selama Maret hingga Juni. Setelah Juni, dilakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilakukan oleh pemprov DKI.

Banyak terjadi penyesuaian akibat pandemi sehingga butuh bukti sebagai pendukung serta dokumentasi yang memadai saat melakukan pemeriksaan. Temuan umumnya banyak terjadi pada pemeriksaan Aset sehingga membutuhkan waktu lebih untuk berdiskusi dan pendampingan dengan SKPD yang berkaitan untuk dapat menyelesaikannya. Dengan masih adanya pandemi Covid-19, Jakarta harus bergerak lebih cepat untuk dapat segera menuntaskan temuan-temuan pada saat pemeriksaan oleh BPK. Walaupun, nyatanya masih ada penyelesaian yang lebih dari waktu yang telah direncanakan.



Foto 13: WTP Jakarta selama 4 Tahun Berturut-turut (2021) | Sumber: Pemprov DKI Jakarta



Berdasarkan opini yang diberikan BPK dengan mengecek dari kesesuaian atas apa yang telah dilaporkan, Jakarta meraih penghargaan WTP selama 4 tahun berturut-turut sebagai kado Ulang Tahun Jakarta ke-494.

TGUPP juga ikut berperan dalam mempertahankan penghargaan WTP selama 4 tahun berturut-turut. Adapun peran TGUPP adalah *monitoring* TLHP BPK dan percepatan *follow up* antar OPD dalam penyelesaian tindak lanjut, merekomendasikan rencana aksi untuk menuju target WTP sehingga akhirnya dapat meraih penghargaan WTP selama 4 tahun berturut-turut. Percepatan *follow up* menjadi penting untuk dapat menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK. TGUPP juga ikut serta dalam melakukan *review* kebijakan dan regulasi terkait untuk mendukung target WTP. *Review* yang diberikan untuk mendorong konsistensi penghargaan WTP Jakarta di tahun berikutnya.

### Agenda ke Depan

- Agenda kedepannya adalah tetap mempertahankan opini WTP 5 tahun berturut-turut. Strategi untuk mencapai hal tersebut dengan menyelesaikan Tindak Lanjut (TL) BPK. Penyelesaian TL BPK dituangkan dalam Buku Wajar Tanpa Pengecualian. TGUPP ikut merencanakan strategi komunikasi pencapaian WTP serta memastikan bahwa rencana aksi untuk mencapai WTP dan penyelesaian TLHP BPK tercantum pada renaksi KSD pada rencana aksi dalam sistem *monitoring* program dan perjanjian kerja masing-masing OPD.

### Hikmah Pembelajaran

- Banyak hal yang dapat diambil dari penyelesaian temuan pemeriksaan BPK di tahun 2021. Pentingnya menjalin komunikasi dengan BPK yang memiliki peran mendampingi dalam audit pengelolaan anggaran. Penindaklanjutan TLH BPK menjadi lebih mudah apabila komunikasi dengan BPK telah terjalin dengan baik. Disamping itu, komitmen kepala OPD perlu didorong lebih untuk dapat menindaklanjuti TLH BPK sehingga di tahun-tahun setelahnya, Jakarta tetap dapat meraih penghargaan WTP.



*Inisiatif utama dalam mencapai penghargaan WTP adalah tercapainya target opini WTP selama 4 tahun berturut-turut dan penyelesaian tindak lanjut dari temuan BPK sebesar 100%.*

## Peningkatan Kinerja BUMD

*Berperan untuk membangun Jakarta*

### Tentang Peningkatan Kinerja BUMD

Program peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki 2 fokus utama.

Pertama, memastikan BUMD berkontribusi dengan optimal sebagai agen pembangunan kota Jakarta. Tujuannya untuk memastikan pemenuhan program-program Pemprov DKI Jakarta yang ditugaskan kepada BUMD. Beberapa contoh penugasan diantaranya adalah **JIS** kepada PT Jakarta Propertindo, **DP Nol** kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, **SJUT** dan **ITF** kepada PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya,

**air bersih** kepada Perumda PAM Jaya, **air limbah** kepada Perumda PAL Jaya, **pangan** kepada beberapa BUMD bidang pangan, integrasi **transportasi** kepada beberapa BUMD bidang transportasi, serta berbagai program prioritas lainnya.

Kedua, memastikan kondisi BUMD sehat dari segi penilaian korporasi. Hal ini dilakukan melalui transformasi BUMD, misalnya PT Jakarta Tourisindo /*Jakarta Experience Board* yang mulai membuahkan hasil berupa laba positif setelah dalam 4 tahun berturut-turut mengalami kerugian dari tahun 2016.



Foto 14: Penandatanganan HOA Pembentukan JV Kota Tua-Sunda Kelapa  
Sumber: Jakarta Experience Board (JXB)



### Terus Berkontribusi untuk Jakarta

Berbagai momen krusial dan tonggak pencapaian terjadi selama tahun 2021, yaitu memulai transformasi BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang selama 2 tahun terakhir terpuruk akibat pandemi Covid-19. Transformasi Ancol dilakukan dengan mentransformasi struktur dan model bisnisnya agar dapat merespon perubahan industri pariwisata pasca-pandemi, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pengembangan kawasan.

Tahun 2021 juga merupakan tahun hadirnya komitmen penandatanganan *Head of Agreement* pembentukan *Joint Venture* antara *Jakarta Experience Board* (JXB), PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) untuk mengembangkan kawasan wisata Kota Tua-Sunda Kelapa menjadi destinasi wisata berkelas dunia.

Selain itu, juga terlaksana *soft launching* sistem integrasi tarif dan peluncuran super apps JakLingko yang dikembangkan oleh PT Jaklingko Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta, PT TransJakarta, PT Jakarta Propertindo dan PT MITJ.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan merupakan program rutin, melalui BUMD bidang Pangan, yaitu Perumda Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT Food Station, kerjasama pangan antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah di Indonesia terus diinisiasi dan diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta.

TGUPP memulai perannya dengan mendorong dan memformulasikan objektif, kerangka strategis, dan proses transformasi di masing-masing BUMD. Dalam prosesnya, termasuk bagaimana meyakinkan kepada para pimpinan BUMD maupun Pemprov DKI Jakarta terkait pentingnya transformasi hingga memastikan proses tersebut berjalan secara berkelanjutan. TGUPP juga memposisikan diri sebagai mitra erat dari PMO pada BUMD masing-masing, yaitu dengan memastikan target tercapai sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan hingga implementasinya berjalan di lapangan. Pada beberapa BUMD, TGUPP juga berperan dalam memberikan saran terkait *rebranding* BUMD tersebut.

*Merupakan tahun  
hadirnya komitmen  
penandatanganan Head of  
Agreement pembentukan  
Joint Venture untuk  
mengembangkan kawasan  
wisata Kota Tua-Sunda  
Kelapa menjadi destinasi  
wisata berkelas dunia.*







Foto 15: Sentra Vaksinasi BUMD | Sumber: Jakarta Experience Board (JXB)

### Ikut Serta dalam Penanganan Pandemi

Pandemi memukul berat kondisi keuangan hampir seluruh BUMD Jakarta. Terlepas dari terdampak akan krisis, BUMD terus didorong untuk tetap *deliver* penugasan-penugasan pembangunan Jakarta yang diamanatkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Namun, lebih dari tetap menjalankan penugasan, BUMD juga turut serta berkontribusi terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta.

Akomodasi bagi para tenaga kesehatan berupa penginapan dan transportasi dari dan ke lokasi fasilitas kesehatan tetap berjalan sejak tahun 2020. Pada tahun 2021, BUMD juga turut berkolaborasi dalam percepatan cakupan vaksinasi di Jakarta, yaitu melalui Sentra Vaksinasi BUMD yang menjangkau hingga 293.621 orang untuk dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19. Selain itu, juga membantu penyiapan lokasi isolasi terkendali di Rusun Nagrak.



### Agenda ke Depan

- Agenda terdekat yang akan saja dilaksanakan adalah penyelenggaraan BUMD *Leaders Summit* di awal tahun 2022, sebagai momen *alignment* seluruh BUMD untuk berbagai agenda di tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, juga telah dilakukan penandatanganan bersama KPI BUMD. Mulai tahun 2022, KPI BUMD telah memasukkan gagasan visi kota dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, yaitu sebesar ~35% dari bobot KPI.
- Ke depan, juga akan terlaksana berbagai peluncuran program maupun hasil pembangunan yang merupakan penuaian hasil dari penugasan kepada para BUMD, misalnya pembangunan *Jakarta International Stadium* dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki.



### Hikmah Pembelajaran

- BUMD memiliki karakteristik dan kompleksitas yang cukup rumit, sehingga akan cukup sulit jika dipertarungkan dengan korporasi yang bertujuan bisnis di luar sana terutama dari segi finansial. Untuk itu, BUMD perlu didorong untuk menemukan *competitive advantage*-nya agar dapat berkembang. Sebagai agen pembangunan kota Jakarta, banyak potensi yang dapat dieksplorasi oleh BUMD dari sektor / industrinya masing-masing. Kemampuan untuk menerjemahkan kebutuhan kota Jakarta ke dalam *workable business* inilah yang dapat membantu BUMD menemukan keunggulan kompetitifnya.
- Memetik hasil dari upaya transformasi BUMD itu tidak bisa instan. Banyak kasus yang hasilnya perlu dilihat lebih dari satu hingga dua tahun. Meskipun begitu, proses transformasi tetap harus dijalankan terutama untuk meningkatkan kinerja BUMD dan memastikan model bisnis serta arah gerak BUMD selaras dengan kebutuhan dan gagasan kota Jakarta ke depan.



*Kemampuan untuk menerjemahkan kebutuhan kota Jakarta ke dalam workable business inilah yang dapat membantu BUMD menemukan keunggulan kompetitifnya.*




## RTRW, RDTR

*Menata Jakarta, kini dan nanti*

### Tentang RTRW dan RDTR

Jakarta, sebagai kota yang memfasilitasi seluruh aktivitas dan kebutuhan warga, mulai dari hunian, bisnis, rekreasi, dan berbagai kebutuhan warga lainnya, perlu memiliki tata ruang yang selaras dan mampu mendorong perkembangan kota dan warga yang tinggal di dalamnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menggambarkan tata ruang Jakarta dalam kurun waktu 20 tahun, dalam perubahan ini hingga 2040. RTRW memuat visi dan kebijakan umum terkait penataan ruang, kemudian diturunkan ke dalam rencana detail dan operasional, yaitu RDTR. Di dalam RDTR, termuat peta zonasi yang menjadi acuan ketika warga atau badan usaha mengajukan perizinan terkait pemanfaatan ruang di Jakarta, baik untuk rumah hunian, gedung perkantoran, lokasi usaha, hingga area pesisir, serta berbagai peruntukan lainnya.



*Di dalam RDTR, termuat peta zonasi yang menjadi acuan ketika warga atau badan usaha mengajukan perizinan terkait pemanfaatan ruang di Jakarta, baik untuk rumah hunian, gedung perkantoran, lokasi usaha, hingga area pesisir, serta berbagai peruntukan lainnya.*

### Gagasan Perubahan RTRW dan RDTR Demi Masa Depan Jakarta

Pesatnya perkembangan kota Jakarta menjadi alasan utama perlunya perubahan RTRW dan RDTR. Bersama dengan OPD terkait, TGUPP menginisiasi dan memperkenalkan gagasan baru dalam penataan ruang Jakarta, termasuk di dalamnya merespon terhadap tantangan dan peluang akibat pandemi Covid-19.



*Revisi RTRW dan RDTR ini juga **mengarah pada fleksibilitas penataan ruang** dibandingkan dokumen RTRW tahun 2012 dan RDTR tahun 2014 yang sangat kaku sehingga justru dapat menghambat perkembangan kota Jakarta.*



**Gambar 3: Ilustrasi Konsep Pengembangan Spasial Jakarta**

Sumber: Dokumen Konsultasi Publik RTRW Jakarta

Pertama, *Digital Oriented Development*, yaitu mendorong kehidupan kota berbasis digital di semua sektor.

Kedua, *Self Sufficient Neighborhood*, yaitu menciptakan permukiman yang mandiri di seluruh wilayah Jakarta dengan aktivitas utama penduduk dapat dilakukan di dalam lingkup hunian.

Ketiga, *Transit Oriented Development*, yaitu pemusatan kegiatan dan hunian di sekitar titik transit yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan.

Ketiga gagasan ini saling terkait satu sama lain demi mewujudkan visi penataan ruang Jakarta, yaitu Jakarta sebagai kota berketahanan yang berbasis transit dan digital.

Revisi RTRW dan RDTR ini juga mengarah pada fleksibilitas penataan ruang dibandingkan dokumen RTRW tahun 2012 dan RDTR tahun 2014 yang sangat kaku sehingga justru dapat menghambat perkembangan kota Jakarta.

Lebih dari itu, TGUPP melalui komite pesisir juga ambil bagian dalam penyusunan RTRW dan RDTR dengan mementingkan aspek geografis dan sosial yang ada di lingkungan tersebut.

Mulai dari menginisiasi gagasan, TGUPP juga memantau secara periodik perkembangan penyusunan dokumen dan akan mengawal hingga dokumen selesai dan disahkan, ditargetkan pada tengah tahun 2022.



### Bagaimana dengan pesisir kita?

Di lain sisi, TGUPP melalui komite pesisir juga melakukan koordinasi dan pengelolaan empat (4) pulau terbangun agar bisa dikelola dengan baik. Pelbagai usaha pembangunan yang dilakukan berfokus pada pemanfaatan ruang: Penamaan jalan, misalnya.

KPK Ibukota juga telah melakukan pendampingan hukum terhadap gugatan perlawanan yang diajukan pengusaha kepada Gubernur karena telah mencabut izin pelaksanaan reklamasi pulau-pulau Pantai Utara Jakarta. Terdapat setidaknya lima gugatan terkait perlawanan pencabutan izin pelaksanaan reklamasi yang didampingi oleh KPK Ibukota. Gugatan tersebut diajukan secara terpisah oleh PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yuda, PT. Jaladri Kartika Pakci, PT. Agung Dinamika Perkasa dan PT. Muara Wisesa Samudra. Perusahaan-perusahaan tersebut mempermasalahkan penghentian reklamasi di Pulau F, Pulau G, Pulau H, Pulau I dan Pulau M.

Dalam melakukan pendampingan, KPK Ibukota melakukan penelitian, melakukan *legal due diligence* (LDD), berkonsultasi dengan ahli dan *stakeholder* lainnya. Keseluruhan kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta, yang diwakili oleh Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, meyakinkan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa kegiatan reklamasi harus dihentikan demi tercapainya keadilan lingkungan (*Environmental Justice*). Pengujian terhadap keputusan-keputusan Gubernur tersebut berlangsung cukup panjang, mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Peninjauan Kembali.

Dalam mempertahankan komitmen Gubernur, KPK Ibukota bersama seluruh instansi Pemprov DKI Jakarta, tidak hanya berjuang dalam ruang lingkup peradilan semata (litigasi), namun juga melakukan upaya non-litigasi seperti, melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, menjaring pendapat ahli dan menggalang aspirasi dari *stakeholder* utama yakni masyarakat terutama para nelayan. Akhirnya, berkat kerja sama seluruh pihak Pemprov DKI Jakarta berhasil menghentikan reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

*Dalam mempertahankan komitmen Gubernur, KPK Ibukota bersama seluruh instansi Pemprov DKI Jakarta, tidak hanya berjuang dalam ruang lingkup peradilan semata (litigasi), namun juga melakukan upaya non-litigasi seperti, melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, menjaring pendapat ahli dan menggalang aspirasi dari stakeholder utama yakni masyarakat terutama para nelayan.*





### Belajar dari Penyusunan RTRW dan RDTR

- Menginisiasi gagasan yang besar dan transformatif pada suatu dokumen strategis memerlukan waktu yang cukup panjang dan *effort* yang tidak sedikit, terutama jika telah terbentuk anggapan bahwa dokumen eksisting sudah cukup.
- Perubahan situasi yang sangat drastis, seperti terjadinya pandemi Covid-19 di Jakarta, justru memicu ide-ide baru yang transformatif dan membawa perubahan besar.

### Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Atas Pelanggaran IMB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Pelanggaran IMB terjadi di Pembangunan Perumahan Cipayung Green View terkait Pembangunan Ruko dan Rumah yang melanggar GSB dan GSB serta Pembangunan Rumah (Sdri. IO) di Jl. Dharmawangsa IX Kebayoran Baru. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya keterpaduan penyampaian informasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (DPMPTSP) dan pengawasan progres pembangunan di lapangan (DCKTRP) serta penertiban berupa bongkar paksa (Satpol PP) dimana bangunan fisik sudah hampir selesai.

Atas permasalahan dan penyebab masalah di atas, usulan KPK Ibukota dan Bidang Hukum yang merekomendasikan agar dirancang Sistem Terintegrasi Atas Penerbitan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut sedang diproses oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui evaluasi *IT system* yang telah dibangun di masing-masing OPD.

Salah satu rekomendasi ini bertujuan mencegah dan mengurangi *Land Subsidence*, dampak lingkungan hidup dan kemacetan lalu lintas di sekitar pemukiman serta biaya bongkar paksa dan biaya tuntutan ganti rugi apabila pembongkaran bangunan tersebut terjadi kesalahan teknis ambruknya suatu bangunan.



## Kawasan Berorientasi Transit

*Menciptakan kota yang vibrant dan liveable dengan pembangunan berbasis transit*

### Tentang TOD

Pembangunan kota berbasis kendaraan pribadi seperti yang selama ini berlangsung di Jakarta, membuat kota bertumbuh menjadi tidak efisien dan tidak terkendali. Kemacetan menjadi tidak terhindarkan karena semua warga beraktivitas menggunakan kendaraan pribadinya, dan kota akan terus menjalar (*sprawling*) ke area-area sekitar memakan lahan-lahan hijau yang ada.

Konsep kawasan berorientasi transit atau *transit oriented development* (TOD) adalah perubahan paradigma pembangunan, yaitu pembangunan yang sebelumnya berbasis kendaraan pribadi, kini berubah menjadi berbasis transportasi massal. Perubahan ini tidak hanya mengedepankan penyediaan transportasi publik dan integrasi antar moda, namun juga menyediakan kawasan yang fasilitasnya mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga dalam rentang jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

Dengan hadirnya TOD, akan tercipta kawasan yang *mixed used*, *dense*, aktif, *vibrant* serta mendorong perkembangan sosial dan ekonomi wilayah sekitar.



### Mulai Menuai Pembangunan di 2021

Kilas balik di tahun 2019, TGUPP menginisiasi penyempurnaan Peraturan Gubernur yang berlaku saat itu dengan tujuan memastikan implementasi TOD dapat berjalan, menghasilkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

Bersama dengan OPD terkait, TGUPP terus turut serta menyempurnakan berbagai *legal framework* hingga ditetapkan 7 kawasan TOD pada tahun 2020 serta kembali menghasilkan Revisi Peraturan Gubernur tentang TOD, yaitu Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2021.

Seluruh penyiapan *legal framework* yang memakan waktu hampir 2,5 tahun terakhir ini berbuah apresiasi dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR, hingga menjadi salah satu *benchmark* penyusunan regulasi tingkat pusat terkait TOD dan turunannya.

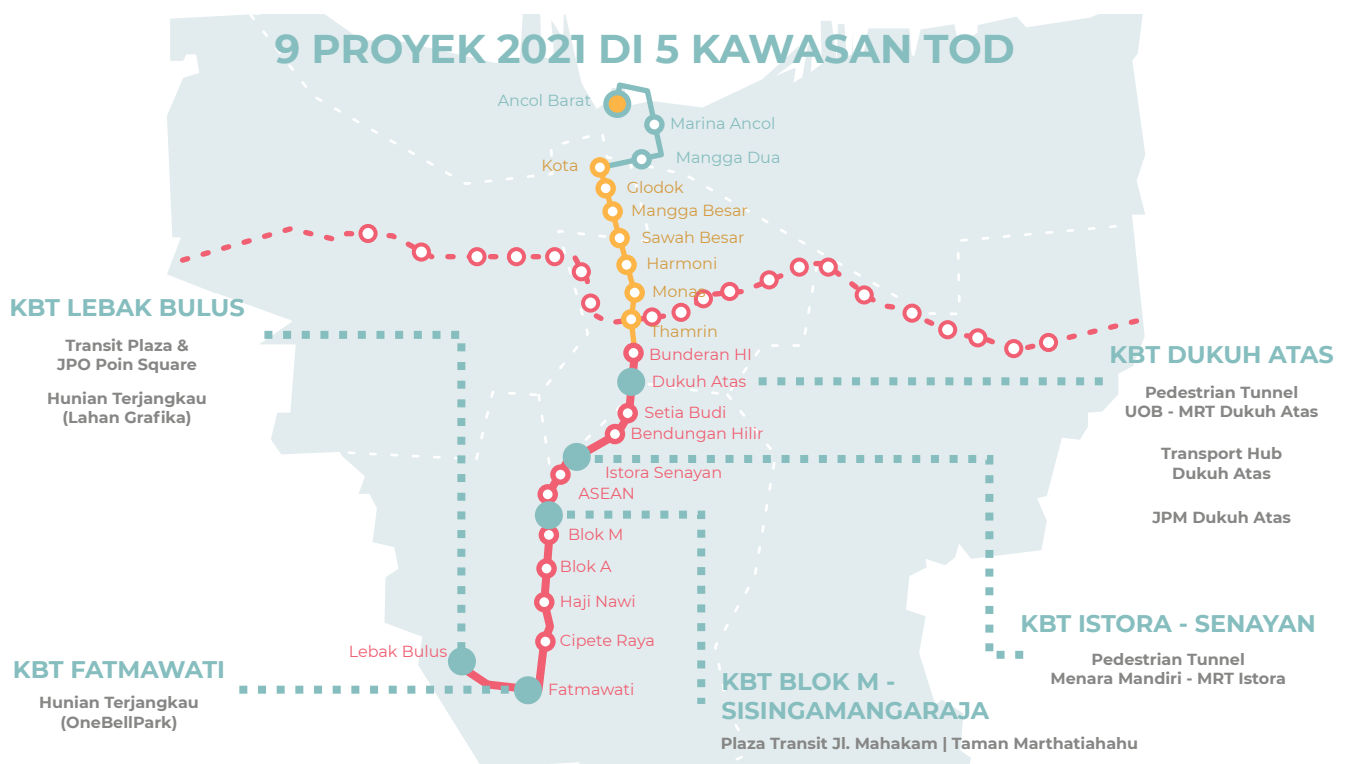
*Perubahan ini tidak hanya mengedepankan penyediaan transportasi publik dan integrasi antar moda, namun juga menyediakan kawasan yang fasilitasnya mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga dalam rentang jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki.*

Kini, di tahun 2021, telah ada 9 proyek yang berjalan di 5 kawasan TOD, yaitu:

1. **TOD Lebak Bulus:**  
Transit Plaza & JPO Poin Square dan Hunian Terjangkau (Lahan Grafika)
2. **TOD Fatmawati:**  
Hunian Terjangkau (One Belpark)
3. **TOD Blok M - Sisingamangaraja:**  
Plaza Transit Jl. Mahakam dan Taman Martha Tiahahu
4. **TOD Istora-Senayan:**  
Pedestrian Tunnel Menara Mandiri-MRT Istora
5. **TOD Dukuh Atas:**  
Pedestrian Tunnel UOB-MRT Dukuh Atas  
Dukuh Atas, Transport Hub Dukuh Atas dan JPM Dukuh Atas

Pandemi Covid-19 di tahun 2021 yang berakibat pada situasi ekonomi yang kembali memburuk, sedikit banyak berpengaruh terhadap rencana pembangunan oleh swasta di kawasan TOD yang kemungkinan juga melambat.

Dalam keberjalanan perkembangan kawasan TOD, TGUPP bermitra dengan para OPD terkait untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh pengelola kawasan memenuhi persyaratan dan sejalan dengan gagasan awal melalui proses *review* dan memberi rekomendasi strategis kepada Gubernur atas proposal tersebut. Fungsi *debottlenecking* juga menjadi peran yang diperlukan, yaitu memfasilitasi ketika terjadi hambatan terutama terkait koordinasi lintas sektor.



Gambar 4: 9 Proyek 2021 di Kawasan TOD | Sumber: MRT Jakarta, September 2021

## Agenda ke depan

Dengan telah tersedianya berbagai *legal framework* yang mendukung implementasi kawasan TOD, juga telah ditetapkan kawasan-kawasan TOD, diharapkan daftar infrastruktur yang tertulis dalam proposal pengajuan dapat terbangun sesuai dengan linimasa yang tercantum. Lebih jauh lagi, juga diharapkan kawasan-kawasan lain yang berpotensi menjadi kawasan TOD di fase-fase selanjutnya dapat segera dimulai pengkajiannya oleh para calon pengelola kawasan.

## Pembelajaran

- Menginisiasi suatu inovasi atau gagasan baru yang sebelumnya belum pernah dijalankan di lingkup Pemprov DKI Jakarta, maupun pemerintahan secara umum, memerlukan kelengkapan *legal framework* yang menjadi acuan hingga tahap implementasi / pelaksanaan. Jika ada inovasi, perlu dipastikan tertuang dalam *legal framework* yang lengkap agar seluruh pihak dapat bergerak dan pelaksanaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Akselerasi proses penyiapan *legal framework* sangat dibutuhkan, salah satunya dengan tidak menunggu-nunggu hingga sempurna, namun terus terbuka untuk penyempurnaan apabila ditemukan ruang koreksi ketika gagasan sudah menjadi program yang berjalan di lapangan.

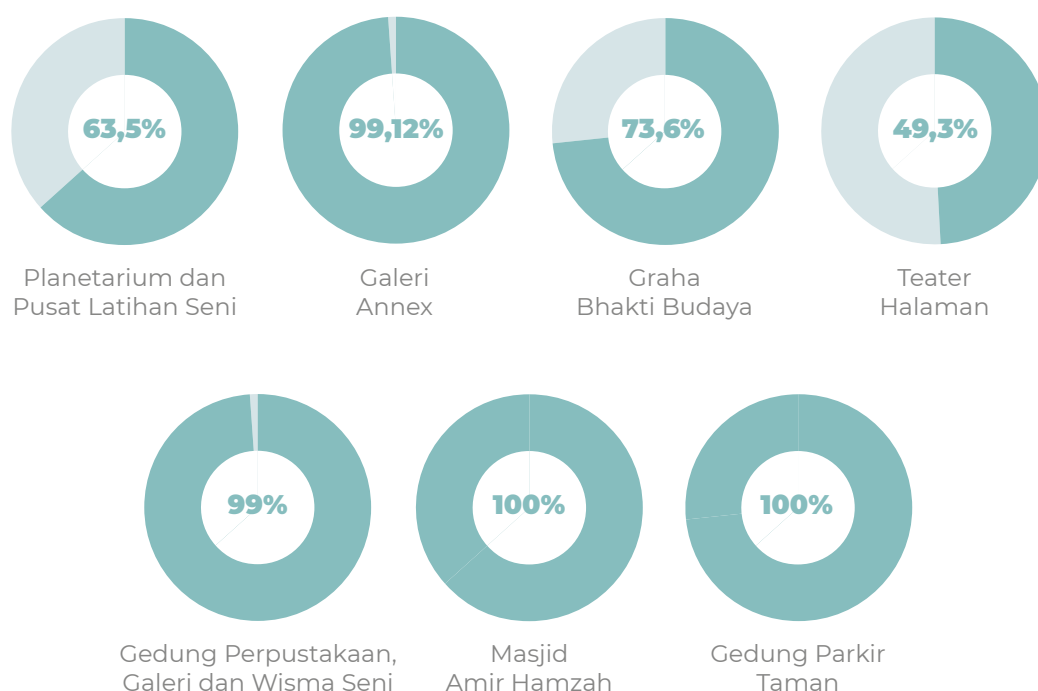
***Seluruh penyiapan legal framework yang memakan waktu hampir 2,5 tahun terakhir ini berbuah apresiasi dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR, hingga menjadi salah satu benchmark penyusunan regulasi tingkat pusat terkait TOD dan turunannya.***



### Taman Ismail Marzuki

*Eskalasi pusat seni, jadikan barometer global —2021*

Sebagai pusat kota, Jakarta hadir dengan semangat untuk merayakan sekaligus mendukung kemajuan kota maupun warga. Salah satunya, lewat kesenian dan budaya. Hal tersebut dilakukan oleh kota dengan merevitalisasi sekaligus meningkatkan kualitas Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Pada 2021, proses revitalisasi yang secara teknis telah mulai mengalami pengembangan fokus pada sistem dan pengelolaan TIM ke depan sebagai pusat seni berskala global. Per 3 Januari (week 48) sendiri, revitalisasi yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JAKPRO), telah mencapai:



Lebih lanjut, sesuai dengan visi Gubernur, revitalisasi TIM diharapkan mampu menghadirkan pusat kesenian dan kebudayaan yang bukan sekadar pada “fisik” tetapi juga kaya akan substansi. Sebab, pada area tersebut, tersedia perpustakaan, galeri kesenian, serta ruang bagi seniman untuk berlatih, hingga planetarium. Sehingga diperlukan substansinya yang kuat dan baik untuk menjadikan TIM sebagai barometer dunia kesenian global: Sebuah wahana seniman untuk masuk ke dunia Internasional.





### Peran sentris

Dalam proses pembangunannya, TGUPP sebagai pihak yang berupaya melakukan percepatan pelaksanaan visi dan misi Gubernur, berupaya menerjemahkan, memetakan, dan mengkomunikasikan perspektif baru. Hal tersebut, dilakukan bersama dengan Dinas Kebudayaan, PT JAKPRO, dan pihak eksternal sebagai kolaborator. Misalnya, dengan menganalisis kondisi pameran serta kawasan pusat budaya di luar negeri, memetakan *benchmark*, hingga melakukan komunikasi dengan kolaborator dan lembaga kesenian di Jakarta.

### Kendala

Meski perjalanan yang dilakukan sudah berjalan baik, akan tetapi di dalam prosesnya memiliki tantangan tersendiri. Secara umum dapat dipetakan beberapa faktor: komunikasi, regulasi pengelolaan, dan kejelasan koordinasi. Misalnya, diperlukannya rencana pengelolaan jangka panjang sekaligus menyeluruh yang dapat mengakomodir kebutuhan seniman dan juga publik. Penyelarasan komunikasi visi juga menjadi salah satu tantangan yang dialami, sehingga memerlukan intensitas pendekatan dan koordinasi pembangunan dengan prinsip keterbukaan pada masukan dan saran.

### Segera hadir.

Tentu saja, sangat diharapkan pembangunan bisa segera selesai, seraya mendorong adanya pengelolaan yang baik dengan standar global pada tahun 2022. Sehingga, visi-misi awal mampu tersampaikan kepada warga secara langsung dan nyata demi kemajuan kesenian kota.

*Revitalisasi TIM  
diharapkan mampu  
menghadirkan pusat  
kesenian dan kebudayaan  
yang bukan sekadar pada  
“fisik” tetapi juga kaya  
akan substansi.*

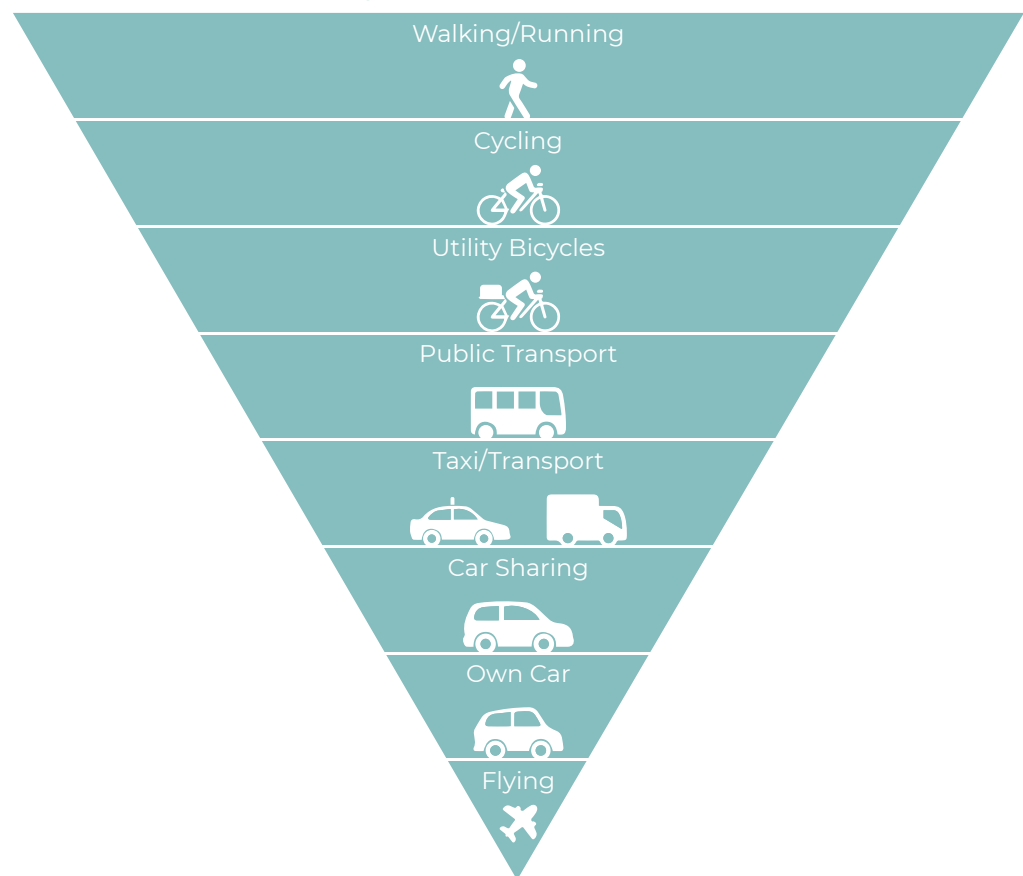
## Fasilitas Pejalan Kaki & Ducting IT

*Jakarta makin ramah bagi pejalan kaki*

### Menyediakan Fasilitas Pejalan Kaki

Perubahan paradigma pembangunan Jakarta dari yang sebelumnya fokus mengakomodir para pengguna kendaraan pribadi dengan membangun jalan raya, kini fokus menjadi kota ramah pejalan kaki. Hal ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan aman bagi warga Jakarta, seperti yang dilakukan oleh kota-kota megapolitan di dunia. Fasilitas pejalan kaki ini termasuk trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

**Gambar 5: Piramida Prioritas Pejalan Kaki** | Sumber: Pemprov DKI Jakarta





**Foto 16: Trotoar Jalan Wolter Monginsidi |** Sumber: Dinas Bina Marga DKI Jakarta

Melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, Jakarta mendorong warganya untuk beralih memaksimalkan pemanfaatan fasilitas publik dengan memudahkan perpindahan orang, salah satunya yang utama adalah transportasi umum. Selain itu, hadirnya trotoar di Jakarta juga merupakan bagian dari gagasan penyediaan ruang ketiga bagi warga untuk dapat berinteraksi dengan lebih leluasa. Sebagai contoh, selain revitalisasi trotoar dan JPO, juga dilakukan penegakan pada lokasi trotoar yang justru digunakan untuk parkir kendaraan.

Hadirnya fasilitas pejalan kaki, juga diharapkan memudahkan mobilitas seluruh warga Jakarta, termasuk penyandang disabilitas. Revitalisasi dan pembangunan fasilitas pejalan kaki di Jakarta juga mengimplementasikan gagasan Jakarta sebagai kota yang ramah disabilitas.

***Revitalisasi dan pembangunan fasilitas pejalan kaki di Jakarta juga mengimplementasikan gagasan Jakarta sebagai kota yang ramah disabilitas.***





Foto 17: JPO Atrium Senen | Sumber: Dinas Bina Marga DKI Jakarta







Penataan trotoar di Jakarta dilakukan dengan **konsep *complete street*** dan pembagian ruang jalan, yaitu jalan yang dapat diakses dan digunakan **semua pengguna, usia dan kemampuan**. Hal ini dilakukan mulai dari memastikan ruang untuk pejalan kaki (trotoar), memberi ruang untuk pesepeda, mengutamakan jalur sepeda yang terproteksi secara fisik, menambahkan ruang untuk transportasi umum dan fasilitas pendukungnya (halte), menyediakan ruang untuk kendaraan pribadi (mobil, motor, taksi, ojek) dengan prinsip konsistensi lajur, serta sisa ruang dapat digunakan untuk parkir *on-street*.

*Hadirnya trotoar di Jakarta juga merupakan bagian dari gagasan penyediaan ruang ketiga bagi warga untuk dapat berinteraksi dengan lebih leluasa.*

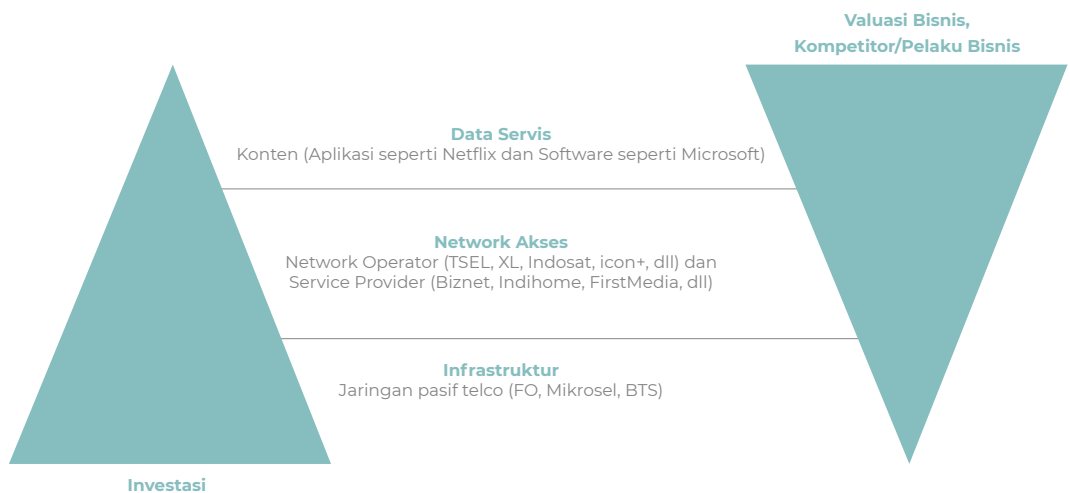
Foto 18: Simpang Senen, Contoh Pembangunan dengan Konsep Complete Street | Sumber: Dinas Bina Marga DKI Jakarta



### Menata Jaringan Utilitas Jakarta

Penataan fasilitas pejalan kaki juga dilakukan bersama dengan upaya merapikan dan menata ulang infrastruktur jaringan utilitas di Jakarta. Dengan hadirnya proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), khususnya dengan yang disebut *ducting IT*, diharapkan tidak ada lagi kabel di udara yang berpotensi membahayakan warga, mengurangi kemacetan dengan buka tutup galian kabel, serta *facade* kota menjadi lebih indah dilihat dengan hilangnya penampakan kabel-kabel yang semrawut.

Selain manfaat yang disampaikan sebelumnya **penyediaan *ducting IT* memiliki gagasan besar, yaitu mendorong transformasi digital kota.** Hal ini sejalan dengan perkembangan pesat industri 4.0, layanan digital, telekomunikasi di Jakarta sebagai pusat ekonomi digital di Indonesia. Melihat peluang tersebut, Pemerintah Jakarta terus memfasilitasi perkembangan industri ini, terutama di lini yang paling membutuhkan peran dari pemerintah. Dari tiga lini bisnis digital, infrastruktur digital merupakan ranah bisnis yang paling mahal biayanya sekaligus paling sedikit aktornya. Sedangkan, layanan akses dan data merupakan bisnis yang justru membutuhkan investasi minim namun memiliki valuasi bisnis dan jumlah pelaku yang cukup banyak. Harapannya, penyediaan *ducting IT* mampu mengefisiensikan aktivitas bisnis lini infrastruktur keras untuk kebutuhan telekomunikasi dan digital. Dengan demikian, pengembangan layanan digital di kota Jakarta bisa lebih terakselerasi.



**Gambar 6: Piramida Bisnis Digital (diadaptasi dari Framework 5G Network Slicing Ericsson)**

Sumber: Pemprov DKI Jakarta



**Foto 19: JPO dan JPS Phinisi** | Sumber: Dinas Bina Marga DKI Jakarta

### Capaian selama tahun 2021

Jumlah fasilitas pejalan kaki yang direvitalisasi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun capaiannya sempat menurun ketika tahun 2020 akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

Hingga tahun 2021, realisasi revitalisasi trotoar di Jakarta mencapai **812.328 m<sup>2</sup>**, termasuk yang sedang berjalan diantaranya di Kawasan Kebayoran Baru, Kawasan Sentra Primer Barat, Kawasan Taman Segitiga Jalan Duri Kosambi Raya, Jalan Tebet Raya, Jalan Raden Saleh, Jalan Pesanggrahan dan Jalan Layur. Pada tahun 2021, hadir 3 JPO di Jakarta yang selesai direvitalisasi menggunakan APBD, yaitu **JPO Kalijodo** dan **JPO Kolonel Sugiono**, serta menggunakan dana KLB, yaitu **JPO dan JPS (Jembatan Penyeberangan Sepeda) Phinisi**.



**Foto 20: JPO Kolonel Sugiono**

Sumber: Dinas Bina Marga DKI Jakarta



**Foto 21: JPO Kalijodo**

Sumber: Dinas Bina Marga DKI Jakarta



Hadirnya fasilitas pejalan kaki yang nyaman merupakan salah satu pemantik dari aktivasi kawasan, yang diharapkan dampaknya dapat terasa langsung oleh warga termasuk dalam aspek ekonomi. Misalnya, trotoar yang nyaman di kawasan Cikini, diharapkan mendorong warga untuk berjalan-jalan di Cikini, baik wisata sejarah maupun wisata kuliner di berbagai restoran ternama di sana.

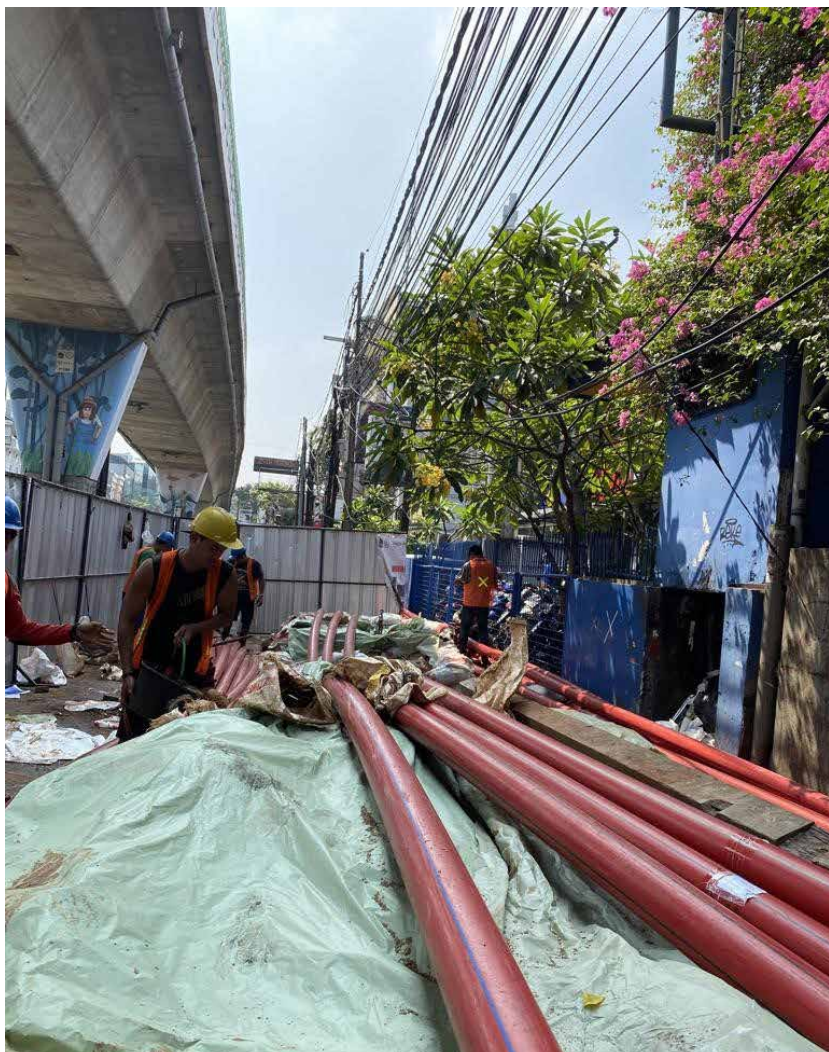
Selama tahun 2021, trotoar terus digalakkan menjadi ruang ketiga bagi warga, salah satunya pelaksanaan Christmas Carol di trotoar Bundaran HI, Terowongan Kendal, Stasiun MRT Blok M, Stasiun Tebet, Spot Budaya Dukuh Atas, Taman Lapangan Banteng dan Taman Ismail Marzuki serta berbagai aktivasi lainnya bersamaan dengan penyelenggaraan acara-acara ternama Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan berbagai pihak.



**Foto 22: Christmas Carol di Taman Dukuh Atas |** Sumber: Tresna, Potret Jakarta



**Foto 23: Christmas Carol di Trotoar Bundaran HI |** Sumber: Nugroho Sejati, Potret Jakarta



**Foto 24: Bagian dari proses penyediaan ducting IT untuk kabel listrik**  
 Sumber: Dokumentasi pribadi

**Hingga Desember 2021, di 7 lokasi sudah ada 117 kegiatan survei lapangan oleh operator, 48 diantaranya sedang berproses membahas kerjasama pengisian SJUT, 35 telah bekerjasama, dan 29 kabel operator di 4 lokasi sudah masuk ke dalam SJUT.**

Melanjutkan proses yang telah ditempuh sejak tahun 2019 dan 2020, penyediaan SJUT dilakukan oleh BUMD Jakarta. Selama tahun 2021, penyediaan SJUT berhasil mencapai 19,459 km, yaitu di ruas Jalan Mampang Prapatan, Jalan Kapten Tendean, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Cikajang, dan Jalan Gunawarman yang telah terbangun, dengan 2 (dua) ruas jalan yaitu Jalan Raden Saleh dan Jalan Latumenten dalam proses pembangunan.

Sebelum SJUT terbangun, pihak BUMD PT Jakpro dan Dinas Bina Marga sudah menjalin komunikasi dengan para operator yang akan memasukkan kabel-kabelnya ke dalam SJUT. Sehingga, pada saat SJUT sudah mulai selesai terbangun, proses penjajakan tidak dimulai dari nol. Pada bulan Agustus, proses pembahasan kerjasama dan survei lapangan sudah mulai dilakukan hingga akhirnya mulai terisi di 7 ruas jalan yang telah terbangun. Hingga Desember 2021, di 7 lokasi sudah ada 117 kegiatan survei lapangan oleh operator, 48 diantaranya sedang berproses membahas kerjasama pengisian SJUT, 35 telah bekerjasama, dan 29 kabel operator di 4 lokasi sudah masuk ke dalam SJUT. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pengisian mengalami keterlambatan mengingat proses pengadaan dan persiapan material para operator IT membutuhkan waktu yang tidak sebentar (2-3 bulan).



Secara khusus, pengisian dan pengoperasian SJUT di Jalan Mampang merupakan contoh yang paling maju. Hingga Desember 2021, 21 operator telah bekerjasama dan 15 diantaranya telah memasukkan kabelnya ke dalam SJUT. Tersisa 11 operator yang sedang melakukan finalisasi kerjasama dan 7 operator yang masih melakukan survei di lapangan. Hal ini menunjukkan meskipun banyak paradigma baru yang dihadirkan dari adanya SJUT, pihak operator sebenarnya terbuka untuk inovasi ini. Bahkan, beberapa operator sudah mendahului diskusi teknis dengan penyelenggara SJUT sebelum SJUT itu sendiri selesai dibangun. Harapannya, kedepan lebih banyak lagi lokasi yang SJUTnya termanfaatkan dengan optimal dan tidak ada lagi kabel udara yang menggantung dan membahayakan.

Capaian di tahun 2021 merupakan buah dari upaya yang terus didorong dalam beberapa waktu terakhir. Terkait penyediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman, TGUPP berperan dalam mengubah perspektif trotoar yang dipandang sebagai aksesoris jalan raya menjadi sarana prasarana utama yang harus diperhatikan kualitasnya dan kenyamanannya agar warga terdorong berjalan kaki.

Dalam keberjalanannya, TGUPP turut sertadalammemberikanrekomendasi dalam menentukan lokasi prioritas sesuai arahan Gubernur, kurasi desain untuk memastikan selaras dengan arah pembangunan Jakarta serta merumuskan regulasi terkait *complete street* dan rencana induk trotoar sebagai upaya memastikan keberlanjutan penataan trotoar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, juga menjadi penghubung antara Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai mitra terkait termasuk berupa mitigasi konflik maupun inisiasi kolaborasi. Inisiasi juga dilakukan dalam hal mencari alternatif sumber pembiayaan.

Dalam penataan SJUT, TGUPP memiliki peran besar menjadi inisiator dimulai sejak menghadirkan gagasan ini, mengubah persepsi berbagai pihak, hingga memediasi hingga tercapai kesepakatan dari lintas Perangkat Daerah dalam internal Pemprov DKI Jakarta. TGUPP terus terlibat dalam proses *debottlenecking* dan menjadi jembatan antar pemangku kepentingan yang terlibat, mengingat SJUT merupakan salah satu gagasan yang baru.



## Agenda ke depan

Revitalisasi fasilitas pejalan kaki akan terus diselesaikan dengan mengutamakan pada lokasi-lokasi prioritas yang telah ditetapkan sejak tahun 2019, namun sempat terhambat akibat pandemi. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan segera diselesaikan regulasi yang akan terus menjadi acuan pembangunan trotoar di Jakarta ke depan, yaitu terkait konsep *complete street* dan rencana induk trotoar. Secara rutin akan direvitalisasi lokasi-lokasi JPO yang rusak maupun kurang layak dan terus menghadirkan JPO ikonik sebagai bentuk beautifikasi kota Jakarta dan ruang ketiga bagi warga.

Penataan SJUT akan terus didorong untuk penyelesaian konstruksi dengan harapan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga, namun juga meningkatkan efisiensi bagi industri / operator yang memanfaatkan. Agar upaya mendukung transformasi digital ini bisa bergerak lebih masif, maka perlu juga digagas konsep dan model kerja lain sebagai alternatif bersama penerima manfaat, yaitu operator IT, agar penyediaan dan pengelolaan *ducting IT* dapat lebih cepat, masif, dan efisien. Beberapa gagasan telah mulai digagas sejak tahun 2021, dan harapannya dapat terus ditelaah dan diimplementasikan kedepannya. Sebagai mimpi besar, ke depan, SJUT juga digagas tidak hanya mampu mendorong utilitas listrik dan telekomunikasi, tetapi juga utilitas lain seperti air minum, air limbah, dan gas. Rencana besar penyediaan SJUT sedang disusun dengan harapan mampu menyatukan dan mengefisienkan pekerjaan dan pengelolaan utilitas dari berbagai pihak melalui proses konsolidasi waktu, ruang, hingga manajemen.

***Penataan SJUT akan terus didorong untuk penyelesaian konstruksi dengan harapan tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan warga, namun juga meningkatkan efisiensi bagi industri / operator yang memanfaatkan.***



### Pembelajaran

- Tidak seluruh kegiatan pembangunan harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Pentingnya mengoptimalkan sumber daya pembangunan di luar Pemerintah dan APBD tidak hanya mampu menciptakan pembangunan yang masif namun juga efisien dan profesional. Dengan demikian, pemerintah dapat berfokus pada kegiatan dan lokasi strategis yang urgensinya paling tinggi.
- Hadirnya penengah dan penjematan sebagai upaya pengelolaan berbagai pemangku kepentingan yang terkait merupakan aspek krusial dalam menjadikan gagasan dapat terimplementasi dan berkelanjutan.
- Suatu gagasan baru terutama yang melibatkan industri maupun pelaku usaha perlu memperhatikan model bisnis yang berkelanjutan agar menarik bagi sektor usaha untuk turut serta sehingga program Pemerintah dapat terus berjalan ke depannya.

***Pentingnya mengoptimalkan sumber daya pembangunan di luar Pemerintah dan APBD tidak hanya mampu menciptakan pembangunan yang masif namun juga efisien dan profesional.***



## Mendorong Partisipasi Warga dalam Perencanaan dan Pembangunan Taman Maju Bersama

TMB atau Taman Maju Bersama adalah sebuah program pembangunan taman yang menekankan proses partisipasi dalam perencanaan dan pembangunannya. Proses partisipasi melibatkan warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar taman yang akan dikembangkan. Sebelumnya, proses perencanaan taman bersifat *top-down* di mana pemerintah bersama konsultan merencanakan dan mendesain lokasi tanpa mempertimbangkan masyarakat di sekitar. Sejak 2021, perencanaan taman yang melibatkan masyarakat ini diberlakukan dengan landasan Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Taman. Tujuan dari adanya program TMB ini adalah untuk mendorong persebaran taman yang merata sehingga warga memiliki akses yang sama ke taman. Taman juga diharapkan dapat menjadi ruang ketiga dengan fungsi yang disesuaikan dan dibangun sesuai konteks kawasan sehingga setiap taman dibangun secara *custom*.

Perencanaan taman sudah dilakukan sejak satu tahun sebelum pembangunan dimulai. *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak tiga kali dilakukan dalam satu tahun. FGD pertama dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di sekitar. Setelah itu, *visioning* desain taman disusun dan dilakukan FGD kedua bersama warga untuk mendapatkan saran dan masukan. Terakhir, setelah mempertimbangkan saran dan masukan warga, FGD ketiga kembali dilakukan untuk sosialisasi kesepakatan desain.

Dalam menjalankan inisiatif yang dilakukan sepanjang tahun 2021, TGUPP berperan dalam merumuskan regulasi terkait program, inisiasi awal terkait TMB yang bersifat partisipatif, serta memonitor keberjalanan pembangunan dan fasilitasi lintas SKPD.

**Tujuan dari adanya program TMB ini adalah untuk mendorong persebaran taman yang merata sehingga warga memiliki akses yang sama ke taman.**



Foto 25: Tebet Eco Park | Sumber: Pemprov DKI Jakarta







Tebet Eco Park (TEP) merupakan taman *grande*, memiliki skala pelayanan besar dan lokasi yang strategis di ruang kota, dibangun dengan konsep TMB. TEP menjadi salah satu taman percontohan yang menerapkan fungsi ekologi, sosialisasi, edukasi, dan rekreasi. Unikny, terdapat sungai di TEP yang difungsikan menjadi pengendali banjir dengan mengaplikasikan WSUD (*water sensitive urban design*) di mana sungai tersebut di naturalisasi dengan mengembalikan fungsi ekologis. Lokasi taman sisi utara dan selatan yang terpisah oleh jalan raya dihubungkan dengan jembatan penghubung. Taman juga dilengkapi *children playground*, area *urban farming*, serta ramah anak dan difabel. Untuk dapat mendiseminasi proses pembangunan, *branding* TEP dibangun dan dipublikasikan agar dapat menjadi teladan bagi pembangunan taman lainnya. Selain TEP, terdapat 12 taman lainnya yang dibangun dengan konsep TMB pada tahun 2021.

Covid-19 berdampak besar terhadap penggunaan taman di Jakarta. Banyak taman yang belum bisa dikunjungi sehingga tidak ada kegiatan atau aktivitas di taman. Padahal, ruang terbuka sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di masa pandemi yang menyarankan untuk beraktivitas di luar ruangan (*outdoor*). Namun, sosialisasi dan publikasi terkait taman terus digencarkan melalui akun Teman Taman Jakarta.

Selama kegiatan masih dalam pembatasan, inisiatif perbaikan basis data taman dan data pohon digarap untuk melihat berapa banyak taman dan pohon di Jakarta, apa saja fasilitas yang tersedia, hingga jenis pohon yang ada di Jakarta. Masih terdapat beberapa kendala dalam pendataan taman dan pohon mengingat detailnya kebutuhan data serta pembenahan data yang sulit. Selain itu, data juga tersebar di beberapa SKPD sehingga perlu dibentuk pendataan yang sistematis dan terintegrasi. Keterbatasan kapasitas juga menyebabkan masih terhambatnya pendataan pohon dan taman.

Rasa kesetaraan dapat dibangun melalui Taman. Sebagai ruang ketiga setelah rumah dan tempat kerja, taman harus mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Kedepannya, masih banyak hal-hal yang perlu didorong untuk meningkatkan ketersediaan taman dan keterlibatan warga dalam pembangunannya. Perencanaan dan pembangunan 31 taman baru juga penataan tepian danau cincin yang sudah mulai dilakukan konstruksi agar dapat *launch* di bulan April 2022. Selain itu, peresmian Tebet Eco Park dilakukan dengan pembukaan untuk publik dan sosialisasi via kanal resmi Pemprov DKI. Hal ini untuk meningkatkan *awareness* masyarakat akan taman baru yang bisa jadi percontohan taman-taman lainnya serta sebagai bentuk aktivasi penggunaan taman Tebet untuk rekreasi.





*Rasa kesetaraan dapat dibangun melalui Taman. Sebagai ruang ketiga setelah rumah dan tempat kerja, taman harus mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan.*

TGUPP memfasilitasi dan menjembatani untuk mempublikasikan dan sosialisasi pergub taman melalui *press conference* ke media dibantu oleh WRI. Kedepannya, jika data taman dan pohon sudah terkumpul dan lengkap, data bisa disinkronisasi untuk kebutuhan perencanaan dan analisis ke depan.

Salah satu hal yang dapat dipetik dari apa yang terjadi di tahun 2021 adalah perencanaan yang matang harus berbasis data untuk dapat mencapai target-target jangka panjang. Sebagai contohnya, dalam mencapai target penurunan emisi, manajemen data perlu diperbaiki untuk dapat menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Sesederhana menentukan berapa pohon yang harus ditanam, bagaimana metode untuk mengukurnya, hingga di mana posisi yang tepat untuk menanam pohon.

Selain data, *benefit* taman dari segi lingkungan dan sosial juga dapat diukur oleh masyarakat untuk tahu seberapa besar pengaruh dari keberadaan taman. Hal ini nantinya dapat dijadikan sebagai basis dalam perencanaan dan revitalisasi taman kedepannya.



## Geliat Pengelolaan Air Limbah:

### *Upaya jaga lingkungan kota*

Kebutuhan masyarakat akan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk mendorong roda kehidupan, mulai dari keperluan dasar minum, sanitasi, hingga mendukung sektor-sektor penunjang kehidupan lainnya seperti perindustrian. Baik rumah tangga maupun industri menghasilkan air limbah yang merupakan residu. Jika langsung dibuang ke lingkungan maka akibatnya dapat mencemari badan air seperti sungai dan waduk. Salah satu program untuk mengurangi dampak pencemaran tersebut adalah dengan menerapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik.

IPAL merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air untuk membuat air limbah tersebut meningkat kualitasnya sehingga saat dialirkan ke badan air sudah tidak bersifat mencemari. Untuk mendukung inisiatif ini, Jakarta menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan dan permukiman yang terdiri atas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan. SPALD-T skala permukiman ini dilakukan dengan pendekatan komunal di tengah masyarakat untuk melayani 100 - 150 keluarga di lokasi yang tersebar di Jakarta baik di sekitar taman, maupun RPTRA.

Di tahun 2021, SPALD-T terbangun di 8 lokasi yang tersebar di Jakarta, dengan total warga yang dilayani sekitar 7.000-10.000 warga. Adapun Lokasi SPALD-T Skala Permukiman yang terbangun di:

1. RPTRA Waru Timbul,
2. Sasana Krida Taruna Lenteng Agung,
3. Taman Jagakarsa,
4. RPTRA Kembangan Utara,
5. RPTRA Kampung Indah Lestari,
6. Rumah Pompa Sunter Timur 3 Rawa Badak,
7. RPTRA Rawa Badak,
8. RTH Padaengan.

Selain SPALD-T Skala Permukiman, SPALD-T Skala Perkotaan baru sedang disiapkan pembangunannya. SPALD-T Skala Perkotaan akan terbangun di zona 1 di kawasan Pluit, Jakarta Utara, dengan IPAL seluas 3,9 hektar dan zona 6 di Duri Kosambi, Jakarta Barat. IPAL zona 1 mulai dibangun pada tahun 2022 bersama dengan Kementerian PUPR dengan kapasitas sebesar 240.000 meter kubik per hari untuk melayani (pembuangan tinja) 220.000 Sambungan Rumah (SR).

*Progress* IPAL Krukut untuk menambah kapasitas SPALD-T Perkotaan eksisting yang melayani 2% area Jakarta saat ini telah mencapai 100%, namun fitur-fitur pelengkap seperti *edutainment* masih dalam proses pengerjaan.

Adapun daftar rencana calon Lokasi SPALD-T Skala Perkotaan di 14 zona yang akan dibangun hingga tahun 2050, luasan area IPAL, dan kapasitas pengolahannya, sebagai berikut:

**Tabel 4: Daftar rencana calon Lokasi SPALD-T Skala Perkotaan di 14 zona**

Lokasi SPALD-T Skala Perkotaan	Kapasitas	Luas area IPAL
Waduk Pluit	240.000 m <sup>3</sup> /hari	3,9 ha
Waduk Muara Angke	21.000 m <sup>3</sup> /hari	0,8 ha
Hutan Kota Srengseng	103.680 m <sup>3</sup> /hari	4 ha
IPLT Pulo Gebang	300.000 m <sup>3</sup> /hari	8,7 ha
Waduk Sunter Utara	129.600 m <sup>3</sup> /hari	4,6 ha
IPLT Duri Kosambi	282.000 m <sup>3</sup> /hari	6 ha
Rencana Waduk Kamal Pegadungan	69.120 m <sup>3</sup> /hari	3,9 ha
Rencana Waduk Marunda	160.000 m <sup>3</sup> /hari	6 ha
Rencana Waduk Rawa Rorotan	85.996 m <sup>3</sup> /hari	2,9 ha
IPLT Pulo Gebang	300.000 m <sup>3</sup> /hari	8,7 ha
Rencana Waduk Ulujami	252.572 m <sup>3</sup> /hari	5,9 ha
Kebun Binatang Ragunan	88.862 m <sup>3</sup> /hari	3,1 ha
Rencana Waduk Kampung Dukuh	168.596 m <sup>3</sup> /hari	5,7 ha
Rencana Waduk RW 05, Ceger	98.763 m <sup>3</sup> /hari	3,6 ha

**Jakarta menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan dan permukiman yang terdiri atas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan.**

Selain itu, program subsidi revitalisasi tangki septik rumah tangga juga menjadi program unggulan kolaborasi antara PD.PAL Jaya dan Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Tujuan dari program ini adalah tercapainya sanitasi yang layak bagi masyarakat Jakarta melalui perbaikan tangki septik rumah tangga. Hal ini disebabkan kondisi tangki septik rumah tangga di ratusan lokasi tersebut umumnya tidak kedap. Sehingga, perlu adanya revitalisasi untuk mencegah kebocoran yang selama ini terjadi. Subsidi revitalisasi tangki septik yang tersebar di 826 lokasi pada tahap I di tahun 2021.

Revitalisasi tangki septik di Jakarta Selatan direalisasikan di 298 lokasi, Jakarta Pusat sebanyak 376 lokasi dan Jakarta Timur berjumlah 152 lokasi. Untuk tahap 2, subsidi revitalisasi tangki septik dilakukan di 696 titik sehingga di tahun 2021 capaian menjadi 1522 penerima subsidi revitalisasi tangki septik. Dengan demikian, harapannya sistem ini dapat bertanggung jawab untuk membawa air limbah jauh dari rumah maupun industri tanpa mencemari lingkungan sekitar.

## Upaya Peningkatan Cakupan Air Bersih sebagai Hak Dasar Warga

Salah satu hak dasar warga untuk hidup adalah ketersediaan air bersih yang mencukupi. Hal ini juga tertuang dalam rencana aksi global *Sustainable Development Goals* yang ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Program penyediaan air bersih menjadi salah satu program utama mengingat tujuan utama dari program ini adalah cakupan pelayanan perpipaan air bersih yang dapat diakses semua warga dapat mencapai 100% di tahun 2030. Per tahun 2017, eksisting cakupan layanan air bersih sebesar 60% dan terjadi penambahan sebanyak 4% atau sekitar 400.000 warga yang terlayani hingga tahun 2021. Melansir dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) Pelayanan air bersih yang baik juga secara langsung berpengaruh terhadap isu permasalahan perkotaan lainnya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan air perpipaan maka ekstraksi air tanah akan semakin sedikit sehingga dapat mencegah terjadinya penurunan muka tanah. Secara langsung, pengadaan program air bersih ini juga mendorong penurunan biaya hidup masyarakat yang tidak terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan adanya kios-kios air sebagai alternatif opsi penjualan jerigen dengan harga terjangkau.

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih juga memiliki manfaat lain sesuai pernyataan dari *People Water Organization*, Krisis air dan sanitasi adalah 80% penyebab berbagai penyakit di dunia, sehingga masyarakat yang dengan mudah dapat mengakses dan membeli air bersih dipastikan dapat hidup lebih sehat. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyediaan air bersih kepada warga antara lain dengan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), penerbitan regulasi dan dokumen terkait air bersih, pelayanan air bersih di kampung prioritas serta nota kesepakatan antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI.

### Pembangunan IPA

Pembangunan IPA stasioner atau dengan jaringan perpipaan di kawasan dilakukan dengan memanfaatkan waduk yang mulanya difungsikan untuk menangani banjir menjadi alternatif sebagai sumber air baku agar dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Selain IPA stasioner, pembangunan IPA *mobile* juga dilakukan di 10 lokasi untuk dapat memfasilitasi warga di Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebagai daerah yang mayoritas belum memiliki sumber air yang mencukupi.

**Per tahun 2017, eksisting cakupan layanan air bersih sebesar 60% dan terjadi penambahan sebanyak 4% atau sekitar 400.000 warga yang terlayani hingga tahun 2021.**

**Tabel 5: Data Titik-titik lokasi IPA Stasioner yang telah dibangun**

Lokasi	Kapasitas (m <sup>3</sup> )
<b>IPA Tomang</b>	2 m <sup>3</sup>
Kelurahan Kedawung Kali Angke	5 m <sup>3</sup>
Kelurahan Kembangan Selatan	10 m <sup>3</sup>
Kelurahan Rawa Buaya	10 m <sup>3</sup>
Kelurahan Kembangan Utara	10 m <sup>3</sup>
Kelurahan Meruya Utara	10 m <sup>3</sup>
Kelurahan Srengseng	10 m <sup>3</sup>
Kelurahan Meruya Selatan	5 m <sup>3</sup>
Kelurahan Joglo	
<b>IPA Ancol</b>	
Kelurahan Pademangan Barat	10 m <sup>3</sup>
Kelurahan Ancol	5 m <sup>3</sup>

### Regulasi dan Dokumen terkait Air Bersih

Sebelumnya, Jakarta belum pernah memiliki rencana induk yang dikhususkan untuk penyediaan air minum. Setelah dilakukan transformasi secara organisasi di Dinas SDA, rencana jangka panjang pun disusun oleh bidang khusus terkait air bersih. Dokumen yang bernama Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum berisikan rencana yang menjadi acuan beserta program-program yang akan dilaksanakan sampai tahun 2030.

Regulasi-regulasi terkait air bersih pun juga didorong, mulai dari penunjukan PAM Jaya untuk menghentikan privatisasi air bersih di tahun 2023, subsidi air bersih, serta peraturan mengenai zona bebas air tanah.

### Dampak kebijakan regulasi yang diterbitkan terkait air bersih terhadap masyarakat Jakarta

Peraturan Gubernur yang telah terbit memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jakarta, salah satunya adalah Pergub No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah terbantunya biaya produksi air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau sehingga tidak membebani masyarakat, termasuk keseragaman tarif antar wilayah dan kota. Hal ini tertuang dalam Pergub No. 45 tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan air Minum dan Pergub No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air.



**Dampak lain yang ditimbulkan adalah terbantunya biaya produksi air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau sehingga tidak membebani masyarakat, termasuk keseragaman tarif antar wilayah dan kota.**

Dampak lainnya adalah meningkatnya pengendalian pengambilan air tanah yang kemudian mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan air tanah dan penurunan muka tanah di Jakarta dan pengambilalihan pengelolaan air minum dari mitra swasta kepada PAM.

#### **Pelayanan Air Bersih di Kampung Prioritas**

Penyambungan sistem air bersih perpipaan ke warga dengan persil yang tidak tertata dan tidak legal menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan akses air bersih. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah 11 tahun 1993 pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa dapat dibentuk regulasi turunan terkait tata cara penyambungan perpipaan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 untuk menjawab kebutuhan penyambungan sistem air bersih ke warga yang sifatnya sementara sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air minum untuk keseharian.

#### **Nota Kesepakatan antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI**

Sebuah terobosan baru yang mempertemukan Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI dalam penyediaan sistem air bersih. Jakarta dialiri oleh 13 sungai, namun pemanfaatan untuk diolah menjadi air minum masih harus melalui proses perizinan ke Kementerian PUPR. Untuk itu, kesepakatan pun dibuat antara Pemprov DKI, Kementerian PUPR, dan Kemenko Mervas untuk dapat mengajak swasta berpartisipasi secara terbatas dalam pembangunan IPA pada sungai pasca privatisasi selesai di tahun 2023.

Melihat banyaknya program air bersih di tahun 2021 tentunya tidak lepas dari peran TGUPP dalam upaya pencapaian program kepada masyarakat. Dimulai dari pemberian usulan dan inisiasi terhadap program, TGUPP juga berperan dalam mendampingi dinas terkait dalam menyusun regulasi terkait air bersih. Adanya nota kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat merupakan salah satu pencapaian TGUPP dalam ikut menyusun strategi, menjembatani dan menyatukan kepentingan dari masing-masing pihak. *Monitoring* terhadap program juga dilakukan untuk memastikan ketercapaian program-program yang telah disusun sejak awal tahun 2021 maupun sebelumnya. Tidak hanya dalam hal kebijakan, TGUPP juga berperan dalam menyusun strategi komunikasi dan menyebarkannya kepada publik.

**Proses transformasi terkait kelembagaan menjadi hal yang penting untuk menghadirkan “champion” di OPD untuk paham pentingnya air bersih sebagai salah satu hak dasar warga.**

Salah satu bentuk aktivasi maupun kegiatan komunikasi yang dilakukan adalah menginisiasi dilaksanakannya diskusi publik terkait subsidi air bersih, *launching* SPAM komunal Mookevert untuk dapat melayani dan meningkatkan cakupan air bersih untuk warga rusun, serta mengkomunikasikan terbitnya pergub penyambungan pipa air bersih di perkampungan yang menjadi perbincangan oleh publik. Sehingga, warga tahu dan sadar alasan dibalik pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

Di tahun 2022, akan terjadi transisi pengelolaan air bersih dengan 4 hal utama yang akan dicapai:

- Penyelesaian hasil kajian proses bisnis teknologi
- Transfer *knowledge* dan *shadow operation* melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta mengambil alih aplikasi atau teknologi yang digunakan oleh swasta menjadi milik pemerintah
- Penyediaan SDM kunci untuk mengidentifikasi SDM yang diunggulkan baik di swasta maupun di PAM Jaya
- Transformasi tim PMO di PAM Jaya dengan memastikan gap penyediaan pelayanan tidak terasa di masyarakat

Konstruksi penyediaan jaringan perpipaan di kampung prioritas Tanah Merah juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kampung. Selain itu, program-program yang sudah berjalan sejak 2021 dan sebelumnya terus dilanjutkan seperti konstruksi IPA dan penyediaan SPAM di beberapa lokasi.

Berdasarkan hal-hal yang terjadi di tahun 2021, salah satu hal yang dapat diambil hikmahnya dari proses ini adalah proses transformasi terkait kelembagaan menjadi hal yang penting untuk menghadirkan “*champion*” di OPD untuk paham pentingnya air bersih sebagai salah satu hak dasar warga. Privatisasi terhadap pengelolaan air bersih yang sebelumnya berjalan dapat dihentikan dan pengelolaannya dikembalikan di tahun 2023. Perlu perencanaan dan fondasi yang kuat untuk ditanamkan agar implementasi, pembiayaan, dan pembangunannya dapat dilakukan sesuai jadwal.

**Rencana Perpanjangan PKS antara PAM Jaya dan PT. Aetra Jakarta**

Hasil rapat di KPK RI dan pendapat KPK Ibukota dan Bidang Hukum terhadap Rencana Perpanjangan PKS antara PAM Jaya dan PT. Aetra Jakarta pada tanggal 21 April 2021, merekomendasikan untuk membatalkan rencana Addendum PKS antara PAM Jaya dan PT. Aetra Jakarta. Rapat mendukung pengelolaan mandiri oleh PAM Jaya sebagai bentuk ditegakkannya kedaulatan atas sumber daya air. Atas dasar rekomendasi tersebut, Gubernur mencabut Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 tentang persetujuan addendum perjanjian PKS antara PAM Jaya dengan mitra. Saat ini proses transisi pengelolaan dari swasta kembali kepada publik sedang berjalan. Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal pemenuhan hak atas air kepada warga kota Jakarta.

## Persampahan

*Perkuat kebijakan, dorong komunikasi yang menggerakkan.*

### Kondisi 2021

Tantangan sampah di Jakarta menawarkan pengalaman sekaligus pembelajaran tersendiri. Sebab, dalam isu ini, pengubahan perspektif “sampah adalah tanggung jawab bersama”, menjadi kunci utama guna mencapainya di 2021 ini. Aspirasi tersebut mendorong hadirnya identitas jenama “Jakarta Sadar Sampah.” Sesuai namanya, langkah ini diambil untuk mengawali perjalanan usaha kota menyadarkan seluruh elemen “sadar” dan ambil bagian di persampahan melalui tiga nilai: mengurangi, memilah, dan mengolah. Sebab, bertambahnya volume sampah tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga warga sebagai penghasil sampah itu sendiri. Jakarta Sadar Sampah juga diharapkan mampu menggeser penafsiran pengelolaan sampah yang agar tidak lagi sebatas “buang ke Bantargebang saja.”

Salah satu program turunan yang telah dijalankan yaitu program pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah, di mana sampah yang sudah dipilah dari rumah dipastikan tidak tercampur lagi ketika diangkut.

Dengan demikian, sampah bisa lebih mudah diolah sesuai dengan jenisnya. Rantai pengangkutan sampah dari rumah hingga tempat pengolahan dan Bantargebang melibatkan banyak pihak: rumah tangga, pengangkut sampah di setiap RW dan pengangkutan oleh truk dinas terkait. Pada tahun 2021, Jakarta melakukan sosialisasi, pendampingan, hingga pelaksanaan dan evaluasi keberjalanan program ini. Program ini telah diterapkan di 1369 RW hingga Desember 2021.

Selain itu, secara kebijakan, fokus tahun ini diarahkan pada pembuatan kebijakan turunan atas peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang telah tersedia beberapa tahun lalu. Hal ini agar seluruh fasilitas persampahan yang ada di Jakarta disediakan dengan kualitas yang setara, termasuk yang disediakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Adapun kebijakan yang dikeluarkan adalah :

1. Peraturan Gubernur no. 55 tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah
2. Peraturan Gubernur no. 102 tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
3. Peraturan Gubernur no. 95 tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah

*Untuk mereduksi sampah dalam jumlah besar, Jakarta juga meneruskan agenda pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di 4 titik kota, Refuse Derived Fuel (RDF) Plant, serta penambahan kapasitas landfill mining di kawasan Bantargebang.*

Lebih dari itu, selain upaya di atas, pergerakan masyarakat juga masuk dalam agenda. Tidak hanya di warga, tetapi juga di dunia usaha: Bagaimana sampah dikelola oleh pemilik. Sebab, sebelumnya aturan hanya mewajibkan pengolahan sampah area usaha sampai tahap “kumpul-angkut-buang” saja. Akibatnya, menumpuk di Bantargebang—sudah semakin penuh dengan empat (4) zona, tinggi 50 meter. Berdasarkan visi Gubernur, kebijakan tersebut dikaji ulang melalui penekanan peran “kawasan mandiri”: wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Sembari produk hukum disusun, kota melalui dinas lingkungan hidup (DLH) telah lakukan sosialisasi. Sehingga, bila perusahaan punya kendala terkait lahan kecil, didorong kolaborasi antarperusahaan lain.

Lebih lanjut, untuk mereduksi sampah dalam jumlah besar, Jakarta juga meneruskan agenda pembangunan *Intermediate Treatment Facility (ITF)* di 4 titik kota, *Refuse Derived Fuel (RDF) Plant*, serta penambahan kapasitas *landfill mining* di kawasan Bantargebang. Terkait ITF, upaya berfokus pada melengkapi pembiayaan ITF Sunter dan kajian ITF lainnya sesuai dengan target dan waktu yang telah disepakati sejak tahun 2019. Sedangkan untuk RDF dan *Landfill Mining*, tahun 2021 telah diselesaikan kajian dan pengadaan lahan pembangunannya. Kelak, ITF diharapkan mampu mengolah hingga 8.000 ton sampah per hari di dalam kota, sedangkan RDF dapat mengolah sampah untuk menghasilkan unsur pengganti bahan bakar batu bara dengan kapasitas hingga 1.000 ton per hari.



## Tantangan dan Respon

Bicara tantangan, pembangunan infrastruktur persampahan memerlukan dukungan kuat secara finansial. Namun, akibat *pagebluk* Covid-19, anggaran mengalami *refocusing* dan telah kembali berjalan pasca dukungan PEN. Pada sisi lain, sempat terjadi kendala di lingkup warga, yang semula mendapat uji coba pemilahan sampah rumah tangga, pada akhirnya dicampur lagi. Akan tetapi hal tersebut berhasil dikomunikasikan dan muncul sebuah inisiatif dari warga. Misalnya, pembuatan tong/tempat yang mendorong pemilahan. Ada pula penambahan fitur TPS3R: fasilitas khusus untuk mengolah sampah yang ada: Organik diolah jadi kompos, plastik, dan lain-lain.

## Akselerasi

Dalam mengakselerasi kinerja dan hasil, TGUPP hadir mendorong adanya percepatan dalam koordinasi bersama dengan dinas terkait lingkungan hidup (DLH). Hal tersebut, dituangkan dalam perumusan kegiatan strategis daerah (KSD). Selain itu, TGUPP turut hadir untuk melakukan *debottlenecking* langsung di tataran strategis, seperti halnya pematangan konsep pengangkutan sampah terjadwal dan alternatif pembiayaan infrastruktur persampahan seperti melalui pengawalan pemenuhan pembiayaan PEN maupun konsep pinjaman untuk BUMD.

## Bagaimana warga menangkap keberhasilan ini?

Hasil dari komunikasi dan program sosialisasi yang dilakukan selama ini, telah memicu ragam warga untuk melakukan hal serupa: turut memilah sampah meski tidak masuk wilayah percontohan, ataupun turut mengolah sampahnya secara mandiri.

## Strategi ke depan?

Sebagai solusi masif, penyelesaian pembangunan RDF dan *Landfill Mining* diharapkan bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022. Selain itu, dukungan pendanaan dan penyelesaian persiapan ITF Sunter dan ITF lainnya yang sedang dalam tahap kajian dapat segera dituntaskan. 2022 juga menargetkan peningkatan kapasitas TPS3R ( 15 Titik dengan kapasitas 10 - 60 ton per hari), selesai.

Seiring upaya di atas, Jakarta Sadar Sampah juga diharapkan bisa menggerakkan semakin banyak warga, komunitas, hingga dunia usaha untuk turut berkontribusi nyata dalam menyelesaikan isu persampahan, utamanya dalam program pemilahan dan pengolahan sampah mandiri. Upaya tersebut didorong melalui komunikasi yang menggaungkan kembali semangat gotong royong menyelesaikan isu persampahan beserta keberhasilan bersama yang telah diraih.



## Aksi Perubahan Iklim & Pengendalian Kualitas Udara

*Menuju Jakarta rendah emisi*

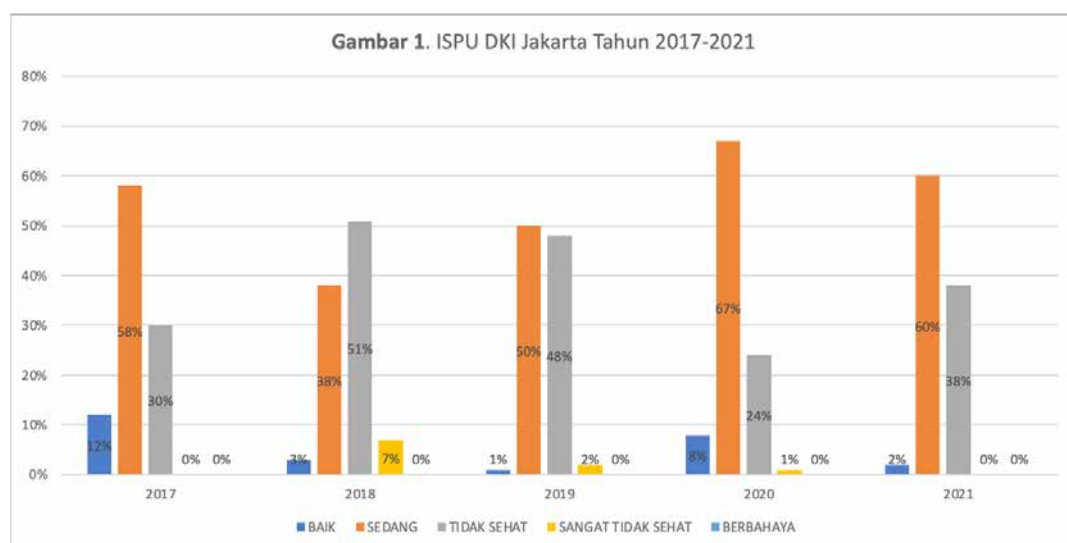
### Tentang Aksi Perubahan Iklim & Pengendalian Kualitas Udara

Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang tengah dibahas di seluruh dunia. Salah satu cara untuk memitigasi krisis iklim adalah dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Jakarta memiliki komitmen untuk melakukan percepatan pencapaian target pengurangan emisi GRK sebesar 30 persen dan mampu mengurangi emisi GRK langsung sebesar 50 persen pada tahun 2030, serta *net zero emission* pada tahun 2050. Pada tahun 2018, penurunan emisi gas rumah kaca telah mencapai 26%.

Selain itu, Jakarta juga telah mempersiapkan berbagai rencana aksi dalam adaptasi perubahan iklim. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, khususnya masyarakat rentan, dalam menghadapi perubahan iklim.

Tolak ukur yang digunakan untuk adaptasi perubahan iklim adalah pengurangan kawasan yang memiliki kerentanan tinggi dan sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Jakarta menargetkan agar pada tahun 2030, tidak ada lagi kawasan yang rentan dan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Di samping itu, Jakarta juga berupaya dalam pengendalian pencemaran udara. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi perbaikan kualitas udara di Jakarta yang ditandai dengan penambahan jumlah hari dengan kualitas udara baik dan sedang yang disertai dengan pengurangan jumlah hari dengan kualitas udara tidak sehat (lihat Gambar 1).



**Gambar 7: Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) DKI Jakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

## Pengarusutamaan Aksi Iklim di Jakarta agar terus Berkelanjutan

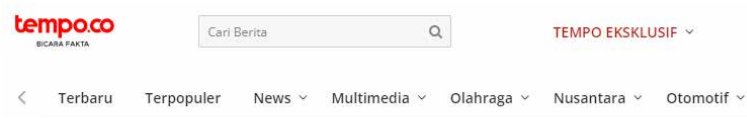
Percepatan aksi perubahan iklim di Jakarta memerlukan kerja bersama berbagai Perangkat Daerah hingga pelibatan pemangku kepentingan terkait termasuk warga Jakarta. Mengingat pentingnya hal ini, pengarusutamaan aksi iklim Jakarta dimulai dengan menghadirkan **Kegiatan Strategis Daerah tentang Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim**.

Penguatan institusi untuk pengendalian potensi bencana iklim di Jakarta turut diperkuat dalam pembentukan **Tim Kerja Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim** yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 90 Tahun 2020.

Berbagai upaya pengarusutamaan terus didorong hingga tahun 2021, salah satunya melalui **Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengendalian Dampak Bencana Iklim**. Instruksi Gubernur ini mencakup amanat kepada berbagai Perangkat Daerah untuk melakukan aksi terkait mitigasi serta adaptasi dan pengurangan risiko bencana iklim di Jakarta.

Memastikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memiliki landasan hukum sebagai acuan pelaksanaan merupakan tujuan dari hadirnya **Peraturan Gubernur No. 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD)**. Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu pencapaian signifikan bagi Jakarta karena menjadi pelopor, yaitu provinsi pertama di Indonesia, yang mempunyai RPRKD sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Mimpi besar RPRKD ialah agar penataan pembangunan kota Jakarta yang berketahanan iklim semakin terarah.

Pada tahun 2021, Jakarta juga berkesempatan untuk menyampaikan langkah-langkahnya dalam aksi perubahan iklim dalam ajang internasional, yaitu *the 26th UN Climate Change Conference of the Parties* (COP 26).



Beranda > Nasional

### Menuju Jakarta Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Selasa, 2 November 2021 12:11 WIB



Gambar 8: [Potongan berita] | Sumber: Tempo.co.id



**Foto 26: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh TGUPP mempresentasikan RPRKD di forum COP 26.**

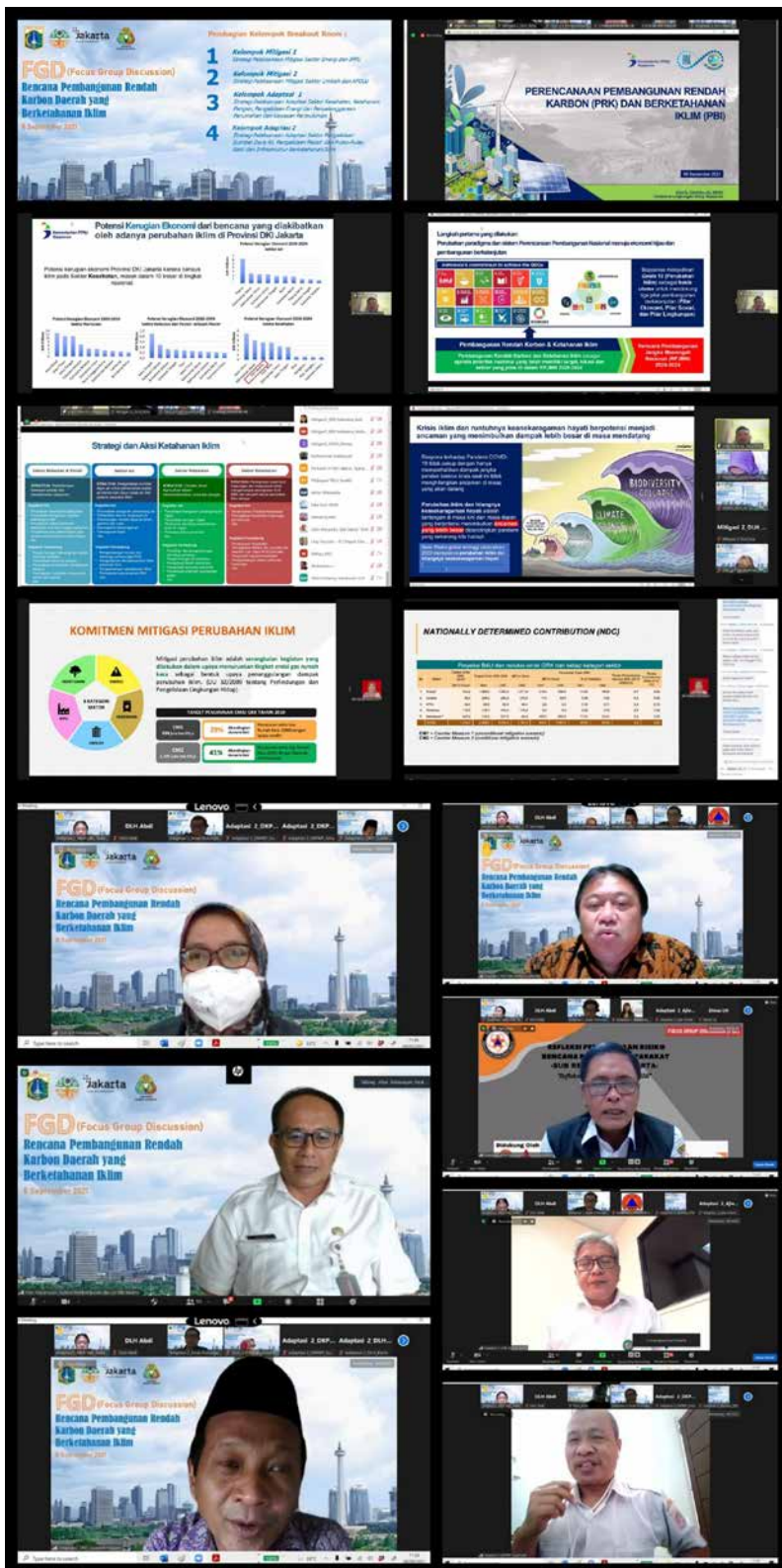
Sumber: Dokumentasi TGUPP.



**Foto 27: Situasi di COP 26. | Sumber: Dokumentasi TGUPP.**







**Gambar 9: Diskusi publik mengenai RPRKD**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

TGUPP berperan dalam pencapaian berbagai keluaran di tahun 2021 dimulai dengan mengejar pembaharuan, salah satunya ialah mendorong perbaikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK) tahun 2012. Perbaikan ini menekankan pada relevansi aksi dengan kondisi dan upaya terkini, memasukkan bagian terkait adaptasi perubahan iklim, serta juga penyesuaian target sesuai dengan mandat RPJMN dan SDGs.

TGUPP terus berupaya mencari celah perbaikan dan penyempurnaan, juga menginisiasi usulan solusinya. Dalam prosesnya, bersama dengan Perangkat Daerah terkait, TGUPP juga mendorong tahap penyusunan dokumen hingga pencapaian rencana aksi yang partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan maupun masyarakat secara umum, juga tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### Pelbagai Upaya Pengendalian Kualitas Udara

Mewujudkan Jakarta Langit Biru, berbagai upaya perbaikan kualitas udara terus berlanjut mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Sebagai contoh adalah mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki, peremajaan angkutan umum, mengoptimalkan penghijauan pada sarana prasarana dan mendorong adopsi prinsip *green building*, serta berbagai upaya lainnya.

### Agenda ke depan

RPRKD merupakan *legacy* yang baik untuk acuan pembangunan Jakarta hingga tahun 2030. Dengan hadirnya RPRKD, upaya selanjutnya yang diperlukan adalah memastikan implementasi berbagai rencana aksi di lapangan, terus menjaring ko-kreator untuk mewujudkan pembangunan Jakarta rendah karbon, hingga juga meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait untuk merencanakan pembangunan Jakarta berbasis target reduksi karbon.

Selain itu, kini Jakarta sedang menyusun *Grand Design* Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) sebagai dokumen strategis dan peta jalan pengendalian kualitas udara. Hal ini sebagai tindak lanjut putusan pengadilan atas gugatan warga negara terhadap kualitas udara di Jakarta. GDPPU ini juga akan diterbitkan dalam produk hukum resmi Pemprov DKI Jakarta.

### Hikmah Pembelajaran

➤ Pentingnya skala prioritas dalam menyeimbangkan pembangunan Jakarta ke depan. Sebagai contoh, berbagai upaya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang manfaatnya sangat baik, terkadang belum diprioritaskan dalam penganggaran apabila disandingkan dengan program/kegiatan yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, misalnya bantuan sosial. Hal ini dikarenakan dampak dari upaya pengendalian perubahan iklim membutuhkan waktu yang lebih panjang sebelum dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat.



## Bus Listrik & Zona Rendah Emisi

### *Upaya percontohan menuju Jakarta rendah karbon*

Sebagai upaya untuk mencapai komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, kini Jakarta tengah menerapkan percontohan pemberlakuan *Low Emission Zone* (LEZ) atau Zona Rendah Emisi dan elektrifikasi armada angkutan umum.

### Zona Rendah Emisi

Jakarta mengikuti langkah berbagai kota-kota maju di dunia yang menerapkan Zona Rendah Emisi. Kawasan Kota Tua Jakarta ditetapkan sebagai Zona Rendah Emisi sejak 8 Februari 2021. Dengan pemberlakuan ini, hanya pejalan kaki, pesepeda, transportasi umum dan kendaraan berstiker khusus rendah emisi yang boleh melintasi Kawasan Kota Tua.

Keberlanjutan implementasi Zona Rendah Emisi di Jakarta dalam proses pengkajian baik dari dampak lingkungan maupun dampak non lingkungan, misalnya perekonomian/ pariwisata kawasan tersebut. Ke depannya, penyempurnaan implementasi Zona Rendah Emisi ini akan turut serta dalam rencana pengembangan kawasan Kota Tua secara holistik.

Tidak hanya itu, proses pengkajian juga tengah dilakukan untuk mengadaptasi implementasi Zona Rendah Emisi di kawasan lainnya di Jakarta. Kajian ini berkolaborasi bersama WRI Indonesia, yang juga sebelumnya telah membantu DKI Jakarta dalam mengevaluasi persepsi publik dan media terhadap pelaksanaan Zona Rendah Emisi di Kota Tua.

### Bus Listrik

Elektrifikasi armada angkutan umum merupakan tahap terakhir dari paradigma manajemen transportasi berkelanjutan yang terdiri dari *avoid - shift - improve*. Setelah mendorong pengurangan pergerakan salah satunya melalui *Transit Oriented Development* (TOD) dan perubahan sistem transportasi dengan integrasi antarmoda yaitu JakLingko, selanjutnya ialah menghadirkan armada angkutan umum berbasis listrik.



**Foto 28: Uji Coba Bus Listrik**

Sumber: Reza, Berita Jakarta



Foto 29: Bus Listrik TransJakarta | Sumber: Nugoroho Sejati, Berita Jakarta

**Target ke depan untuk elektrifikasi angkutan umum di Jakarta ialah mengganti separuh armada bus TransJakarta menjadi armada listrik secara bertahap dan selesai pada tahun 2025.**

Elektrifikasi armada angkutan umum dilakukan melalui operasional bus listrik TransJakarta. Kini, hingga tahun 2021 telah dilaksanakan uji coba sebanyak 3 unit dengan 3 tipe yang berbeda selama 3 bulan dengan total jarak tempuh mencapai 51.000 km dan penyelesaian seluruh keperluan administrasi untuk pengoperasian bus listrik pada rute TransJakarta. Dalam mempersiapkan operasional bus listrik, DKI Jakarta mendapatkan bantuan teknis dari berbagai pihak, diantaranya UN *Environment Programme* (UNEP), C40, dan Kedutaan Besar Inggris.

Bersama dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait, TGUPP hadir sejak proses lahirnya inisiatif akan elektrifikasi armada angkutan umum sejak tahun 2019. Dalam proses yang berjalan, TGUPP juga turut serta menjaring dan menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, salah satunya berbuah berupa perolehan hibah/*funding*.

Target ke depan untuk elektrifikasi angkutan umum di Jakarta ialah mengganti separuh armada bus TransJakarta menjadi armada listrik secara bertahap dan selesai pada tahun 2025. Target ini merupakan salah satu upaya perwujudan komitmen Jakarta untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 30 persen dan mampu mengurangi emisi GRK langsung sebesar 50 persen pada tahun 2030, serta *net zero emission* pada tahun 2050.

## Transformasi Digital

*Hadirkan pelayanan publik yang prima melalui transformasi digital*

### Tentang Transformasi Digital

Gagasan transformasi digital tidak hanya mencakup cara kerja internal pemerintah, tetapi juga bagaimana agar terasa langsung oleh masyarakat, termasuk yang utama terkait perekonomian.

Pertama, dimulai dari transformasi digital dalam lingkup cara kerja pemerintah, diantaranya bagaimana menyempurnakan sistem dan data yang terintegrasi, setelah selama ini setiap sektor memiliki data dan sistem masing-masing. Transformasi ini juga mengubah cara pandang pemerintah menjadi berorientasi pada pengguna.

Beberapa aksi nyatanya ialah aplikasi **Jakarta Kini (JAKI)**, yang terus didorong menjadi satu *platform* untuk seluruh layanan untuk warga Jakarta. Kemudian sistem **E-Office** dan **E-Produk Hukum** yang mendigitalisasi proses surat menyurat dan perbal yang selama ini berjalan manual. Selain itu, juga dilakukan pembenahan tata kelola, proses bisnis, hingga sumber daya manusia yang dapat mendukung kelancaran dan keberlanjutan transformasi digital.

Kedua, mendorong transformasi digital dapat terasa oleh seluruh masyarakat, yaitu dengan menghadirkan lebih dari 14.677 titik (penambahan 2.300 titik di tahun 2021) JakWifi yang tersedia di lingkungan pemukiman.

Hadirnya **JakWifi** ini diharapkan dapat membantu warga Jakarta beraktivitas, misalnya untuk siswa selama pembelajaran jarak jauh maupun para wirausaha atau UMKM yang ingin berjualan *online*. Hadirnya **Digital ID** bagi warga Jakarta, dimulai dengan menargetkan para penerima manfaat bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta. Mimpi besar Digital ID ialah warga memiliki akun seperti KTP Digital yang memuat berbagai informasi terutama terkait pelayanan yang *personalized* sesuai kebutuhan masing-masing.

Ketiga, ikut serta dalam perkembangan ekonomi digital yang bertumbuh pesat beberapa waktu terakhir, termasuk melaksanakan amanat dari Pemerintah Pusat. Beberapa contoh aksi yang dilakukan diantaranya terkait digitalisasi proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung relaksasi pengajuan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Pada penerimaan PAD, melalui Badan Pendapatan Daerah, dilakukan digitalisasi terintegrasi dengan JAKI, notifikasi via SMS hingga *platform* pembayaran yang bekerja sama dengan bank, *e-commerce*, hingga minimarket. Dukungan sistem untuk program relaksasi IUMK dengan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) oleh DPMPSTSP, berhasil menerbitkan lebih dari 250 ribu IUMK selama periode tahun 2020 hingga 2021, meningkat lebih dari 750% dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

### Pandemi Mengakselerasi

Pandemi Covid-19 yang mengubah cara berinteraksi warga, misalnya bekerja dari rumah, pembelajaran jarak jauh, *physical distancing*, justru menjadi katalisator perwujudan transformasi digital.

Salah satu bentuk nyata pesatnya perwujudan transformasi digital di Jakarta selama pandemi adalah hadirnya [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id), situs yang memuat berbagai informasi terkait situasi Covid-19 dan upaya penanganannya di Jakarta hingga berbagai fitur registrasi dan reservasi layanan, contohnya untuk vaksinasi Covid-19. Situs ini telah aktif menjadi rujukan berbagai pihak, saat ini telah mencapai lebih dari 57 juta pengunjung.<sup>3</sup> Lebih dari sekadar situs, [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id) adalah bentuk nyata penuangan prinsip penanganan pandemi maupun secara lebih luas prinsip pengambilan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yaitu transparan, kolaboratif dan berlandaskan sains.

TGUPP memanfaatkan momentum ini dimulai dengan memastikan lintas OPD di Pemprov DKI Jakarta bergerak bersama mewujudkan berbagai target rencana aksi. Mengingat, tanggung jawab akan transformasi ini berada di seluruh lini Pemprov DKI Jakarta, tidak hanya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Hal ini tertuang dalam instrumen Instruksi Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital, yang diperkuat



**Foto 30: Jakarta Smart City Monitoring Room**

Sumber: Jakarta Smart City

dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 1251 tahun 2021 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital. Kedua instrumen ini juga telah disinkronkan dengan arah dan rencana aksi dari Pemerintah Pusat.

<sup>3</sup> [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id) per 14 Februari 2022 pukul 18.15







Terkait regulasi pendukung transformasi digital, juga terbit Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2021 tentang Perluasan Akses Internet bagi Masyarakat. Salah satu norma utama dalam Pergub ini adalah penyediaan JakWifi dapat dilakukan dengan memanfaatkan APBD maupun dengan skema kolaborasi.

Selain menjadi mitra diskusi dalam menginisiasi gagasan dan memastikan tersedianya instrumen percepatan dan regulasi acuan, TGUPP juga turut serta memantau ketercapaian target rencana aksi sesuai dengan amanat dalam Ingub, Kepgub maupun arahan Gubernur dalam Rapat Pimpinan Gubernur terkait transformasi digital yang dilaksanakan secara berkala.

Bentuk pemantauan yang dilakukan salah satunya ialah capaian rencana aksi akan gagasan seluruh layanan untuk warga Jakarta terintegrasi di aplikasi JAKI. Di tahun 2021, tersedia 6 fitur baru di aplikasi JAKI yaitu:

1. **Cek status penerima manfaat**  
Kartu Jakarta pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
2. **JakOne Pay**, pembayaran digital dari Bank DKI
3. **JakEvo**, proses pengurusan berbagai dokumen perizinan dan non perizinan di Jakarta
4. **Antrean Online Fasilitas Kesehatan**, nomor antrian Puskesmas dan RS Daerah Jakarta
5. **JakPeta**, informasi akan fasilitas umum terdekat termasuk taman, RPTRA, sarana olahraga, transportasi umum terdekat seperti halte TJ, stasiun MRT dan LRT, hingga fasilitas kesehatan terdekat termasuk Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik
6. **JakEmisi**, perhitungan emisi dari aktivitas sehari-hari





Foto 31: AICT 2021 | Sumber: Jakarta Smart City

Berbagai fitur tersebut bertujuan untuk memudahkan warga Jakarta memperoleh berbagai layanan untuk masyarakat yang dapat diakses dari jarak jauh. Pendekatan akan digitalisasi layanan yang digagas tidak hanya menyiapkan sistem, tetapi juga memastikan hingga petugas di lapangan yang langsung berinteraksi dengan warga memahami dan siap menjalani digitalisasi pelayanan tersebut.

form, diantaranya terpilih sebagai Top 5 dalam kategori *E-Government* dan mendapatkan penghargaan *Champion Project* pada kompetisi dunia *World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2021* dan kategori *Best in Future of Digital Innovation* dalam ajang *IDC Future Enterprise Awards* tahun 2021. Berbagai penghargaan diterima oleh Pemprov DKI Jakarta, baik untuk aplikasi JAKI, *Jakarta Smart City* maupun Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku motor penggerak utama transformasi digital. Hingga saat ini, JAKI sudah diunduh sebanyak 2,6 juta pengguna.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Dashboard internal pengguna JAKI dari Playstore dan Appstore, Februari 2022.



## Agenda ke Depan

### Memastikan Transformasi Digital berkelanjutan

Di tahun-tahun selanjutnya, diharapkan Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital yang telah diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1251 tahun 2021 dapat terus bergerak mewujudkan berbagai rencana aksi. *Monitoring* ketercapaian juga dapat dilaksanakan berbasis rencana aksi pada masing-masing kelompok kerja yang telah diamanatkan.

Beberapa regulasi yang saat ini masih berproses diharapkan dapat segera terbit agar menjadi acuan yang memperkuat perwujudan transformasi digital ke depan, yaitu Peraturan Gubernur terkait Satu Data dan Peraturan Gubernur terkait Rencana Induk Teknologi, Informasi dan komunikasi (RITIK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta terkait transformasi digital juga diharapkan terus berlanjut sebagai salah satu bentuk percontohan yang dapat diimplementasikan pada proyek-proyek lainnya.

Ke depannya, transformasi digital juga akan terus diwujudkan lebih luas dari perubahan cara kerja dan pelayanan Pemprov DKI Jakarta. Pada sektor pendidikan, perlu menjawab bagaimana cetak biru pendidikan Jakarta ke depan dengan berbagai tantangan masa depan dunia kerja, terutama pesatnya digitalisasi dan industri 4.0. Selain itu, juga bagaimana meningkatkan literasi digital warga Jakarta di tengah masifnya informasi di dunia digital saat ini, bagaimana memastikan warga Jakarta terhindar dari informasi *hoax*. Pada sektor ekonomi, perlu menjawab bagaimana memfasilitasi dan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital sebagai pendongkrak utama perekonomian kota Jakarta hingga mengeksplor menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

### Belajar dari proses yang terjadi

- Tantangan akan transformasi adalah ketersediaan sumber daya, termasuk kapasitas dan komitmen sumber daya manusia yang terlibat.
- Kolaborasi menjadi kunci terwujudnya berbagai hal transformatif, baik kerja bersama antar instansi di dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta maupun dengan para mitra ko-kreator.
- Hadirnya pandemi membuat Jakarta belajar bahwa di kondisi krisis, berbagai perubahan bisa dan bahkan cepat terjadi.

## Manajemen Kerja, Meritokrasi kualitas Kinerja Pemerintah

*Meningkatkan kualitas kerja, sebagai abdi negara*

### Peranan krusial, jadi dasar.

Sebagai abdi negara sekaligus “mesin penggerak”, tugas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dan punya dampak tersendiri. Utamanya, dalam jalan pemerintahan lewat visi dan misi yang ditetapkan. Oleh karenanya, menjadi penting, bagaimana setiap individu menyadari hal tersebut. Jakarta pun berfokus pada pengawasan sekaligus pengembangannya.

Guna mencapai semangat di atas, lewat visi Gubernur, Jakarta memulai pengembangan kualitas kerja lewat indikatornya. Hal ini, dimulai dengan budaya transisi makro: semula, untuk mencapai suatu keberhasilan, dilihat pemenuhan “instruksi atas-bawah”, tetapi berubah jadi pencapaian atau target yang disepakati bersama. Dengan demikian, tolok ukur semakin berbasis data dan merata. Pengawasan hingga kenaikan jabatan pun, dapat dilakukan secara intensif dan sistematis. Terpenting, objektif.

### Personal, organisasi, hingga kolaborasi.

Inisiatif yang sudah bergerak sejak tahun 2018 ini, telah menghasilkan ragam hal: pembuatan regulasi, menyusun target sesuai regulasi dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) secara makro hingga dijabarkan dalam perjanjian kinerja (perkin) tahunan. Pengawasannya sendiri, dilakukan secara sistematis dalam basis digital. Lebih dari itu, semangat kolaborasi juga muncul lewat kebijakan yang kolaboratif. Sebagai contoh, dalam membuat suatu rencana, tidak hanya berfokus pada satu OPD, tetapi lebih besar (yang terkait).

Pada lain sisi, secara mikro, melalui BPSDM-dinas yang fokus pada pengembangan SDM, Jakarta juga aktif meningkatkan kemampuan diri ASN melalui ragam pelatihan. Pada 2021, inisiatif ini terus digencarkan, meski beberapa terhambat karena pandemi Covid-19.



*Hal ini, dimulai dengan budaya transisi makro: semula, untuk mencapai suatu keberhasilan, dilihat pemenuhan “instruksi atas-bawah”, tetapi berubah jadi pencapaian atau target yang disepakati bersama.*

#### **Tantangan jadi peluang.**

Bicara soal tantangan, dalam perjalanannya, adanya *refocusing* anggaran karena Pandemi Covid-19 menghambat proses pencapaian dan kinerja masing-masing OPD. Lebih dari itu, keterbatasan mobilitas dan juga pertemuan secara fisik juga membuat proses kerja menjadi terbentur. Meski demikian, tantangan ini menghadirkan suatu pergeseran tambahan untuk adaptif pada perkembangan digital.

#### **Internalisasi budaya dan percepatannya.**

Dalam mewujudkan sekaligus menjaga ragam prosesnya, TGUPP secara keseluruhan hadir menerjemahkan hal visi Gubernur melalui kebijakan regulasi. Selain itu, peran aktif juga dilakukan dengan mendorong adanya internalisasi budaya kerja di lapangan. Lebih lanjut, keterlibatan dalam penempatan *leader* terbaik juga menjadi faktor yang terus dijaga, agar kualitas organisasi terus meningkat, sehingga membawa dampak positif untuk Jakarta.

## Walikota

*Tingkatkan peran dalam pembangunan kota*

### Tak sekedar administratif.

Kehadiran Walikota dalam struktur pemerintahan kota Jakarta terasa berbeda bila dibandingkan dengan kota lain. Sebab, ia dipilih langsung oleh Gubernur tanpa adanya pemilihan dari warga. Oleh karenanya, jabatan ini bersifat administratif dan dalam perjalanannya kerap berhubungan pada koordinasi dan laporan. Namun, tidak untuk saat ini. Melalui peranan dan upaya sejak beberapa waktu, langkah walikota semakin didorong untuk mengorkestrasi sekaligus menghasilkan tindakan nyata, utamanya dalam pembangunan.

### Fokus 2021.

Dalam menjalankan amanatnya, Jakarta berupaya mendorong peranan lebih dari walikota. Hal tersebut, tercermin lewat upaya pelaksanaan penataan kawasan yang diinisiasi oleh Walikota/Bupati sebagai *leading actors*. Artinya, dalam proses tersebut, kolaborasi yang terjadi, sepenuhnya ditinjau langsung oleh walikota. Misalnya, dalam mengelola *stakeholders* dan percepatan eksekusi program pembangunan di wilayah. Namun, adanya efisiensi anggaran pasca pandemi, membuat Jakarta berfokus memaksimalkan peran *active supporting actors*. Sehingga, ragam usaha ini dilaksanakan dengan skema kolaborasi (Non-APBD).

### Langkah TGUPP.

Agar orkestrasi bisa berjalan baik, TGUPP kembali hadir menerjemahkan visi Gubernur untuk membentuk suatu pola hubungan kerja dan aturan main (regulasi) agar peran dari Walikota bisa menyala tanpa bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Misal, menghadirkan pola kerja kolaborasi dalam penataan kawasan, satgas Covid-19, penanganan banjir, dan lain-lain. Walikota dan Bupati sendiri juga mendapat peningkatan peran. Salah satunya, berhak untuk melakukan verifikasi kinerja suku dinas wilayahnya.

Lebih dari itu, TGUPP melalui Bidang Respon Strategis juga terus mendorong dan memonitor implementasi cepat respon masyarakat oleh aparat kewilayahan hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti baik aduan maupun kebutuhan masyarakat, misalnya temuan pohon tumbang, parkir liar atau pun laporan kondisi gawat darurat.



### **Potret Keberhasilan bagi Warga.**

Lewat langkah tersebut, ragam potret tercermin melalui pelbagai peristiwa yang bisa dirasakan masyarakat: pendekatan warga terhadap pembangunan Kampung Aquarium, koordinasi penataan kawasan, dan lainnya. Hasil dari peningkatan ini juga memberi dampak dalam kesiapsiagaan wilayah terhadap kebencanaan-maupun pengendalian/mitigasinya (misalnya, optimalisasi pembangunan sumur resapan). Lebih dari itu, pada tingkat kelurahan, sudah terbangun instalasi mural jenama kota “+Jakarta.”

### **Langkah ke depan.**

Agar ragam upaya yang sudah dilakukan dapat terus terlaksana, TGUPP terus melakukan peningkatan pola kerja dengan pendekatan paradigma kolaboratif. Hal tersebut, diterapkan dalam fokus pembangunan wilayah masing-masing (misalnya, pasar baru, dan lain-lain). Sehingga, muncul pengembangan peran wilayah yang lebih aktif dalam mendukung pembangunan prioritas di wilayah kawasan masing-masing (penataan kampung, pengendalian banjir, aktivasi kawasan pariwisata, dan lain-lain).

### **Perlu dijaga.**

*Transfer knowledge* menjadi satu kunci penting agar pola ini bisa terus berkelanjutan. Sebab, dinamika perubahan dan pemugaran struktur organisasi berpotensi terjadi kapan saja. Oleh karena itu, menjadi penting bagi setiap lembaga wilayah untuk mendorong penyerapan kultur kerja kolaboratif sesuai dengan apa yang sudah dilakukan kepada walikota sebagai kepala administratif.

*Ragam potret tercermin melalui pelbagai peristiwa yang bisa dirasakan masyarakat: pendekatan warga terhadap pembangunan Kampung Aquarium, koordinasi penataan kawasan, dan lainnya.*

### **Gambaran umum**

Dalam menjalankan tatanan pemerintahan, diperlukan ragam instrumen kebijakan untuk menjawab pelbagai tantangan dan persoalan kota. Hal ini, sudah menjadi tugas dari pemerintah sebagai pemilik otoritas. Namun demikian, tidak berlaku dalam sistem pemerintahan 4.0 yang melibatkan warga sebagai *co-creator*. Oleh karenanya, muncul suatu inisiasi dan visi membentuk suatu wadah bagi warga mempelajari, memahami, bahkan mengkritisi produk maupun proses pembentukan kebijakan. Semangat ini melahirkan *Jakarta Public Policy Center* (JPPC) sebagai bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

### **Dorong masukan dan kritik**

Hadirnya JPPC, menjadi terjemahan dari visi Gubernur untuk membentuk sebuah wadah yang mampu melibatkan warga dalam menelisik proses pembentukan suatu kebijakan. Lebih lanjut, secara teknis JPPC juga berusaha mendorong adanya inisiatif sekaligus inventarisasi kebijakan yang diproduksi oleh ASN dengan diperkaya masukan, telaah, serta transfer ilmu dari para praktisi dan ahli yang menjadi kolaborator Pemprov DKI Jakarta (*Knowledge Management and Knowledge Repository*).

### **Bicara 2021:**

#### **keterbukaan dan keterlibatan.**

Sejak 2019, perkembangan JPPC dapat terus diupayakan. Meski, dalam prosesnya terdapat ragam tantangan tersendiri. Sebab, inisiatif ini baru secara resmi dioperasionalkan pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 sudah melanda tanah air. Namun, perlahan tapi pasti, sampai dengan 2021, ragam inisiatif pun mulai digalakkan: pelatihan bersama pakar, diskusi dalam webinar, sinier 'Rabu Belajar' untuk ASN internal, studi banding Pemerintah Daerah, riset, dan lain-lain. Fokus dari JPPC juga berkembang dengan berupaya memfasilitasi penelitian dengan ketersediaan data, utamanya dalam topik Covid-19. Hal tersebut, dilihat dengan memastikan adanya keterbukaan. Sejauh ini, sudah 51 peneliti yang terlibat. Lebih lanjut, JPPC juga memantik suatu kolaborasi bersama dengan *University of Maryland* untuk melakukan pelatihan pengembangan riset. Upaya ini, dilakukan agar kapasitas SDM ASN semakin meningkat dalam skala global. Pembangunan jejaring bersama ahli dan pakar juga dilakukan, terlihat dalam keterlibatan JPPC di Festival Kolaborasi Jakarta, Desember lalu dalam mata acara diskusi publik.



Gambar 10: Poster Acara JPPC

Sumber: JPPC

### Peran dan tantangan

Dalam prosesnya, TGUPP berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus pemantik visi Gubernur dalam lingkup dinas. Meski target pada 2022 masih belum terpetakan pasti, tetapi sebuah pembelajaran dapat dipetik selama perjalanan satu tahun terakhir: ketersediaan SDM yang fokus pada pengembangan JPPC. Dengan demikian, kualitas dapat terjaga, dan terpenting, muncul suatu peta dan arah besar dari semangat JPPC untuk membuka kesempatan serta keterlibatan warga dalam kebijakan.

*Hadirnya JPPC, menjadi terjemahan dari visi Gubernur untuk membentuk sebuah wadah yang mampu melibatkan warga dalam menelisik proses pembentukan suatu kebijakan.*

## Jakarta Investment Center

*Pelayanan terintegrasi, perkuat investasi*

### Gerbang terdepan

Sebagai pusat ekonomi nasional bertaraf global, Jakarta memiliki peluang serta daya untuk menawarkan ragam potensi investasi yang besar, terutama guna mendukung infrastruktur dan fasilitas publik di Jakarta. Hal tersebut, dilihat oleh Pemerintah Jakarta sebagai suatu dasar pentingnya eskalasi peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan kredibilitas sebagai “gerbang terdepan.” Visi untuk meningkatkan kegiatan investasi berkelanjutan dan berdampak baik bagi warga diterjemahkan dalam pembentukan unit pelayanan teknis (UPT) bernama *Jakarta Investment Center* (JIC). Harapannya, kehadiran JIC mampu memudahkan investor mendapatkan informasi peluang investasi di Jakarta. Lebih dari itu, mampu menghadirkan suatu potensi investasi yang mampu meningkatkan pembangunan dan perkembangan kota.

### 2021

Sebagai *front end*, JIC berperan penting mendorong sekaligus berkoordinasi dengan seluruh unsur perangkat daerah terkait guna membuka pelbagai potensi investasi untuk memenuhi visi pembangunan kota yang terarah pada *urban health, mobility, tourism*, dan *urban sustainability*. JIC juga ambil bagian dalam membantu para investor untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah.

Secara rinci, fokus dari JIC di tahun 2021 terbagi dalam dua hal: promosi dan *re-branding* JIC. Pada sisi promosi, JIC telah berhasil menghadirkan *Jakarta Investment Forum* (JIF) pertama di tahun 2021 sebagai penyampai pesan kapabilitas dan kredibilitas Jakarta di mata dunia, serta mempertemukan investor bersama perangkat daerah terkait akan pembahasan kesempatan investasi di Jakarta. Selanjutnya, agar pengembangan peranan JIC mampu dilihat memiliki kredibilitas dan citra yang semakin positif, dilakukan penjenamaan ulang melalui visual logo, warna, dan lain-lain. Usaha tersebut juga dilakukan seiring kegiatan JIC untuk melakukan diskusi bersama ragam pihak.



### Tantangan dan peluang

Pagebluk Covid-19 sejatinya memberi dampak pada ragam sektor, tetapi juga memberi peluang baru bagi JIC sebagai representasi pemerintah provinsi dalam menawarkan potensi dan kepastian investasi. Sebab, pandemi membuat ragam kondisi dan potensi usaha menjadi serba tidak pasti. Pada hal tersebutlah, JIC secara intensif melakukan komunikasi dan negosiasi dengan ragam pihak melalui pelbagai hal: fasilitasi pembiayaan proyek dan juga diskusi seputar investasi bersama Jakarta Propertindo Institute, British Council, World Bank, dan lainnya.

### Potret yang bisa disimak

Alhasil, atas berbagai usaha di atas, beberapa investor mulai memberi atensi dan membuka komunikasi dengan JIC. Misalnya, pada sektor *sustainability*: ITF Sunter yang sempat terkendala sisi regulasi. Setelah terlibatnya JIC dalam proyek ini, ada iterasi dan pendorongan yang dilakukan. Sehingga, dapat bergulir proses investasinya dari swasta. Selain itu, hadir pula investasi dari perusahaan Korea dalam kerjasama pengelolaan sampah organik dari Pasar Jaya (BUMD) dan masih banyak lagi.

### Mendorong Akselerasi

TGUPP sebagai jembatan yang menerjemahkan visi Gubernur berperan sentris dalam proses perjalanan JIC. Lewat koordinasi dan komunikasi yang kuat, serta pembangunan arah dan visi yang baik, JIC berhasil didorong untuk memiliki pola dan semangat berkarya secara global dan cepat guna membuka peluang investasi bersama beragam perusahaan.

### Langkah selanjutnya

Meski pergerakan yang dilakukan pada 2021 cenderung melambat akibat pandemi, kepastian dan konsistensi JIC terus digalakkan dan akan bergerak pasti dalam 2022. Hal ini, tercermin lewat usaha JIC guna kembali menghadirkan forum internasional *Jakarta Investment Forum* (JIF) secara luring sebagai acuan investasi yang akan menjawab ragam pertanyaan dan tantangan kota ke depan. Tidak sampai di situ, JIC juga terus menargetkan membuka potensi promosi investasi di luar negeri dengan lebih proaktif. Termasuk mendorong agenda investasi kota dan membangun komunikasi dan koneksi untuk mendorong potensi investasi dengan BUMD dan perangkat terkait.





## **BAB 4:**

Hadirkan Dampak Bagi Kota

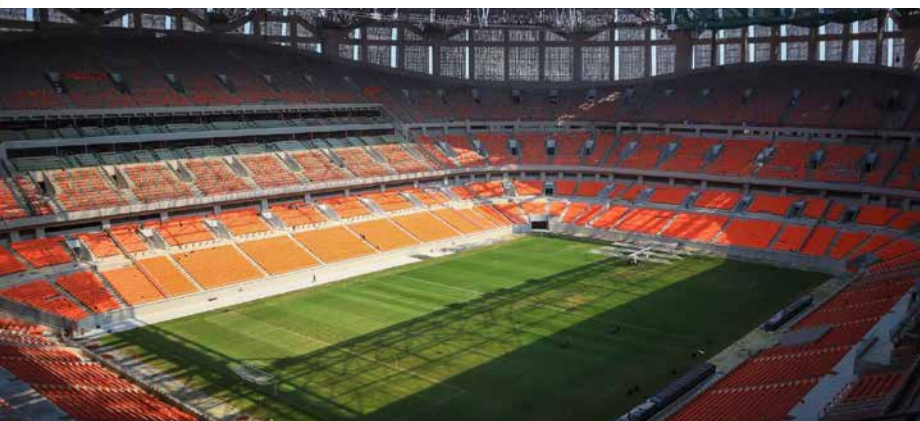


## Stadion Sepakbola Berstandar Internasional

*Lebih dari sekedar bangunan*

Impian Jakarta untuk memiliki stadion kelas internasional berstandar FIFA diharapkan terwujud melalui pembangunan *Jakarta International Stadium* (JIS). Sebelumnya, Jakarta memiliki stadion di Lebak Bulus namun saat ini telah dialihfungsikan menjadi stasiun MRT. Kehadiran stadion baru sudah direncanakan sejak tahun 2009 dan harapannya bisa dituntaskan di tahun 2021. Sejak awal, proyek JIS tidak hanya berorientasi pada pembangunan stadionnya, namun juga pengembangan kawasan di sekitarnya. Stadion dibangun di Jakarta Utara, dimana kawasan Jakarta Utara adalah awal dari lahirnya kota Jakarta. Namun saat ini kita lihat mulai muncul masalah dan tantangan sosial dan lingkungan muncul di sini. Pemprov DKI Jakarta ingin pusat kemajuan kembali digerakkan ke arah utara, salah satunya melalui pembangunan JIS sebagai motor penggerak regenerasi kawasan JIS dan bisa berdampak ke kawasan lainnya yang lebih luas di utara Jakarta. Fokus tidak hanya pada pengaturan persil tetapi mengatur kawasan.

Dalam pembangunan JIS, kami menekankan pada pembangunan yang berdampingan dengan warga. Untuk itu, pembangunan stadion dibangun oleh lebih dari 3.000 pekerja lokal dari Indonesia sendiri. Ini merupakan karya anak bangsa. Selain itu, di sebelah utara kawasan *Jakarta International Stadium*, terdapat pemukiman dari 624 KK, yaitu Kampung Bayam. Sadar terkait hal tersebut, maka sejak awal kawasan dirancang agar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan JIS ini bisa turut berpartisipasi dan bahkan tinggal di dalam kawasan ini. Gubernur pun menangkap aspirasi untuk tersebut dengan membangun 135 unit hunian di kawasan JIS dalam bentuk kampung susun. Sembari menunggu pembangunan JIS dan kampung susun terjadi, sebagian warga yang akan menghuni kampung susun ini direlokasi menghuni hunian sementara di lokasi lain. Pada tahun 2021, proses perencanaan kampung susun mulai dilaksanakan dan berlangsung secara partisipatif sehingga disesuaikan dengan kebutuhan warga yang akan menghuni. Desain yang unik dari kampung susun adalah dibentuknya *urban farming* yang disesuaikan dengan profesi warga Kampung Bayam yang sebagian besar bercocok tanam. Bahkan, pada atap kampung susun juga disediakan *rooftop garden* untuk pertanian.



**Foto 32: Tampak Dalam: Jakarta International Stadium**

Sumber: Pemprov DKI Jakarta





Foto 33: Proses konstruksi Jakarta International Stadium | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Selama tahun 2021, pembangunan JIS fokus pada penuntasan konstruksi dan pemenuhan pembiayaan menggunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sejak tahun 2020 hingga kini, pandemi cukup menjadi kendala sehingga menyebabkan mundurnya pelaksanaan konstruksi dan *launching* JIS yang rencananya diselesaikan pada akhir tahun 2021. TGUPP pun berperan dalam pendampingan agar dapat memastikan ketuntasan pekerjaan dan mengakselerasi pekerjaan-pekerjaan yang terhambat.

Pendampingan terutama dilakukan dalam pengawalan proses pengajuan pendanaan kepada Pemerintah Pusat. Meski sempat berjalan lambat saat menunggu kepastian pendanaan, dilakukan berbagai rekayasa kerja di lapangan hingga akhirnya proyek tetap dapat berjalan. Dikarenakan antusias yang tinggi terhadap JIS, TGUPP juga berperan dalam menjembatani *stakeholder* yang ingin melakukan kegiatan di JIS.







Agar dapat segera dirasakan oleh warganya, JIS telah dibuka bagi masyarakat umum setiap hari Selasa untuk mengadakan tur secara terbatas. Bahkan, lapangan latihan sudah mulai digunakan sejak tahun 2021 ini oleh berbagai komunitas dan lembaga. Komunikasi di media digencarkan merespon tingginya minat masyarakat walaupun JIS masih dalam tahap konstruksi.

Pada tahun 2021, pengembangan kawasan sekitar stadion juga menjadi salah satu elemen penting yang didorong oleh TGUPP. Filosofi dari pembangunan JIS fokus pada meregenerasi utara Jakarta melalui fasilitas yang maju dan ramah lingkungan dengan JIS sebagai atraksi utamanya sehingga mampu memajukan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Untuk itu, pada tahun 2021 dilakukan pemetaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menunjang JIS dan kemajuan kawasan sekitarnya, seperti akses transportasi publik termasuk bersama dengan KAI, TransJakarta, dan LRT, akses pejalan kaki dari dan menuju JIS, serta pengelolaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO). Pengembangan kawasan di sekitar JIS ini bisa diawasi dan diakselerasi pengembangannya melalui pembentukan PMO (*Project Management Office*). Seluruh kegiatan juga akan dipastikan eksekusinya melalui instrumen seperti Format 8 Kolom (F8K) dan KPI BUMD.

Salah satu agenda yang ingin dilaksanakan pada tahun 2021 adalah dilakukan *soft* dan *grand launching* JIS. Namun sayangnya dengan tingginya kasus Covid-19, kegiatan ini tidak jadi terlaksana. Harapannya bisa banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2022, mengingat konstruksi akan selesai 100% pada bulan Maret 2022.

Tentunya ada hikmah yang bisa diambil selama satu tahun berjalan proses pembangunan JIS di tahun 2021. Banyaknya pihak yang tertarik terhadap JIS menjadikan komunikasi dan *stakeholders management* dalam mengelola JIS sangat penting untuk dilakukan pada tahun 2022. Pelaksanaannya perlu secara kolaboratif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, fokus publik saat ini masih terpaku kepada stadion sebagai bangunan, dan belum banyak melihat potensi berkembangnya daerah sekitar akibat adanya pembangunan JIS. Maka dari itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dalam pemerintah untuk terus mendorong dan mengorkestrasi masyarakat untuk bisa berkontribusi aktif dalam agenda pengembangan kawasan JIS. Disini, TGUPP diharapkan menjadi salah satu yang memimpin hal tersebut melalui fungsi koordinasi dan *debottlenecking* sehingga pada tahun 2022 kita bisa melihat berbagai realisasi dari pengembangan kawasan di sekitar JIS.

## Pengembangan Kawasan Wisata & Ekonomi Kreatif

*Dorong destinasi wisata urban dan ekonomi kreatif sebagai simpul kemajuan kota*

### Jakarta sebagai Destinasi Wisata Urban

Jakarta sebagai destinasi wisata urban, menawarkan “pengalaman berkota” untuk para wisatawan yang datang ke Jakarta maupun warga Jakarta itu sendiri. Menuju visi ini, Jakarta fokus terhadap 4 pilar berikut dalam pengembangan pariwisata, yaitu **destinasi** – pengembangan destinasi wisata berbasis kawasan, **aksesibilitas** – kemudahan akses ke kawasan wisata, **amenitas** – ketersediaan berbagai fasilitas pendukung, serta yang terpenting ialah **pengalaman** – bagaimana menciptakan pengalaman yang berkesan akan suatu destinasi, yang terbentuk dari infrastruktur fisik yang tersedia serta interaksi sosial dengan komunitas yang terjadi.

Mewujudkan Jakarta sebagai destinasi wisata urban dengan memperhatikan empat pilar tersebut, menjadikan pengembangan wisata dilakukan secara holistik, baik dari segi infrastruktur fisik, misalnya perbaikan fasilitas pejalan kaki, maupun berbagai pilihan kegiatan yang bisa dilakukan dan diikuti oleh warga maupun para wisatawan. Sebagai contoh, kawasan Cikini. Kawasan ini menawarkan pengalaman wisata kaya sejarah, mulai dari gedung maupun kuliner, yang dapat dinikmati hanya dengan berjalan kaki di trotoar yang nyaman. Hal ini tentu saja memberikan lebih banyak pilihan untuk warga untuk melakukan eksplorasi dalam berkegiatan di Jakarta, juga memberikan peluang bagi para pelaku usaha di wilayah tersebut untuk mengembangkan bisnisnya bersama. Di sisi lain, pendekatan ini turut serta mengapresiasi para pelaku ekonomi kreatif, dimana mereka dapat memberikan nilai tambah berupa pengalaman melalui ekspresi karya seni yang dipamerkan di ruang publik.





## Aktivasi di Kala Pandemi

Selama pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi salah satu dari enam sektor yang paling terdampak (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Hal yang sama pun terjadi dengan sektor pariwisata di Jakarta. Hal ini menjadi alasan utama terbitnya Instruksi Gubernur No. 57 tahun 2021 tentang Pemulihan Pariwisata. Instruksi Gubernur ini mengamanatkan berbagai pihak turut berkontribusi serta memuat target-target indikator pemulihan pariwisata pada tahun 2024, yang diharapkan dapat kembali seperti kondisi sebelum pandemi, yaitu tahun 2019.

Selain itu, tahun 2021 ini juga menjadi tahun terbitnya Peraturan Gubernur No. 84 tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di Jakarta dalam mengembangkan potensi dan karyanya.

Namun, kegiatan aktivasi kawasan wisata urban di Jakarta sempat tertunda akibat peningkatan kasus Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Level 3 dan 4 di tahun 2021. Menjelang akhir tahun, setelah varian Delta mulai terkendali dan PPKM sudah memasuki Level 1, kegiatan ini akhirnya dapat terselenggara dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya:

- **Heritage walking tour di kawasan Cikini**, yang berlangsung mulai dari Balai Kota hingga ke beberapa destinasi seperti Taman Ismail Marzuki (TIM), Gedung Joang 45, dan Rumah Raden Saleh, memanfaatkan trotoar yang nyaman untuk digunakan para pejalan kaki. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari rekan media.
- **Pagelaran seni kontemporer di kawasan Kemang**, berlangsung atas kolaborasi dengan salah satu pegiat seni kontemporer. Pameran yang bernama **ICAD (Indonesia Contemporary Art and Design) XI** memiliki lokasi pameran yang tersebar di beberapa galeri yang dapat diakses dengan berjalan kaki. Sejumlah karya dari seniman seperti Nidiya Kusmaya, Sicovecas, Tommy Utomo turut hadir di pameran ini.



Foto 34: Suasana #IniJakarta | Sumber: Tim #IniJakarta



Foto 35: Suasana di Jakarta Biennale | Sumber: Jakarta Biennale

- **Acara #IniJakarta di Taman Lapangan Banteng**, yaitu acara yang memperkenalkan, menjelaskan dan merayakan semangat kolaborasi kota Jakarta yaitu +Jakarta, bersama lebih dari 50 co-creator, juga sebagai bentuk aktivasi taman setelah sebelumnya sempat ditutup.
- **Perayaan Natal tahun 2021**, bagian dari festival keagamaan sekaligus merupakan bentuk aktivasi kawasan Kota Tua, juga tersebar di 7 lokasi yang merupakan ruang ketiga Jakarta.
- Serta, berbagai acara lainnya termasuk **JIPFEST (Jakarta International Photography Festival)**, **Jakarta Film Week**, **POP ART Jakarta**, dan **Jakarta Biennale**.





Salah satu *milestone* utama yang terjadi di tahun 2021 terkait pengembangan kawasan ialah hadirnya *Joint Venture* antara *Jakarta Experience Board* (JXB), PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) untuk mengembangkan kawasan wisata Kota Tua-Sunda Kelapa menjadi destinasi wisata berkelas dunia.

Aktivasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan luring, tetapi juga dilakukan dalam bentuk daring, yaitu *rebranding website Enjoy Jakarta* dengan semangat pariwisata urban.

*Website* ini harapannya bisa memenuhi kebutuhan informasi wisatawan akan ragam destinasi yang bisa dikunjungi, pilihan akomodasi, ragam kuliner, panduan pariwisata, hingga pilihan paket perjalanan untuk memperkaya pengalaman wisata urban di Jakarta.

Berbagai capaian yang terjadi di tahun 2021 ini merupakan peran serta seluruh pihak di Jakarta, termasuk para seluruh *co-creator*. Di dalamnya, TGUPP mengambil peran untuk menginisiasi gagasan pariwisata urban, menginternalisasi gagasan tersebut hingga tertuang dalam ragam regulasi resmi maupun disepakati sebagai target internal Pemprov DKI Jakarta. TGUPP juga menjadi *think-tank* atau mitra diskusi para OPD terkait, diantaranya dengan memberikan referensi, mendorong pemantauan dan evaluasi berkala demi perbaikan ke depan, hingga memberikan alternatif solusi bersama ketika ditemukan masalah. TGUPP juga berperan untuk memastikan berbagai rencana dapat terlaksana sesuai target, juga membuka ruang-ruang potensi kolaborasi dengan menjembatani dengan para *co-creator*.

Sebagai bentuk pengawalan program, TGUPP juga mendorong keikutsertaan publik, salah satunya melalui pelaksanaan diskusi grup terarah tentang pemulihan wisata Jakarta. Harapannya, publik dapat turut serta mengawal implementasi dari berbagai rencana yang telah disepakati bersama dalam forum tersebut.

## Agenda ke depan

Jakarta akan terus menggalakkan pariwisata urban melalui berbagai agenda aktivasi kawasan serta pengembangan ekonomi kreatif. Agenda kawasan yang direncanakan termasuk penataan dan aktivasi Pasar Baru, yang sempat tertunda karena *refocusing* anggaran, Glodok, juga reaktivasi kawasan Cikini setelah Taman Ismail Marzuki (TIM) selesai direvitalisasi. Pada agenda ekonomi kreatif, telah direncanakan akan terlaksana Festival Imlek dan berbagai festival keagamaan setelahnya seperti Nyepi, Idul Fitri, dan lain-lain, *World Expo Dubai*, hingga juga turut memeriahkan agenda-agenda besar Jakarta seperti Formula E dan Urban 20. Pelaksanaan agenda-agenda ini di tahun 2022 juga akan menyesuaikan perkembangan pandemi di Jakarta.

## Hikmah yang dapat dipetik

- Berbagai acara yang terlaksana di tahun 2021 tidak dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi melibatkan berbagai ko-kreator. Dalam prosesnya, terlihat bagaimana gagasan “kolaborasi” ini telah terinternalisasi, bagaimana para OPD berinisiatif menjaring lebih banyak *co-creator*. Kedepannya, diharapkan inisiatif bisa lebih banyak datang dari para pelaku ekonomi kreatif, dengan posisi Pemprov DKI Jakarta siap mendukung dan memfasilitasi.
- Menciptakan gagasan adalah hal besar. Namun, hal yang tidak kalah besar ialah bagaimana gagasan tersebut dipahami dan dijadikan pedoman bersama tidak hanya dari internal Pemprov DKI Jakarta, tetapi warga Jakarta secara keseluruhan. TGUPP memiliki peran besar sebagai penerjemah dari mimpi dan visi Gubernur menjadi hal-hal praktis yang dapat dipahami internal maupun warga Jakarta.
- Pentingnya menyeimbangkan agenda pembangunan kota dengan mengelola berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari merencanakan hingga menjadikan agenda dapat terlaksana.

## Penataan Kampung Jakarta

*Hidupkan kolaborasi, wujudkan hunian yang layak*

Wilayah perkampungan di kota merupakan area permukiman yang memiliki kemiripan karakteristik dengan perkampungan di pedesaan, namun hadir dengan wajah unik melalui penyesuaian konteks urban. Masyarakat yang hidup di perkampungan memiliki peran penting untuk mendukung kota baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural.

Demi mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas umum perkampungan untuk mencapai kesejahteraan pembangunan, Jakarta melakukan program penataan kampung yang secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: penataan kampung-kampung yang tergolong kumuh melalui program *Community Action Plan* (CAP) maupun *Collaborative Implementation Program* (CIP).

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di kampung dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melalui metode CAP antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan warga yang menjadi target penataan. Metode CAP mewujudkan kolaborasi yang bertujuan agar warga bisa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan.

Setelah CAP, terbitlah CIP yang menjadi langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP. Pada proses ini, warga menjadi pelaku aktif kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan dengan metode swakelola tipe 3 dan 4. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan warga ikut berperan aktif untuk membentuk lingkungan yang lebih baik dan Jakarta dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warganya.

Sebagai contoh, Kampung Muka di Kelurahan Ancol ini termasuk dalam 16 kampung kolaborasi *Program Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP). Salah satu programnya adalah pembangunan sistem drainase di Kampung Muka. Dengan adanya drainase yang baik, maka genangan yang biasanya disebabkan oleh hujan dapat segera dialirkan ke Sungai Anak Ciliwung sehingga lebih cepat surut.



## Ragam Inisiatif Pengembangan Kampung

### Kampung Susun Akuarium

Pembangunan Kampung Susun Akuarium menjadi program strategis Jakarta dalam hal Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi warga Jakarta, memenuhi rasa keadilan dalam bermukim dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, nyaman dan terjangkau.

Pada tahun 2021, dua dari lima blok kampung susun telah dihuni dengan total hunian terbangun 107 unit dengan tipe 36. Kolaborasi menjadi kunci strategis dalam pembangunan kampung ini. Mulai dari perencanaan, berlanjut pembangunan, serta nanti saat pengelolaan. ini akan menjadi contoh dari kerja sama kami bersama warga, pengembang swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan Kampung Susun pertama di Jakarta. Selain itu, ditinjau dari segi arsitektur dan penataan kota, harapannya Kampung Akuarium bisa menghadirkan hidup yang vertikal, humanis, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

### Kampung susun eks-Bukit Duri

Proyek pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Jatinegara, Jakarta Timur telah diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Kampung susun itu nantinya akan dihuni oleh 75 kepala keluarga dari Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terdampak penggusuran pada September 2016 silam. Pembangunan kampung susun di atas lahan seluas 4 ribu meter persegi itu ditargetkan rampung pada Maret 2022. Sejumlah fasilitas telah terbangun seperti ruang ramah anak, ruang serbaguna, musala, serta lokasi untuk usaha warga setempat. Selain itu pendekatan *zero run off* dimana seminimal mungkin air hujan dibuang ke drainase kota menjadi hal yang baru untuk kampung susun yang diperuntukan untuk warga.

### Kampung susun Kunir

Kampung Susun Kunir erat dengan situs cagar budaya dari bekas bentang kota tua. Berdirinya Kampung Kunir akan memberikan gambaran bahwa antara masyarakat kampung kota dengan situs sejarah bisa hidup berdampingan dan saling menguatkan. Sehingga di masa depan proses pelestarian sejarah tidak lagi berdiri sendiri dengan menghilangkan faktor masyarakat. Pencanangan Kampung Susun Kunir telah dilakukan Oktober 2021 lalu yang nantinya diperuntukkan bagi 33 KK warga Kampung Kunir.





Foto 36: Kampung Susun Akuarium | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

### Kampung Susun Bayam

Penataan Kampung Bayam dilakukan dengan pendekatan sosial terhadap warga dan berproses untuk tahap lelang kontraktor di Desember 2021. Rencananya, kampung ini akan melakukan *groundbreaking* di Januari 2022. Sejumlah 135 unit hunian akan dibangun untuk warga Kampung Bayam yang terdampak.

### IMB Kampung-Kolektif

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kampung kolektif merupakan sebuah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tanah, salah satunya permasalahan legalitas tanah di 12 kampung prioritas untuk 7.000 rumah di Jakarta. Program ini menjadi representasi untuk mengikhtiarkan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Hal ini juga nantinya akan sangat membantu warga dalam hal pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Melalui Bidang Respon Strategis, TGUPP juga memberikan bantuan kepada warga Jakarta berupa mediasi hukum terkait dengan isu legalitas pertanahan, misalnya permasalahan akan adanya beberapa sertifikat tanah yang berlaku dalam satu lahan yang sama.

### Penataan Kampung Kawasan di Tanah Merah

Penataan Kampung Kawasan Tanah Merah dimulai dengan penyerahan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan legalitas bangunan yang belum tuntas ke di Oktober 2021 lalu. Selain itu, penataan sejumlah infrastruktur di kawasan Kampung Tanah Merah meliputi saluran air, pembangunan 3,1 kilometer betonisasi jalan lingkungan, sistem drainase *U-ditch* beton, tangki septik komunal, 6 gapura hingga jembatan pembangunan Jembatan Kali Betik dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam Penyusunan *Community Action Plan* (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

Kolaborasi dengan *Young Presidents' Organization* (YPO) juga dilakukan untuk pembuatan filter air bersih RO, bantuan motor 7 unit untuk pengurus RW, pembangunan kantor PKBM Himmata, pemberian komputer 7 unit kantor-kantor RW, hingga bantuan berupa 1.000 nasi kotak dan susu tiga kali sehari.

### Sayembara desain Kampung Susun Tongkol

Sayembara Rumah Susun Jalan Tongkol 10 yang berlokasi di Jakarta Utara bertujuan untuk mendapatkan masukan ide dan gagasan desain rumah susun dan kawasan yang memiliki ciri khas dan dapat beradaptasi dengan konsep kawasan Kota Tua serta tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan cagar budaya. Sayembara ini juga memanfaatkan dan mengembangkan lokasi Eks Kastil Batavia untuk dapat mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, dan berkelanjutan. Sayembara ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

### Tantangan & Penyesuaian akibat Pandemi COVID-19 2021

Peningkatan kasus Pandemi Covid-19 di pertengahan tahun 2021 membuat berbagai penyesuaian strategi dan *delivery* ragam program penataan kampung. Salah satu yang terdampak yakni pengadaan anggaran CAP dan CIP yang harus mengalami *refocusing* di 2021. Di sisi lain, pandemi yang terjadi ternyata mendorong pelibatan masyarakat melalui diskusi penataan kampung, juga mendorong masyarakat untuk membangun relasi dengan ragam fasilitator seperti kampung asuh Tanah Merah oleh YPO, serta program KSBB Kampung.

### Harapan Ke Depan

Penataan berbagai kampung yang ada di Jakarta harapannya bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaca dari peresmian Kampung Akuarium, penataan kota harus bisa menghadirkan hidup yang vertikal, humanis, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan harapan baru bagi masyarakat untuk hidup lebih layak.

Menyusul dengan target di tahun berikutnya seperti selesainya penataan Kampung Susun Akuarium Tahap II dan keempat kampung lainnya seperti Kampung Susun eks-Bukit Duri, Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Bayam, dan Kampung Susun Tongkol dengan model pengelolaan kampung susun berbasis koperasi. Juga, terlaksananya penataan di 79 RW hasil CAP dan 135 RW hasil aspirasi masyarakat, sehingga dapat melampaui target RPJMD 20 RW.



## KJP Plus

Pendidikan tuntas berkualitas untuk semua anak di Jakarta

**TUNTAS PENDIDIKAN DENGAN KJP PLUS TAHAP II TAHUN 2021**

Jumlah penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2021 sebanyak **859.468 siswa**

Untuk warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun  
Dari keluarga tidak mampu  
Terselenggaranya wajib belajar 12 tahun  
Menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan adil dan merata

Informasi lebih lanjut terkait KJP Plus

Website: [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id)  
Telepon: 021-857-1012  
Fax: 021-851-6505  
WA Pengaduan: 0812-8483-4229

Dinas Pendidikan DKI Jakarta @disdik\_dki @upt.p4op

Gambar 11: Informasi KJP Plus

Sumber: Instagram @upt.p4op

## Tentang KJP Plus

KJP Plus hadir untuk menjamin anak-anak di DKI Jakarta yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan keuangan untuk bisa tetap sekolah melalui bantuan dana per bulan. Bantuan dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para siswa demi mendukung kegiatan belajar mengajar, misalnya kebutuhan buku dan alat tulis, ongkos transportasi, hingga kebutuhan terkini yaitu kuota internet.

Pada tahun 2021, penerima manfaat KJP Plus mencapai 859.488 siswa<sup>5</sup> dengan nominal bantuan yang berbeda-beda per jenjang, mulai dari 250 ribu rupiah untuk jenjang SD/MI/SLB hingga 420 ribu rupiah untuk SMA/MA/SMALB dan 450 ribu rupiah untuk SMK.

**BESARAN DANA KJP PLUS PER BULAN**

Besaran Dana Per Bulan Sekolah/Madrasah Negeri, PKBM, dan LKP

JENJANG	BIAYA PERSONAL Per Bulan
SD/MI/SLB	Rp 250.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000
SMK	Rp 450.000
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Rp 300.000
LKP Lembaga Kursus Pelatihan	Rp 1.800.000 per semester

Besaran Dana Per Bulan Sekolah/Madrasah Swasta (Non Peserta PPDB Bersama dan Non Penerima Subsidi Peningkatan Mutu Pendidikan)

JENJANG	BIAYA PERSONAL Per Bulan	SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA Per Bulan	BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH (Peserta Didik Baru)
SD/MI/SLB	Rp 250.000	Rp 130.000	Maksimum Rp 1.000.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 170.000	Maksimum Rp 1.500.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 290.000	Maksimum Rp 2.500.000
SMK	Rp 450.000	Rp 240.000	Maksimum Rp 2.500.000

Dinas Pendidikan DKI Jakarta @disdik\_dki @upt.p4op

**BESARAN DANA KJP PLUS PER BULAN**

Besaran Dana Per Bulan Sekolah Swasta (Peserta PPDB Bersama)

JENJANG	BIAYA PERSONAL Per Bulan	SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA Per Bulan	BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH (Peserta Didik Baru)
SMA Klaster I	Rp 420.000	Maksimum Rp 620.000	Maksimum Rp 3.000.000
SMA Klaster II	Rp 420.000	Maksimum Rp 920.000	Maksimum Rp 7.000.000
SMA Klaster III	Rp 420.000	Maksimum Rp 1.100.000	Maksimum Rp 10.000.000

Bantuan Sosial Subsidi Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Swasta

JENJANG	BIAYA PERSONAL Per Bulan	SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA Per Bulan	BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH (Peserta Didik Baru)
SMA	Rp 420.000	Rp 1.100.000	Maksimum Rp 2.500.000
SMK	Rp 450.000	Rp 1.100.000	Maksimum Rp 2.500.000

**SELAMA COVID-19**

- Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai/non tunai.
- Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan (termasuk menjangkau biaya komunikasi pembelajaran jarak jauh).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta @disdik\_dki @upt.p4op

Gambar 12: Besaran Dana KJP Plus per Bulan | Sumber: Instagram @upt.p4op

<sup>5</sup> Jumlah penerima KJP Plus Tahap I 2021



### Hadirkan Relaksasi karena Pandemi

Merespon pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi warga Jakarta, inisiatif untuk merelaksasi program KJP Plus menjadi salah satu respon Pemprov DKI Jakarta. Skema relaksasi ini memperbolehkan seluruh nominal bantuan dapat ditarik tunai, yang sebelumnya penarikan tunai dibatasi maksimal 100 ribu rupiah. Diinisiasi oleh Gubernur di tahun 2020, relaksasi ini masih terus berlanjut hingga tahun 2021 mempertimbangkan situasi pandemi dan dampak positif sosial-ekonomi yang masih dirasakan oleh warga Jakarta.

### Menambah Sasaran, Memperluas Cakupan Penerima

Para siswa penerima manfaat KJP Plus tidak hanya memperoleh nominal sesuai jenjang pendidikan, tetapi juga memperoleh bantuan pendidikan lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, seperti Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk peserta didik baru yang sudah berlaku sejak tahun 2020. Selain itu, sejak 2021 mulai diadakan skema Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama (PPDB Bersama) yaitu skema yang mengakomodir peserta penerima KJP Plus untuk bisa bebas biaya masuk ke sekolah swasta, dari mulai biaya masuk hingga seluruh biaya lainnya hingga lulus sekolah. Tidak hanya mencakup lebih banyak siswa, tetapi juga memperluas cakupan manfaat yang diterima oleh para siswa.

Berbagai manfaat ini yang kemudian pada tahun 2021 dirampingkan menjadi satu pengaturan terkait bantuan sosial Pendidikan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2021. Selain efisiensi produk hukum untuk internal Pemprov DKI Jakarta sebagai tujuan utama, hadirnya Peraturan Gubernur ini juga diharapkan memberikan informasi yang komprehensif bagi para penerima manfaat.

**PENGUMUMAN**  
Pencairan Dana KJP Plus Tahap II Tahun 2021  
bulan Desember akan dilaksanakan pada tanggal  
**8 Desember 2021**

Jenjang Pendidikan	Total Dana yang dapat digunakan
SD/SDLB/MI	Rp 250.000
SMP/SMPLB/MTs/PKBM	Rp 300.000
SMA/SMALB/MA	Rp 420.000
SMK	Rp 450.000

Untuk informasi lebih lanjut tentang Pencairan Dana KJP Plus & KJMU  
follow Instagram @disdikdi @upt.p4op dan @jakone.mobile

www.bankdki.co.id  
www.bankdkisyariah.co.id

JakOne Mobile | @jakone\_mobile | @jakone.mobile

PT Bank DKI adalah pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 13: Pengumuman Pencairan Dana KJP Plus Tahap II 2021

Sumber: Instagram @upt.p4op



Bermitra dengan para OPD terkait, TGUPP turut serta memantau implementasi dari inisiasi yang telah dimulai sejak tahun sebelumnya, diantaranya penyederhanaan mekanisme dari 8 tahap menjadi 4 tahap dan penyaringan kelayakan calon penerima manfaat berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya menjamin ketepatan sasaran.

Peran ini dilakukan mulai dari memastikan target berjalan sesuai linimasa hingga mendorong penyempurnaan jika ditemukan ruang perbaikan, termasuk terkait manajemen komunikasi kepada para penerima manfaat. Selain itu, juga berperan sebagai penengah karena mengetahui visi / gagasan yang ingin dicapai, isu yang ditemui oleh lintas OPD, hingga kacamata penerima manfaat.

### **Terus menyempurnakan**

Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, program KJP Plus terus dikaji berkolaborasi dengan *SMERU Research Institute* salah satunya untuk melihat dampak perubahan tersebut. Mekanisme program juga akan terus dirapikan dan disempurnakan agar semakin dapat dipertanggungjawabkan oleh internal Pemprov DKI Jakarta, juga yang terpenting manfaatnya bagi warga Jakarta. Berbagai aktivasi komunikasi dan cerita para penerima manfaat juga akan terus dieksplor agar semakin banyak warga, termasuk pemangku kepentingan, mengetahui kebermanfaatan program ini.

### **Hikmah yang diperoleh**

Program KJP Plus di DKI Jakarta telah hadir sejak beberapa tahun ke belakang, namun ruang akan perbaikan dan penyempurnaan akan selalu ada. Menghadirkan perubahan pada suatu hal yang sudah terbangun sejak lama menjadi tantangan tersendiri, resistensi seringkali timbul, padahal mekanisme eksisting belum tentu yang terbaik untuk kondisi saat ini. Langkah antisipatif dan inovatif perlu terus didorong dengan fokus mempermudah para penerima manfaat dan perluasan kebermanfaatannya bagi warga Jakarta.

## Naramuda Jakarta

*Dari KJMU untuk Indonesia*

### Tentang KJMU

Pemprov DKI Jakarta hadir untuk memastikan seluruh warganya dapat memperoleh pendidikan, termasuk kelompok rentan. Tidak hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Pemprov DKI Jakarta juga menjamin warganya yang kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat Perguruan Tinggi.

Bentuk bantuan yang diberikan berupa nominal uang sebesar 9 juta rupiah per semester, yang dapat digunakan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya hidup.

Syarat utamanya adalah mahasiswa merupakan warga KTP/KK DKI Jakarta dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Persyaratan untuk target perguruan tinggi yang dituju, diperbolehkan untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta dengan akreditasi A.

Kini, telah ada 11.812 mahasiswa penerima manfaat program KJMU yang tersebar di 113 Perguruan Tinggi di 33 provinsi dan 62 kota di Indonesia.<sup>6</sup>

### Lahirnya Naramuda Jakarta

Lebih dari sekadar bantuan sosial berupa uang, para mahasiswa penerima manfaat dari program KJMU secara organik membentuk forum-forum di daerah lokasi Perguruan Tinggi masing-masing. Melihat besarnya potensi akan inisiatif tersebut, diinisiasi hadirnya **Naramuda Jakarta**.

Diperkenalkan kepada publik pada tahun 2021, Naramuda Jakarta merupakan sebutan untuk alumni dan mahasiswa penerima KJMU. Arti kata Naramuda Jakarta ialah anak muda yang memberikan manfaat kepada semua, sehingga diharapkan nantinya seluruh alumni dan mahasiswa penerima manfaat KJMU dapat berkontribusi dalam perubahan nyata bagi masyarakat Indonesia.



**Gambar 14: Logo Naramuda Jakarta**

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

<sup>6</sup> Data per tahap 2 KJMU tahun 2021



**Foto 37: Bakti Naramuda Jakarta Tebar 1000 Manfaat untuk Lestarinya Lingkungan DKI Jakarta**

Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Hadirnya Naramuda Jakarta juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 91 Tahun 2020 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. Peraturan Gubernur ini merupakan acuan bahwa program KJMU berkembang tidak hanya berupa pemberian bantuan berupa uang, tetapi juga mewajibkan mahasiswa penerima manfaat KJMU untuk aktif dalam pelatihan kepemimpinan serta aktif dalam pengabdian masyarakat.

Sebelumnya, para penerima manfaat KJMU dibebaskan untuk dapat memilih sendiri kegiatan pelatihan dan pengabdian masyarakat mereka. Kini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun turut menyelenggarakan program-program untuk Naramuda Jakarta agar dapat menjadi percontohan dan tolak ukur baru ketika nantinya para penerima manfaat akan memilih sendiri kegiatan yang akan diikuti.

Hingga akhir tahun 2021, telah dilaksanakan 5 kegiatan yang diikuti oleh 1.400 orang Naramuda Jakarta, berkolaborasi dengan Forum Indonesia Muda, Turun Tangan Jakarta, *PLAN International* dan *Climate Hub Indonesia*. Kegiatan ini belum termasuk berbagai kegiatan yang secara mandiri diselenggarakan oleh para Naramuda Jakarta.

Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai ~11 ribu orang, dimana setiap orangnya wajib memberikan manfaat kepada warga, harapannya Naramuda Jakarta dapat membawa dampak baik bagi Indonesia.

Hadirnya Naramuda Jakarta merupakan buah dari gagasan dan ide arah baru TGUPP yang proaktif membantu mendesain program yang lebih dari pemberian bantuan uang. Peran strategis TGUPP menjadi mitra erat Dinas Pendidikan dalam berdiskusi, diantaranya mulai dari merumuskan konsep program, *branding*, kurikulum dan kegiatan aktivasi, hingga melakukan evaluasi berkala demi penyempurnaan dan pengembangan program. TGUPP juga turut menjaring berbagai mitra yang bersedia untuk berkolaborasi dalam program Naramuda Jakarta.

### Agenda ke depan

Peningkatan jumlah penerima manfaat untuk mencapai target yang telah termuat dalam RPJMD DKI Jakarta, yaitu sebesar 13.204 mahasiswa penerima KJMU. Ditargetkan target tersebut akan dipenuhi pada tahun 2022.

Ke depan, terdapat potensi pemberian nominal bantuan yang menyesuaikan dengan lokasi Perguruan Tinggi dari penerima manfaat program KJMU. Hal ini dilakukan mengingat besaran biaya baik UKT maupun biaya hidup yang berbeda-beda. Bentuk rencana penyempurnaan program ini, setelah sebelumnya pemberian bantuan seragam sebesar 9 juta rupiah, akan didahului dengan pengkajian secara komprehensif.

Selain itu, program KJMU, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas maupun pengabdian masyarakat, serta cerita-cerita para Naramuda Jakarta akan terus diangkat untuk semakin menginspirasi banyak pihak, juga untuk mengajak pihak-pihak yang ingin berkolaborasi untuk Naramuda Jakarta.

### Hikmah yang dapat dipetik

- Kesulitan dalam memulai perubahan ialah ketika suatu program/kegiatan maupun mekanisme/cara saat ini telah dianggap *settle* dan paling ideal, sedangkan ruang perbaikan dan penyempurnaan akan terus ada.
- Pentingnya mengelola ekspektasi serta terus tanggap dan lincah dalam menyesuaikan rencana terutama bagi program/kegiatan yang baru digagas. Mengingat, terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi proses menuju hingga saat implementasi, misalnya ketersediaan sumber daya.
- Menjaga keberlanjutan program dan terus berupaya menyempurnakannya secara berkala memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang mumpuni.



“*Mau ngucapin banyak banyak terima kasih karena telah menjadi wadah untuk pemuda pemudi Jakarta untuk berperan aktif dalam membangun kotanya. Semoga ke depannya lebih banyak lagi project yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Thanks Naramuda.*”

Ariff Maulana | @arifmlna | [#NaramudaBerbagiCerita](#)

## Jakarta Sekolah Kolaborasi

*Harmonisasi dalam mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua satuan pendidikan negeri dan swasta di DKI Jakarta*

### Tentang Jakarta Sekolah Kolaborasi

Setiap tahunnya, Jakarta menerima lebih dari 200.000 peserta didik baru di seluruh jenjang pendidikan. Untuk sekolah negeri saja, Jakarta menerima sekitar 100.000 di jenjang SD, 70.000 di SMP, dan 45.000 di SMA dan SMK setiap tahunnya. Jumlah daya tampung SD negeri saat ini dapat memenuhi kebutuhan peminat, sedangkan daya tampung SMP, SMA, dan SMK jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan peminat. Ketersediaan tempat untuk SMP negeri hanya memenuhi 45% dari peminat dan 30% untuk SMA/SMK Negeri.

Data ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu SMP dan SMA/SMK masih menjadi isu di Jakarta. Alih-alih membangun sekolah negeri lebih banyak, melalui Jakarta Sekolah Kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta menggaet sekolah swasta untuk menjadi mitra dari sekolah negeri.

Tujuan Jakarta Sekolah Kolaborasi adalah memastikan akses dan kualitas yang merata pada seluruh satuan pendidikan di Jakarta dengan melakukan harmonisasi antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Sekolah negeri menjadi induk, sementara sekolah swasta akan menjadi sekolah mitra. Model dan bentuk kolaborasi beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah mitra dan akan disepakati antara sekolah induk dengan sekolah mitra. Contoh bentuk kolaborasinya diantaranya adalah:

- Kolaborasi penyusunan kurikulum
- Peningkatan sumber daya manusia (peningkatan mutu pendidikan, kolaborasi pembelajaran)
- Kegiatan pengembangan kesiswaan (latihan gabungan ekstrakurikuler pramuka/fotografi/futsal dan lain-lain, LKSD bersama, peringatan hari besar bersama)



**Gambar 15: Apa itu Jakarta Sekolah Kolaborasi?**

Sumber: Instagram @sekolahkolaborasi





**Gambar 16: Kegiatan Jakarta Sekolah Kolaborasi**

Sumber: Instagram @sekolahkolaborasi



**Gambar 17: Logo Jakarta Sekolah Kolaborasi**

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

## Penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Jakarta Sekolah Kolaborasi

Bermula dari gagasan dan narasi yang diterjemahkan ke dalam program yang ditetapkan menjadi salah satu Kegiatan Strategis Daerah, kemudian juga dilakukan *pilot project*.

Sejak tahun 2019, telah terlaksana *pilot project* di 11 pasang sekolah tingkat SMA dan 10 pasang sekolah tingkat SMP, dengan agenda yang dilakukan bermacam-macam sesuai kesepakatan pasang sekolah kolaborasi. Setelah sebelumnya *piloting* sempat berjalan dengan kegiatan tatap muka, selama masa pandemi Covid-19 dan pembelajaran jarak jauh ditetapkan, kegiatan Jakarta Sekolah Kolaborasi dilaksanakan melalui daring.

Kini, telah ditetapkan satuan pendidikan pelaksana program Jakarta Sekolah Kolaborasi, terdiri dari 286 pasang SMP dan 116 pasang SMA. Daftar ini tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pada bulan November 2021.

Selama tahun 2021, lahir juga logo *branding* dari Program Jakarta Sekolah Kolaborasi. Tujuan utama serta audiens dari program ini berupaya dihadirkan dalam logo Jakarta Sekolah Kolaborasi yang berbentuk keping *puzzle*. Secara filosofis, *puzzle* sendiri merupakan permainan anak yang digunakan untuk mengasah kecerdasan. *Puzzle* terdiri atas beragam bentuk dan keunikan masing - masing. Setiap kepingnya tersebut dapat saling menyatu dan mengisi kekurangan satu sama lain.

Ini sesuai dengan harapan dibentuknya Program Jakarta Sekolah Kolaborasi yaitu untuk mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat, terkhusus dalam bidang pendidikan. Saat ini, Jakarta Sekolah Kolaborasi memanfaatkan kanal media sosial *Instagram* @sekolahkolaborasi sebagai sarana komunikasi kepada warga Jakarta.

Panduan *branding* program ini juga telah disampaikan kepada jejaring sekolah pelaksana agar tercipta keseragaman publikasi dan penguasaan yang khas agar semakin mudah dikenali oleh warga Jakarta.

Berbagai tonggak pencapaian program Jakarta Sekolah Kolaborasi ini merupakan buah dari seluruh sesi curah pikiran dan refleksi serta upaya bersama para OPD terkait, terutama Dinas Pendidikan. TGUPP turut serta dalam melahirkan gagasan hingga terus aktif menjadi mitra diskusi dalam tahap eksekusi program.

### Agenda ke depan

Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program Jakarta Sekolah Kolaborasi diharapkan dapat terus menjalankan program ini dengan optimal dan terus mengeksplor bentuk-bentuk potensi kolaborasi sesuai perkembangan kebutuhan. Bersamaan dengan pembelajaran tatap muka yang telah dimulai, program Jakarta Sekolah Kolaborasi juga akan terlaksana secara tatap muka.

Sejalan dengan berbagai kegiatan yang akan berjalan, aktivasi komunikasi juga akan terus didorong agar semakin banyak pihak-pihak yang mengetahui program Jakarta Sekolah Kolaborasi, termasuk dalam rangka menjaring masukan terhadap program, juga bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan.

Sebagai upaya untuk memastikan keberjalanan program ini dapat berkelanjutan, penyusunan Peraturan Gubernur tentang program Jakarta Sekolah Kolaborasi telah diinisiasi. Nantinya, Peraturan Gubernur ini diharapkan menjadi payung seluruh kolaborasi terkait pendidikan di Jakarta yang akan melibatkan berbagai pihak.

### Hikmah yang dapat dipetik

- Berbagai upaya telah dilakukan selama proses perwujudan program, mulai dari gagasan hingga eksekusi. Dalam perjalanannya, dengan telah ditetapkan sebagai Kegiatan Strategis Daerah, berbagai sumber daya fokus untuk mencapai target program. Sehingga, perlu ada target yang jelas dan rinci untuk menjadi acuan pelaksanaan dan penyempurnaan program.
- Banyak pihak sangat terbuka dan menunjukkan inisiatifnya untuk terlibat berkolaborasi untuk Jakarta, potensi besar ini perlu ditangkap dan difasilitasi dalam pelaksanaan dan pengembangan berbagai program Pemprov DKI Jakarta.

## Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

*Ambil bagian dalam ciptakan ruang aman bagi semua*

Isu kekerasan pada perempuan dan anak, baik kekerasan fisik, seksual, dan psikis merupakan salah satu masalah yang masih kerap kali terjadi di masyarakat. Laporan UPT P2TP2A menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2021, data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lapor sejak tahun 2015 hingga 2021 selalu diatas angka 1.000 (kecuali pada tahun 2020).

Namun, kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi isu yang dipandang tabu untuk disuarakan, sehingga banyak korban memilih untuk diam dan tidak melapor. Hingga muncul istilah 'gunung es' dalam pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, artinya hanya sedikit kasus yang diketahui dan dilaporkan, pada nyatanya ada banyak kasus yang tak tampak dan menguap. Lebih lanjut, kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya bisa berdampak panjang dan permanen.

Peran TGUPP adalah fasilitator bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) terkait inovasi dalam:

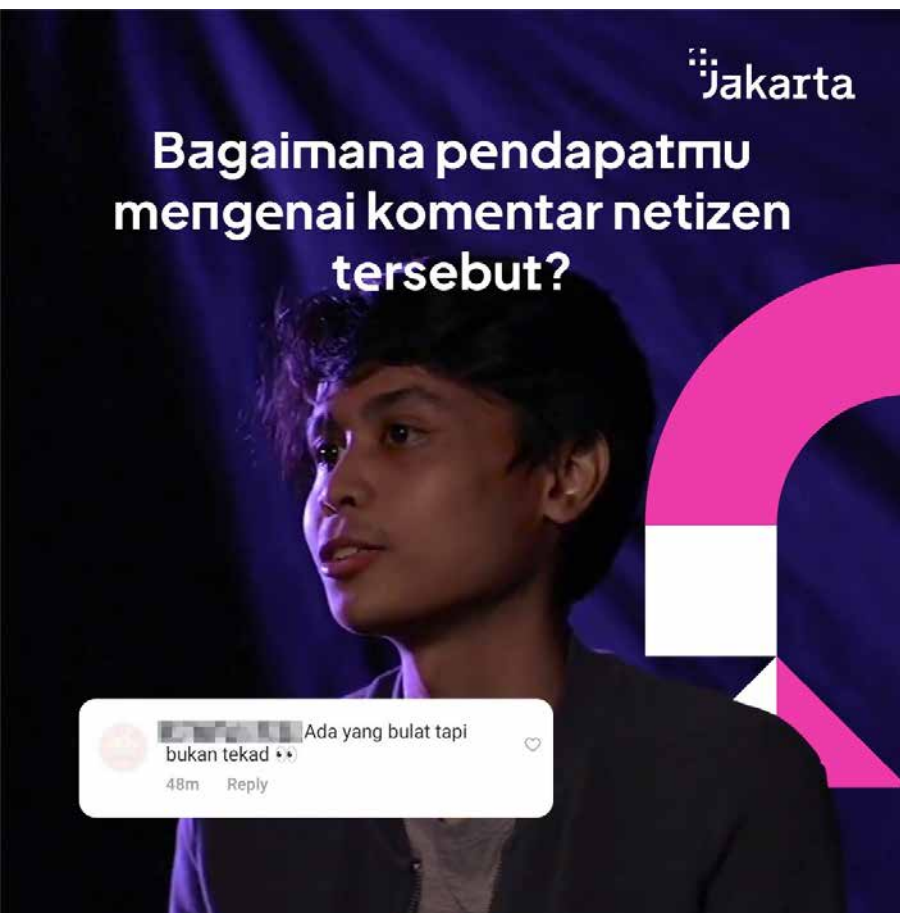
1. Perlindungan untuk setiap anak dan perempuan dan setiap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan ditindak secara hukum;
2. Pendampingan untuk pemulihan diri baik fisik dan psikis bagi seluruh korban tindak kekerasan dengan pelayanan yang terintegrasi; serta
3. Informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus disebarluaskan.

Terlebih, salah satu hal yang menjadi akar penyebab dari permasalahan tersebut adalah rendahnya pengetahuan masyarakat, norma sosial dan usaha yang belum maksimal dari berbagai pihak terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Strategi komunikasi dalam penyampaian hal tersebut menjadi kegiatan penting dan besar dalam isu ini. Maka setelah memastikan kebijakan dan fasilitas layanan tersedia dan berjalan, tugas berikutnya ialah menyebarkan informasi tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat.



**Gambar 18: Jumlah laporan tindak kekerasan yang diterima**

Sumber: UPT P2TPA2



Gambar 19: Cuplikan Kita Berhak Aman | Sumber: Youtube +Jakarta

### Kampanye #KitaBerhakAman

#KitaBerhakAman adalah sebuah inisiasi kolaboratif Jakarta bersama *Girl up Indonesia* untuk memantik semangat dan perhatian masyarakat untuk mitigasi kekerasan berbasis gender. Kampanye ini bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi kepada target mengenai pentingnya mitigasi dan pengertian kekerasan dan pelecehan;
2. Membentuk pola pikir masyarakat yang sadar akan hak bagi setiap warga untuk aman; serta
3. Menyampaikan prosedur/tindakan nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah kekerasan.

Kampanye yang berlangsung sejak tanggal 25 November 2021 ini sejalan dengan '16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak', yang sekaligus bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Kekerasan Perempuan Internasional, dan ditutup pada tanggal 10 Desember 2021 yang bertepatan dengan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Bentuk kampanye hadir dalam bentuk infografis, sinar audio atau *podcast*, video, dan artikel yang bisa di akses di media sosial +Jakarta.

## **Terbitnya SE Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta**

Sebagai perwujudan dari anti kekerasan seksual di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta, langkah awal yang dilakukan ialah memastikan ketersediaan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup Pemprov DKI Jakarta sendiri. Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta menjadi seruan kepada para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja dengan tiga ketentuan:

1. Para kepala OPD maupun Unit Kerja agar memberikan keteladanan dan mendorong setiap pegawai untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual;
2. Mewajibkan seluruh pegawai untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual; serta
3. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, turut disampaikan bentuk tindakan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja antara lain: Pelecehan fisik; Pelecehan lisan; Pelecehan isyarat; Pelecehan tertulis/gambar; Pelecehan psikologis/ emosional; dan/atau Bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya yang mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan, baik fisik maupun mental.





Berkaitan dengan penanganan tindakan pelecehan seksual, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Pelapor (baik korban atau saksi) dapat menyampaikan aduan/laporan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terlapor (pegawai atau setiap orang yang memiliki hubungan kerja di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta) secara tertulis melalui kanal aduan pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengaduan>; Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memberikan asesmen awal terhadap aduan/laporan, perlindungan dan pendampingan terhadap Pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Pelapor mendapatkan hak berupa: Penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;

Perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan yang berlebihan dan segala bentuk ancaman dan tindakan pembalasan dari pihak lain;

Pelayanan psikologis, konseling dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh UPT P2TP2A; Pelayanan rumah aman (*shelter*) yang diberikan oleh Dinas Sosial;

Pelayanan kesehatan bagi korban dan medikolegal yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan; dan

Pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus korban berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Setiap Terlapor mendapatkan hak berupa:

Penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;

Kerahasiaan identitas;

Proses penanganan yang adil; dan

Kesempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung.

## Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Oleh Kader PKK

Jakarta turut melibatkan kader dasawisma dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kader PKK di setiap kelurahan mendapatkan edukasi dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, sehingga mereka dapat menginformasikan kepada lingkungannya terkait aspek pencegahan dan akses layanan korban kekerasan perempuan dan anak. Upaya yang dapat dilakukan para kader dasawisma, yakni mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selain memberdayakan kader PKK, Jakarta juga mengajak masyarakat umum untuk turut berperan dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apabila masyarakat Jakarta mengalami atau melihat kekerasan, dapat melaporkan melalui beberapa kanal pengaduan, yaitu Layanan Jakarta Siaga 112, UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Jl. Raya Bekasi Timur Km. 18, Pulogadung, Jakarta Timur dengan *hotline* 081317617622, serta Pos Pengaduan yang tersebar di Rumah Susun dan RPTRA sebagai berikut:

### 1. Jakarta Pusat:

RPTRA Pulo Gundul dan RPTRA Harapan Mulya.

### 2. Jakarta Utara:

RPTRA Rusunawa Marunda dan RPTRA Rusun Muara Baru.

### 3. Jakarta Barat:

RPTRA Kalijodo, Rusunawa Pesakih, RPTRA Utama, RPTRA Kembangan Utara, dan RPTRA Jati Pulo Akur.

### 4. Jakarta Selatan:

RPTRA Kemandoran, RPTRA Flamboyan, RPTRA Kemuning, dan RPTRA Ciganjur.

### 5. Jakarta Timur:

Rusun Cipinang Besar Selatan, Rusunawa Pulogebang, Rusun Griya Tipar Cakung, RPTRA Ciracas Prima, RPTRA Kampung Pulo Asri.

### 6. Kepulauan Seribu:

RPTRA Tanjong Timur. (\*)

### Agenda ke depan

Jakarta akan terus mewujudkan kota yang aman bagi semua melalui ragam inisiatif. Agenda yang direncanakan termasuk kolaborasi dengan lebih banyak pihak eksternal untuk aktivasi *event* di Hari Perempuan Internasional, sekaligus menjadi momentum untuk pemberdayaan Ibu PKK di Jakarta punya andil besar untuk mengamankan kota dan bekerja untuk kesejahteraan melalui pendataan, meneruskan himbauan, dan bergerak di tengah masyarakat. Selain itu, kedepannya Pergub pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak yang komprehensif dapat diluncurkan bersamaan dengan peresmian Pusat Layanan Keluarga (PUSPA) sebagai kanal informasi bagi keluarga, perempuan dan anak.

Nyatanya, kunci dari pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak berhenti pada memastikan angka tindak kekerasan turun dan/atau nihil, tetapi juga memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan informasi yang tepat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Pentingnya kesadaran bahwa tindak kekerasan bukanlah hal yang tabu, serta tidak dapat ditolerir, serta penyebarluasan informasi kanal-kanal pengaduan dan layanan yang telah tersedia perlu terus didorong dan diupayakan bersama. Sebab, semua pihak perlu ambil bagian dalam menciptakan ruang aman bagi semua.

## Integrasi Bansos dan Carik, Aksesibilitas Bagi Disabilitas, KLJ & KAJ

*Hadirkan kesejahteraan lewat bantuan sosial*

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu fokus Jakarta dalam perencanaan pembangunan. Terdapat dua pendekatan Jakarta untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas warga, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Di mana dua pendekatan utama tersebut akan diturunkan dalam program strategis seperti Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk mendorong efektivitas distribusi BST, dilakukan pengembangan Integrasi Data Bantuan Sosial atau bisa disebut sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Daerah. DTKS telah digulirkan padanan datanya dengan Data Keluarga (Carik Jakarta). Situs dan aplikasi Carik Jakarta telah digunakan oleh Kader Dasawisma di bawah PKK yang melakukan *door to door* untuk mencatat kondisi bangunan, lingkungan, dan keadaan keluarga. Program ini didukung dengan adanya pembentukan UPT Pusdatin Jaminan Sosial yang ada di Dinas Sosial dan UPT Pusdatin Keluarga yang ada pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Setiap unit kerja perlu memastikan manajemen atas mekanisme implementasi setiap program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* hingga evaluasinya. Diharapkan basis data tersebut mendorong peningkatan akuntabilitas, penyediaan data yang akurat, serta mendorong pendistribusian BST yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan akan warga kotanya.

BST sendiri merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Di mana bantuan sosial yang hadir harus bisa menjawab kebutuhan dari 4 kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lansia, anak, dan perempuan. Bantuan bersumber dari dana APBD DKI dan disalurkan melalui rekening Bank DKI. Beberapa program bantuan sosial yang dilakukan Jakarta dalam bentuk kartu, termasuk di dalamnya Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ). *Monitoring* dan evaluasi secara berkala dikawal oleh TGUPP untuk memastikan pencairan dari inisiatif tersebut bisa dilakukan tepat waktu.



## Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta

Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) adalah salah satu program bantuan yang bertujuan untuk mencegah kerentanan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar bagi para penyandang disabilitas di Jakarta. Nilai kesetaraan menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya program KPDJ, bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Hanya saja, seorang penyandang disabilitas memiliki tambahan-tambahan kebutuhan yang mungkin saja tidak diperlukan oleh masyarakat non-disabilitas. Oleh karena itu, program KPDJ diharapkan dapat membantu para penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka butuhkan.

Selain KPDJ, di 2021 aksesibilitas disabilitas juga perlu dipastikan untuk menegakan kesetaraan di tengah masyarakat. terdapat program lainnya untuk pemberdayaan disabilitas lewat pelatihan kerja bersama dengan Disnakertrans, serta Jakpreneur untuk memfasilitasi penyandang disabilitas berwirausaha. Kemudahan pengurusan perijinan, pengajuan bantuan permodalan, subsidi bahan baku, dan pemasaran atau bazar secara daring (*online*) menjadi pendampingan yang diberikan bagi para peserta. Harapannya, program ini dapat mendorong produktivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis usaha mikro kecil dan menengah.

Di sisi lain, melalui Bidang Respon Strategis, TGUPP hadir langsung berkolaborasi dengan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan bantuan berupa penyediaan kursi roda dan alat bantu dengar untuk warga Jakarta yang membutuhkan. Lebih dari penyediaan, fasilitasi alat bantu dengar ini didahului dengan pemeriksaan langsung oleh dokter di rumah warga untuk memastikan kesesuaian alat bantu dengar dengan kebutuhan warga tersebut.



### **Kartu Anak Jakarta**

Setiap anak berhak atas kehidupan yang sejahtera dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan tempat ia tumbuh. Karena itu, Jakarta memberikan bantuan sosial untuk anak melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ). KAJ diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar anak seperti susu, makanan bergizi, dan keperluan penunjang lain yang mendukung tumbuh kembang anak. KAJ diperuntukkan bagi anak dari keluarga prasejahtera berusia 0-6 tahun. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan anak usia dini. KAJ telah diluncurkan secara simbolis pada 26 Maret 2021, sebagai program kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank DKI. Sebanyak 9.531 anak menjadi penerima KAJ pada 2021. Pada tiga bulan pertama 2021, penerima KAJ akan menerima bantuan sebesar Rp900 ribu per anak untuk dana tiga bulan (Januari-Maret). Setelah itu, pencairan dana akan dilaksanakan setiap bulan sebesar Rp 300.000 dan berlangsung selama 1 tahun. Pendistribusian dana diharapkan dapat segera selesai pada minggu keempat April 2021.

### **Kartu serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ)**

Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lanjut usia. Mereka yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, akan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 setiap bulan. Persyaratan utama untuk memperoleh bantuan melalui KLJ adalah warga berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, mereka juga harus dalam kondisi status sosial ekonomi terendah dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu. Bagi lansia yang identitasnya tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu, namun memenuhi syarat sebagai penerima manfaat KLJ, maka bisa diusulkan melalui proses Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di kelurahan setempat. Lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilannya sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga hidupnya sangat bergantung kepada orang lain merupakan sasaran utama KLJ. Tak hanya itu, lansia yang sakit menahun dan hanya bisa terbaring di tempat tidur, termasuk golongan yang berhak atas bantuan ini. Jakarta juga menyasar warga usia lanjut yang terlantar secara psikis dan sosial. Tercatat terdapat 78.169 penerima KLJ di 2021 yang menerima manfaat dari kartu tersebut.



### Hikmah yang dapat dipetik

- Isu sosial merupakan isu yang kompleks dan *multi-layer*, sehingga pendiskusiannya perlu digali secara mendalam dan menyeluruh. komunikasi yang dibangun tidak sekedar komunikasi ke kbid/kabag/kadis saja tapi sampai ke stafnya.
- Bicara soal isu sosial lekat dengan persoalan korban, kemiskinan, lansia, disabilitas. Perlunya merangkul SKPD terkait untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar bersama.
- Kolaborasi menjadi kunci bagi SKPD terkait, khususnya dengan pihak eksternal terkait pemenuhan alat bantu bagi difabel, juga input bagi program yang relevan.



## JakPreneur

*Lampaui target, terus dukung UMKM kota kita!*

### Dasar Kolaborasi, fasilitasi UMKM kita

Hadir sejak beberapa tahun, JakPreneur terus hadir sebagai wadah pengembangan yang mendorong wirausaha raih keuntungan lewat semangat kolaborasi. Hal tersebut, dilakukan dengan mempertemukan UMKM bersama komunitas, akademisi, dan warga lainnya untuk saling bertumbuh. Tercermin, pada 2021, ragam kegiatan terus diupayakan: pelatihan, perizinan, pemasaran, permodalan, bahan baku murah, dan masih banyak lagi. Semuanya, dengan sumber anggaran kota, hingga kolaborasi bersama pelbagai kolaborator.

### Target ditunaikan

Secara umum, target besar inisiatif ini adalah pengembangan wirausaha, terutama yang baru. Khusus di 2021, peningkatan kualitas menjadi prioritas disamping mencari anggota baru. Caranya beragam: bantuan perizinan, dukungan kredit, hingga pemasaran produk melalui bazar tingkat kelurahan-ruang publik-mal. Lebih lanjut, agar narasi dan semangat ini dapat tergaungkan lebih, tersusun sebuah aktivasi bertajuk “JakPreneur Festival.”

Alhasil, total pelaku usaha naik lebih dari 80.000 dari target 200.000 UMKM. Selain itu, sebanyak 177.340 anggota telah mendapat pendampingan, 161.504 anggota telah memiliki izin, 7.469 anggota telah difasilitasi permodalan.

Pada acara JakPreneurFest sendiri, telah bergabung 294 peserta kompetisi bisnis, 218.393 penonton pada kelas daring, hingga total transaksi senilai Rp1,3 M pada pasar *online* dalam 7 hari.





**Foto 38: Pasar Jakpreneur dalam Jakprenur Festival 2021 di Selasar Fatahilah Kota Tua**

Sumber: Jakarta Experience Board (JXB)



**Foto 39: Malam Apresiasi Jakpreneur Fest 2021 |** Sumber: Jakarta Experience Board (JXB)

### Kolaborasi dan aksi di masa pandemi

Dalam mencapai berbagai usaha di atas, kolaborasi terus menjadi unsur dasar pergerakan inisiatif JakPreneur. Pada tahun ini, ragam kolaborasi telah terjalin bersama 200+ pihak: Pemerintah, perguruan tinggi, *start-up*, dan lembaga kemanusiaan, komunitas, hingga perbankan, termasuk perusahaan swasta. Kegiatan antarpihak ini, terwujudkan dengan hadirnya pelatihan, pemasaran, permodalan, pendampingan, hingga kolaborasi penjualan, dan dukungan lainnya. Sebagai contoh, JakPreneur telah berkolaborasi dengan Ninja Xpress, Mbloc, dan Tokopedia dalam memasarkan hingga menggaungkan karya/produk UMKM kita.

### Peran TGUPP

Dalam perjalanannya, TGUPP hadir memberi arah kebijakan JakPreneur, sesuai dengan penurunan visi Gubernur. Hal ini, dilakukan lewat upaya pendampingan dinas dalam mendorong kebijakan sekaligus penyusunan arah besar ke depan. Lebih lanjut, agar identitas dan semangat pengembangan kewirausahaan dapat terwujud, upaya pengembangan jenama “JakPreneur” juga terus dikawal secara intensif agar bisa membumi dalam lingkup masyarakat.

### Bicara 2022

Melalui visi Gubernur, pencapaian angka akan terus ditingkatkan. Harapannya, semakin banyak anggota UMKM yang turut ambil bagian, bahkan menyentuh angka 300.000 peserta. Lebih lanjut, hal ini juga didorong selaras dengan pemutakhiran sekaligus verifikasi data yang terintegrasi dalam unsur digital. Sejauh ini, Dinas PPKUKM yang menaungi sekaligus mengelola inisiatif ini, sudah membentuk tim pelaksana informasi (UPT Pusdatin) yang harapannya mampu mengelola dan menjawab target tersebut.

Lebih lanjut, target besar juga disusun pada 2022: lahirnya landasan hukum pendukung program penataan pedagang kaki lima (PKL), penyelenggaraan kawasan UMKM, dan perwujudan kemitraan pusat perbelanjaan & toko swalayan dengan UMKM. Semua ini, diharapkan bisa hadir seiring kondisi pandemi.





## Formula E

### Bawa Jakarta ke panggung dunia

Jakarta resmi menjadi tuan rumah untuk balapan mobil listrik Formula E 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2022 di sirkuit kawasan Ancol, Jakarta Utara. Formula E atau nama resminya *FIA Formula E Championship*, merupakan kejuaraan balap mobil tenaga listrik dengan kursi tunggal, yang dinaungi Federasi Otomotif Internasional (FIA). *Event* ini bertujuan untuk memperkenalkan industri mobil *hybrid* bertenaga listrik serta mengurangi emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi mengharuskan adanya pengkajian kerjasama Formula E di semua kota di dunia untuk dapat memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi. Hasil kesepakatan antara Jakarta dengan *Formula E Operations* (FEO) menyatakan bahwa pelaksanaan Formula E akan berlangsung selama 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Bentuk acara juga disesuaikan seperti seberapa banyak jumlah penonton,

acara pendukung apa yang bisa dilakukan, penunjukan *steering committee* yang baru, pencarian sirkuit yang paling pas dan lain sebagainya. Sirkuit Ancol terpilih karena pertimbangan lokasi cukup luas, tidak jauh dari pusat kota, minim gangguan *traffic*, dan pertimbangan lainnya. Segala jenis pembiayaan Formula E yang berasal dari APBD 2019 telah dibayar 2 tahun lalu. Jadi, tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk komitmen *fee* maupun biaya penyelenggaraan ke depan, melainkan dengan skema *business to business*. TGUPP sebagai *think tank* mendorong kerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang akan membantu pelaksanaan Formula E di Jakarta, terutama dalam memastikan bahwa semua pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan standar yang telah ditetapkan oleh FIA. Selain itu, TGUPP juga melakukan monitor untuk keseluruhan kerjasama dan persiapan pelaksanaan Formula E.



Gambar 20: Linimasa Persiapan Formula E | Sumber: Jakpro

Semangat Formula E sejalan dengan RPJMD Jakarta yang ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing melalui pelibatan peran serta masyarakat melalui sertifikasi usaha pariwisata dan penerapan *E-Tourism*. Jakarta mengharapkan **dampak jangka pendek** seperti:

1. Pemasukan pajak langsung dari penyelenggaraan event;
2. Membuka lapangan kerja baru;
3. Pendapatan dari turisme seperti F&B, hotel, transportasi dan souvenir; serta daya tarik Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern dan ramah lingkungan.

Sisi lain, **dampak jangka panjang** yang diharapkan di antaranya:

1. Keuntungan finansial dan nonfinansial akan melebihi biaya penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta yang rencananya diadakan setiap tahun mulai tahun 2022. Dampak tersebut menjadi lebih strategis mengingat DKI Jakarta memerlukan momentum bagi ekonomi untuk tumbuh, setelah mengalami resesi akibat krisis pandemi Covid-19;
2. Pemasukan pajak dari efek peningkatan belanja rumah tangga akibat tumbuhnya industri yang langsung bersinggungan dengan produksi dan pemeliharaan mobil listrik atau industri yang tidak langsung bersinggungan seperti industri kreatif yang muncul akibat dari penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta;
3. Bertumbuhnya sektor penelitian dan pengembangan bisnis seputar industri mobil listrik yang diprediksikan akan menjadi motor ekonomi masa depan;
4. Investasi ke DKI Jakarta dan sekitarnya untuk industri yang berdampak langsung seperti industri mobil listrik dan yang tidak berdampak langsung seperti industri kreatif dan pariwisata;
5. Daya tarik DKI Jakarta sebagai kota tujuan wisata lokal dan mancanegara; serta
6. Penyelenggaraan Formula E dapat memberikan banyak peluang untuk menampilkan profil Jakarta sebagai kota yang modern, maju dan ramah lingkungan; sejajar dengan kota maju lain di berbagai belahan dunia.



*Event Formula E* yang akan berlangsung juga memperhatikan secara ketat semua standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satgas Covid-19 nasional dan aturan protokol kesehatan global dengan prioritas untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak memberikan dampak buruk bagi upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Harapannya, *event* ini dapat menjadi percontohan bagaimana pertunjukkan, kejuaraan dan acara bisa dilaksanakan dengan baik, adaptif, berdampak positif di tengah kondisi pandemi global, serta mendorong percepatan *economic recovery* pasca pandemi Covid-19, dengan membuka diri sebagai tempat tujuan wisata dan investasi yang ramah lingkungan.

### Hikmah yang dapat dipetik

- Persistensi merupakan kunci untuk menjaga semangat bersama. Melihat isu Formula E menjadi salah satu isu yang terus dikritisi oleh publik. Perlunya perkuat visi bersama: Apapun yang terjadi, kita harus persisten untuk melangkah terus.

## Kolaborasi

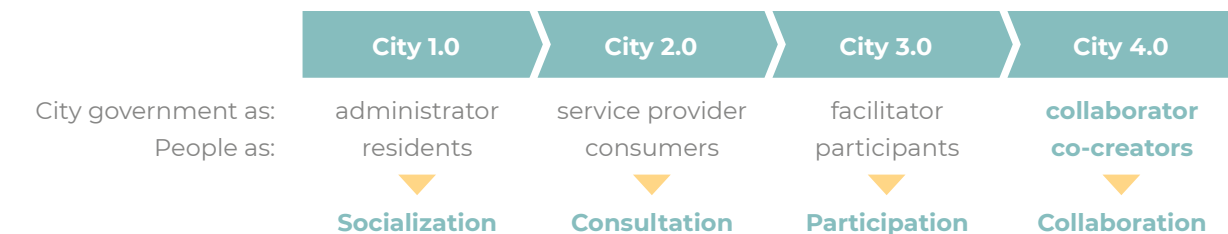
*Mewujudkan Jakarta kota kolaborasi*

### Tentang Kolaborasi

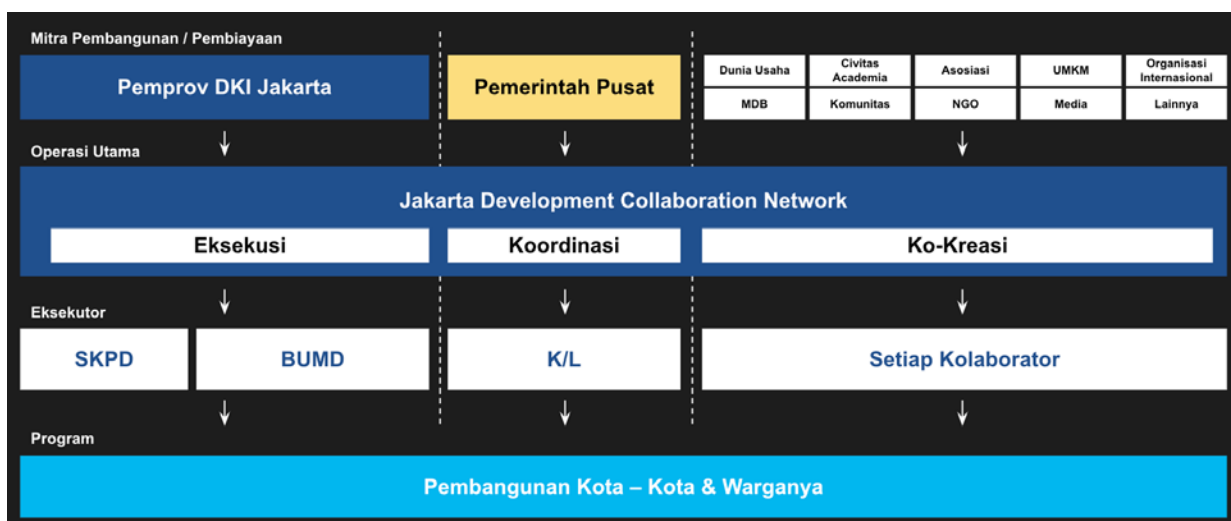
Persepsi masyarakat akan Jakarta sangat beragam, termasuk terkait berbagai permasalahan kota, misalnya kemacetan dan ketimpangan. Semangat kolaborasi hadir untuk mewujudkan Jakarta yang semakin layak huni, maju dan setara, yang tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya Pemerintah, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang hadir dan turut serta melakukan aksi nyata untuk Jakarta. Gagasan kolaborasi kota Jakarta dirangkum dalam gagasan *City 4.0* dan dijalankan melalui +Jakarta dan *Jakarta Development Collaboration Network* (JDCN).

+Jakarta adalah sebuah penjenamaan kota Jakarta. Tidak hanya berhenti sebagai logo dan *branding*, +Jakarta juga sebagai wadah untuk membumikan dan penggerak semangat kolaborasi antar pihak demi mewujudkan dampak positif untuk Jakarta dan warganya. Wadah ini hadir dalam wujud penjenamaan kota.

JDCN merupakan organisasi yang menjadi inisiator dan katalisator, mempertemukan antar warga sebagai ko-kreator pembangunan dan kegiatan di Jakarta, termasuk juga dengan Pemprov DKI Jakarta.



**Gambar 21: Konsep City 4.0 yang diadopsi oleh Pemprov DKI Jakarta** | Sumber: Marcus Ford



**Gambar 22: Kerangka Jakarta Development Collaboration Network** | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

+Jakarta sebagai jenama dan JDCN sebagai *platform* kolaborasi, keduanya hadir dengan tujuan utama untuk memfasilitasi seluruh masyarakat bisa berkolaborasi berbagi ide hingga aksi demi kemajuan kota Jakarta. Semangatnya adalah mempertemukan para pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk menyatukan energi dan sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan baik tersebut bisa lebih efektif dan efisien dicapai.

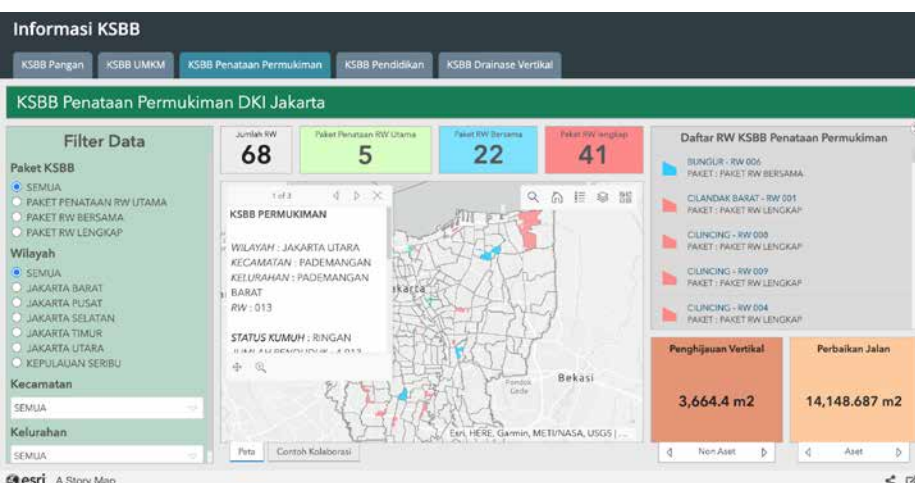
## Kolaborasi Jakarta

Hadirnya pandemi Covid-19 turut berdampak pada berbagai aktivasi gagasan kolaborasi Jakarta, terutama pada program/kegiatan *offline* yang tertunda. Namun, di sisi lain, juga menjadi momen yang menunjukkan besarnya semangat seluruh warga untuk ikut hadir dan turut serta berkolaborasi dalam penanganan Covid-19. Jakarta yang mengusung semangat kolaborasi terus berupaya menangkap energi masyarakat tersebut untuk disalurkan dan disalurkan pada berbagai lini melalui Kegiatan Sosial Berskala Besar (KSBB).

Pada tahun 2019 dan 2020, Jakarta melahirkan dan menggerakkan banyak sekali inisiatif kolaborasi, seperti program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Mengulas sedikit, KSBB adalah suatu inisiatif yang berupa *platform* atau wadah bagi *co-creator* berkolaborasi dengan kota dengan berbagi sumber daya. Inisiatif ini dimulai dengan berbagi pangan sebagai tambahan dari bantuan pemerintah. Namun, filosofi dari kegiatan ini sebenarnya, tidak selalu dalam bentuk donasi. Sumber daya di masyarakat dapat dikelola, siapa yang tertarik untuk memberikan dan mengeluarkan sesuai dengan visi kota. Berbagai macam bentuk KSBB yang sudah berjalan sejak tahun 2020 masih terus berjalan hingga saat ini, yaitu KSBB Pangan, KSBB UMKM, KSBB Pendidikan, dan KSBB Ketenagakerjaan.



Foto 40: Kegiatan penyaluran bantuan dari warga oleh warga untuk warga | Sumber: Kolaborator KSBB Pangan



Gambar 23: Platform Kolaborasi Jakarta | Sumber: plus.jakarta.go.id





**Foto 41: Kampung Asuh Jakarta** | Sumber: YPO International

Filosofi kegiatan KSBB ternyata diminati oleh berbagai pihak di internal maupun eksternal Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2021, inisiatif ini berkembang melahirkan program kolaborasi di bidang Permukiman dan Persampahan.

Kolaborasi Permukiman dilakukan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan rumah yang layak huni. KSBB permukiman berhasil meluncurkan program Kampung Asuh dengan ~25.000 warga yang terbantu. Bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dengan menyediakan 1 unit IPAL, 10 unit tempat sampah, 20 m<sup>2</sup> penghijauan vertikal, 30 unit alat di TPS, 1 gapura, dan 1 MCK komunal.

Sedangkan Kolaborasi persampahan muncul untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah. Program ini memungkinkan warga memberikan bantuan sarana prasarana, pendampingan, dan pengolahan sampah kepada unit terkecil di masyarakat, yaitu RW dan bank sampah. Sebanyak 99 RW dan bank sampah telah terbantu dengan hadirnya program KSBB ini.

Pada penghujung tahun, Pemprov DKI Jakarta juga menggagas program kolaborasi untuk penanganan banjir, yaitu bergerak bersama untuk mengeruk badan air dan juga membangun serta melaporkan sumur resapan. Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan, lebih dari filosofi donasi.

Program Kolaborasi dikelola oleh JDCN mulai dari perumusan konsep, perjanjian kerja sama dengan *co-creator*, dan inisiasi penggunaan *IT system*. Selain itu, sekretariat JDCN juga memfasilitasi kebutuhan teknis, seperti administrasi, publikasi, kampanye aksi bersama, serta mengikutsertakan *co-creator*. Di luar program dan kolaborasi yang telah disebutkan, banyak pula kegiatan kolaborasi lain yang digagas dan dilaksanakan langsung oleh setiap OPD dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha, hingga dunia internasional. Aktivitas ini tidak dibatasi dan justru terus didorong. Hanya saja, penting adanya pemetaan dan rekam jejak kolaborasi kota untuk memastikan kesesuaiannya dengan visi kota serta menjaga hubungan baik dengan seluruh warga dan kolaborator Jakarta sehingga kolaborasi bisa menjadi berkelanjutan.



Banyak pihak yang terlibat dalam kolaborasi Jakarta sehingga komunikasi kepada para kolaborator dan penerima manfaat dilakukan setiap adanya KSBB baru yang diluncurkan. Masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawaban dari setiap kolaborasi yang dilakukan pada *platform* KSBB maupun media sosial karena seluruh aktivitas kolaborasi terekam secara digital.

JDCN juga turut serta menjaring dan memfasilitasi ide kolaborasi yang dilakukan dengan menghubungkan ide-ide dari masyarakat sebagai ko-kreator kepada OPD Pemprov DKI Jakarta.

Dalam pengimplementasian gagasan kolaborasi, TGUPP memiliki peran cukup krusial menjadi mitra erat OPD, yaitu menggagas dan menangkap ide, menstrukturkan berbagai ide tersebut menjadi konsep hingga menerjemahkannya dalam bentuk rencana aksi, *tools*, maupun mekanisme yang dapat dipahami berbagai pihak, baik internal Pemprov DKI Jakarta maupun para ko-kreator. Termasuk, merumuskannya dalam bentuk regulasi dan merencanakan serta mempersiapkan program turunannya.

Edukasi juga diberikan untuk meningkatkan *ownership* OPD terhadap program-program yang dilakukan, seperti membantu dalam penyusunan *guide* dan *brainstorm* konsep.

Dalam proses formulasi hingga implementasi, TGUPP juga berperan sebagai percepatan, yaitu mendorong kesesuaiannya dengan target yang telah disepakati, dan *debottlenecking*, yaitu mengurai masalah dengan mengusulkan penyelesaiannya.

Saat ini, inisiatif dan penerjemahan gagasan ke dalam bentuk operasional kolaborasi masih cukup bergantung pada TGUPP, terutama karena praktik yang belum biasa di OPD. Padahal, kepemilikan OPD akan program kolaborasi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan program. Kepemilikan oleh OPD di sini juga tidak hanya terbatas pada Biro Kerja Sama Daerah yang sudah selalu memimpin perumusan program-program terkait, tetapi justru OPD pengampu sektoral program tersebut. Maka, Mengingat inisiatif program berasal dari TGUPP, kepemilikan program kolaborasi KSBB oleh OPD perlu diperkuat agar kolaborasi yang telah berlangsung saat ini tidak hanya sekedar jargon, tetapi dapat diimplementasikan untuk dapat memberikan dampak kepada masyarakat.



Foto 42: Festival Kerja Bakti | Sumber: Jakarta Experience Board



Foto 43: Festival Kolaborasi Jakarta | Sumber: Youtube DKI Jakarta



Foto 44: #IniJakarta di Lapangan Banteng | Sumber: tim +Jakarta

## Memastikan keberlanjutan gagasan kolaborasi Jakarta

Berbagai capaian penting terjadi selama tahun 2021. Beberapa hal yang utama ialah proses membudayakan kolaborasi ke dalam internal Pemprov DKI Jakarta, yaitu para OPD, melalui diklat kolaborasi yang telah dilaksanakan dalam diklatpim 3, diklatpim 4, dan Latsar yaitu kepada CPNS Pemprov DKI Jakarta. Inisiasi kolaborasi juga sudah mulai muncul langsung dari OPD. Seluruh perkembangan ini merupakan sinyal baik yang penting, karena tujuan utamanya ialah bagaimana seluruh OPD di Pemprov DKI Jakarta dapat memahami gagasan kolaborasi, memiliki mindset kolaboratif, dan dapat menyelenggarakan kolaborasi serta memfasilitasi ko-kreator untuk berkolaborasi secara berkelanjutan.

Setelah pada tahun sebelumnya terlaksana JDCN Forum sebagai perayaan kolaborasi di Jakarta, tahun 2021 diselenggarakan **Festival Kolaborasi Jakarta (FKJ)** yang setiap tahunnya akan terus diselenggarakan. FKJ terdiri dari berbagai acara yang terangkai menjadi satu kesatuan dengan melibatkan berbagai ko-kreator. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan komunitas seperti Indonesia Mengajar, *Indonesia Resilience*, relawan, hingga ASN muda untuk bekerja bakti dan berkolaborasi bersama di FKJ, yaitu Festival Kerja Bakti maupun #IniJakarta.

FKJ 2021 menghadirkan 54 pembicara dan 13 moderator pada acara utama. Seluruh rangkaian acara FKJ 2021 menjangkau total lebih dari 12 juta orang dan berkolaborasi dengan 76 organisasi.





Foto 45: Mural +Jakarta di KoJa | Sumber: tim +Jakarta

Salah satu rangkaian FKJ 2021, yaitu Festival Kerja Bakti, berhasil menyelenggarakan 6 kegiatan acara yang diadakan oleh 60 relawan panitia dengan 937 relawan kerja bakti dan lebih dari 200 mitra sasaran. Selain itu, #IniJakarta melibatkan lebih dari 60 komunitas dalam *Jakarta Community Guidebook* dan Ruang Komunitas #IniJakarta dengan total ~7.370 pengunjung dalam waktu 3 hari.

Selain kolaborasi berbentuk program/kegiatan, pada tahun 2021 juga dihasilkan kolaborasi dalam bentuk dokumen Buku Putih berjudul “Penguatan Sistem Kesehatan Publik Perkotaan Jakarta: Pendekatan Lintas Sektor dan Kolaboratif menuju Pelayanan Kesehatan Publik yang Promotif dan Preventif”. Dalam penyusunannya, Bappeda sebagai *think tank* utama. Buku Putih ini melibatkan berbagai ko-kreator, yaitu FKM UI, USAID IUWASH, *Joint Learning Network – World Bank*, WHO Indonesia, IAP, IAKMI, Squad Penanggulangan Bencana Indonesia, Dewan Riset Daerah Jakarta, UCLG ASPAC dan *Resilient Cities Network*.

### Memperkenalkan kembali penjenamaan Kota Jakarta

Dari aspek pengenalan kembali penjenamaan kota Jakarta, dilakukan penayangan konten melalui videotron, peletakan 6 instalasi +Jakarta Kota Kolaborasi dan lebih dari 500 mural yang tersebar di Kota/Kabupaten Jakarta. Juga, terus digalakkan berbagai aktivasi melalui media sosial, termasuk perluasan *platform* yang sebelumnya melalui *Instagram*, *Website* dan *Youtube*, kini sudah bertambah kehadirannya di *Spotify* dan *TikTok*. Pengenalan tentang penjenamaan baru kota Jakarta termasuk semangat kolaborasinya juga dilakukan hingga menjangkau skala internasional, salah satunya melalui hadirnya rubrik +Jakarta Kota Kolaborasi dalam majalah *Monocle*.



Foto 46: +Jakarta di Monocle  
Sumber: tim +Jakarta



Foto 47: Relawan +Jakarta di #IniJakarta | Sumber: tim +Jakarta

Bentuk penyelarasan akan penjenamaan kota Jakarta juga turut dituangkan mulai dari kampanye-kampanye kreatif seperti taat protokol kesehatan dan ajakan vaksinasi, juga pada perayaan hari-hari besar seperti pada HUT DKI Jakarta. Tidak hanya itu, penyelarasan juga dilakukan berupa usulan penjenamaan untuk RS Daerah Jakarta dan Perpustakaan Daerah Jakarta.

Ajakan kepada seluruh masyarakat Jakarta juga terus dilakukan, salah satu upaya untuk menjangkau anak-anak muda di Jakarta melalui pembukaan relawan untuk mengelola berbagai sosial media dan acara penjenamaan kota Jakarta, yaitu +Jakarta. Seiring berjalannya waktu jumlah relawan yang bergabung kian bertambah, selama tahun 2021 sudah sebanyak **112 relawan** yang terlibat.

Hadirnya pandemi Covid-19 turut berdampak pada berbagai aktivasi gagasan kolaborasi Jakarta, terutama pada program/kegiatan *offline* yang tertunda. Namun, disisi lain, juga menjadi momen yang menunjukkan besarnya semangat seluruh warga untuk ikut hadir dan turut serta berkolaborasi dalam penanganan Covid-19. Jakarta yang mengusung semangat kolaborasi terus berupaya menangkap energi masyarakat tersebut untuk disalurkan dan disalurkan pada berbagai lini melalui Kegiatan Sosial Berskala Besar (KSBB).





### Agenda ke depan

Ke depan, penting untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi yang telah dibangun, pengembangan, serta inisiasi kolaborasi baru di masa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan kesiapan internal Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan berbagai diklat kolaborasi dan menyiapkan sumber daya manusia khusus dari para ASN dan non ASN untuk mampu berpikir bebas dan inovatif serta mengelola ide-ide program maupun penguasaan semangat kolaborasi membangun Jakarta.

Agar kegiatan kolaborasi dapat terus berjalan, penting untuk menempatkan kepemilikan dan kapabilitas OPD untuk berkolaborasi melalui edukasi dan diklat rutin. Selain itu, penting untuk adanya efisiensi dalam mengembangkan kegiatan kolaborasi masif, yaitu melalui pembangunan platform kolaborasi.

Secara khusus, saat ini juga telah digagas program kolaborasi seni untuk mempertemukan seniman dan masyarakat umum dengan ruang untuk mengekspresikan seninya. Harapannya program ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2022 agar dapat lebih masif menyediakan ruang bagi para seniman dan pelaku kreatif.

Telah dirintis sejak 2021, platform ini akan segera diperkenalkan kepada publik dan digunakan oleh publik maupun internal Pemprov DKI Jakarta sebagai wadah utama untuk mempertemukan stakeholder dan masyarakat yang memiliki visi yang sama dan berinovasi. Proses pertemuan dan fasilitasi dapat terjadi dengan lebih efisien dan cepat.

## Hikmah Pembelajaran

- Pentingnya rasa kepemilikan akan suatu gagasan dan implementasi program/kegiatan kolaborasi pada internal Pemprov DKI Jakarta sebagai eksekutor, agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Rasa kepemilikan tersebut perlu terus diasah dengan peningkatan kapabilitas, pengalaman, serta kepemimpinan. Selain dari aspek sumber daya manusia, memastikan keberlanjutan juga perlu didukung oleh berbagai instrumen baik berupa regulasi, penilaian kinerja hingga *booklet* yang dapat menjadi panduan lengkap terutama bagi internal Pemprov DKI Jakarta, serta materinya dapat disadur dan diadaptasi untuk menjadi informasi kepada para ko-kreator.
- Menginisiasi program dan kegiatan kolaborasi sangat bergantung pada kebebasan berpikir dan kemampuan mengelola *stakeholders*. Maka dari itu, akan terus diperlukan ASN muda dan regenerasinya untuk dapat mengawal langsung setiap kegiatan kolaborasi, baik di lingkup OPD masing-masing maupun di lingkup fasilitas kolaborasi, yaitu di JDCN. Kepercayaan dari pimpinan juga menjadi kunci utama agar ASN tersebut dapat terus berinovasi dan berkembang.
- Pentingnya menjadikan +Jakarta Kota Kolaborasi menjadi penjenamaan yang hidup, melalui kesempatan bagi masyarakat seluas-luasnya sehingga dampaknya bisa berkali-kali lipat untuk kemajuan kota Jakarta.
- Tata kelola dan inovasi perlu bisa dipahami oleh semua orang karena masih ada yang menganggap bahwa kolaborasi Jakarta adalah sama saja dengan donasi. Hal ini menyebabkan ko-kreator dan bahkan OPD membatasi diri untuk berinovasi lebih dalam berkolaborasi.





## **BAB 5:** Kontemplasi



Berbagai hal yang terjadi di Jakarta pada tahun 2021 merupakan buah dari upaya tak henti yang dilakukan bersama oleh seluruh pihak sejak beberapa tahun ke belakang. Proses perwujudannya juga perlu menghadapi beraneka ragam tantangan yang berbuah pembelajaran untuk Jakarta.



Foto 48: Kampung Susun Aquarium | Sumber: Pemprov DKI Jakarta



# YUK IKUT

## PODCAST RABU BELAJAR

**TEMA :**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH**

**NARASUMBER**



Imam Heykal  
 Djajadinigrat, S.H., M.H.  
 Perancang Peraturan  
 Perundang-undangan Ahli  
 Pertama Biro Hukum

**HOST**



Amelia Monicasari, S.H., M.Kn.  
 Analis Peraturan Perundang Undangan  
 Biro Hukum

Rabu,  
 21 Juli 2021

11.00 –  
 12.00 WIB

Live on Youtube :  
 Pemprov. DKI Jakarta  
 BPSDM DKI Jakarta

**Jakarta**  
kota kulinernya

Gambar 24: Podcast Rabu Belajar untuk ASN DKI Jakarta

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

**Pertama**, menciptakan gagasan adalah hal besar. Namun, hal yang tidak kalah besar ialah bagaimana gagasan tersebut dipahami dan dijadikan pedoman bersama oleh internal Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, termasuk juga menerjemahkan mimpi dan visi Gubernur hingga menjadi hal-hal praktis yang dipahami dan terasa langsung oleh warga Jakarta. Menghadirkan perubahan pada suatu hal yang sudah terbangun sejak lama menjadi tantangan tersendiri, resistensi seringkali timbul, padahal mekanisme eksisting belum tentu yang terbaik untuk kondisi saat ini. Langkah inovatif perlu terus didorong dengan fokus meningkatkan kebermanfaatannya bagi warga Jakarta.

**Kedua**, pentingnya rasa kepemilikan dan komitmen akan suatu gagasan, transformasi, hingga program/kegiatan pada internal Pemprov DKI Jakarta sebagai eksekutor, agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Rasa kepemilikan tersebut perlu terus diasah dengan peningkatan kapabilitas, pengalaman, serta kepemimpinan. Juga, dilanjutkan dengan regenerasi dan *transfer knowledge* pada generasi usia muda, misalnya para ASN Muda, untuk ikut serta mengawal langsung.

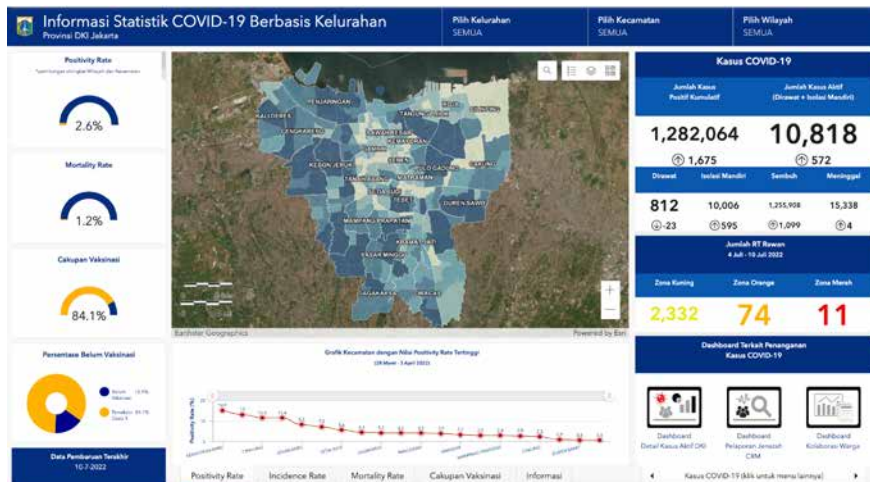
**Ketiga**, selain dari aspek ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia, memastikan keberlanjutan juga perlu didukung oleh kelengkapan instrumen baik berupa regulasi, penilaian kinerja hingga berbagai bentuk panduan. Tersedianya instrumen yang menjadi acuan bertujuan agar seluruh pihak dapat bergerak dan pelaksanaan dapat berjalan dengan acuan yang sama. Akselerasi proses penyiapan berbagai instrumen juga perlu dilakukan dengan tetap membuka ruang koreksi dan penyempurnaan ketika gagasan sudah menjadi program yang berjalan di lapangan.

**Keempat**, perubahan situasi yang sangat drastis justru memicu ide-ide baru yang transformatif dan membawa perubahan besar. Semenjak pandemi, Jakarta dengan seluruh unsur di dalamnya diajak bergerak cepat dalam memberikan pelayanan bagi warga. Lebih dari itu, nyatanya pandemi tidak menjadi halangan dalam mengakselerasi pembangunan. *Engagement* dengan berbagai pihak serta pencarian alternatif sumber pendanaan lainnya semakindigalakan untuk melanjutkan hal-hal yang telah berjalan walaupun terjadi realokasi sumber daya untuk fokus pada penanganan Covid-19.



Foto 49: Mobil Vaksin Covid-19 Keliling | Sumber: Pemprov DKI Jakarta





**Gambar 25: Dashboard Informasi Statistik Covid-19 Tingkat Kelurahan**  
Sumber: corona.jakarta.go.id

**Kelima**, perencanaan yang matang harus berbasis data untuk dapat mencapai target-target jangka panjang. Selain itu, juga partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk warga Jakarta sebagai penerima manfaat, bersama dengan validasi para ahli. Pengambilan keputusan berbasis data dan partisipatif ini ialah prinsip-prinsip yang akan terus dipertahankan kedepannya.



**Foto 50: Program Community Action Plan (CAP) dalam Revitalisasi Kampung** | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

**Keenam**, gagasan hingga program/kegiatan yang baik tidak lepas dari bagaimana warga Jakarta menerima dan memahami kebermanfaatannya. Oleh karena itu, persiapan strategi komunikasi menjadi satu kesatuan yang perlu dipersiapkan dalam proses perencanaan hingga implementasi. Harapannya, tidak hanya memahami, tetapi warga juga aktif turut serta dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan program/kegiatan tersebut.





**Foto 51: Penyaluran KSBB Pangan** | Sumber: Pemprov DKI Jakarta

**Terakhir**, kolaborasi menjadi kunci terwujudnya berbagai hal transformatif untuk Jakarta, baik kerja bersama antar instansi di dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta maupun dengan para mitra ko-kreator. Kolaborasi menjadi formula baru untuk melanjutkan dan memastikan program dapat terus berjalan. Ke depannya, kolaborasi juga akan terus didorong untuk melibatkan lebih banyak ragam ko-kreator untuk bersama-sama membangun Jakarta.

Poin-poin pembelajaran di atas ini hanya sekilas dari sekian banyak pembelajaran yang telah diperoleh dalam upaya terus membangun kota Jakarta. Harapannya, berbagai pembelajaran ini dapat menjadi pegangan bersama, baik bagi internal Pemprov DKI Jakarta maupun seluruh ko-kreator, dalam perwujudan Jakarta yang

**“Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.**



---

**JAKARTA BANGKIT**

2021